

+++

S SOEGIJAPRANATA
CATHOLIC UNIVERSITY



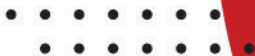
BUKU
PEDOMAN
2024-2025



FHK

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Program S-1
Ilmu Hukum
Ilmu Komunikasi





PEDOMAN
Fakultas Hukum & Komunikasi
2024 / 2025

program studi S1
Ilmu Hukum
Ilmu Komunikasi
program studi S2
Magister Hukum Kesehatan

Buku Pedoman Unika SOEGIJAPRANATA

Fakultas Hukum & Komunikasi Tahun Akademik 2024-2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

©Universitas Katolik Soegijapranata 2024

Desain Sampul : P Anggara PS
Perwajahan Isi : Hartoyo SP
Ukuran buku : 16,5 cm x 21,5 cm
Font : Calibri

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata
Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019
Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telpon (024)8441555 ext. 1409
Website : www.unika.ac.id
Email Penerbit : ebook@unika.ac.id

Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ



Uskup Pribumi Pertama di Indonesia
(Lahir di Solo, pada tanggal 25 Nopember 1896)
Diangkat sebagai Uskup tanggal 1 Agustus 1940 dengan motto : In Nomine Jesu
(Dalam Nama Yesus) "Jadilah 100% orang Katolik dan 100 % orang Indonesia"
ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dengan Kepres : 152 tahun 1963 tanggal
26 Juli 1963 dan diangkat sebagai Jendral TNI Kehormatan dengan
Kepres/Panglima Tertinggi ABRI dengan
Nomor : 223/AB-AD Tahun 1964 tanggal 17 Desember 1964
Beliau Wafat pada 22 Juli 1963 di Steiyl Belanda

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena tahun ini adalah tahun yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi segenap Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi. Pada awal sampai mendekati pertengahan tahun 2024 ini, kita menerima kabar gembira yakni Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi telah memperoleh Akreditasi “Unggul”, setelah sebelumnya Program Studi S-2 Magister Hukum (Kesehatan) juga telah memperoleh Akreditasi Unggul di tahun sebelumnya.

Suatu prestasi yang dicapai dengan kerja keras semua pihak. Proses re-akreditasi menjadi Unggul ini telah melibatkan banyak pihak baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan di tingkat universitas dan eksternal. Untuk itu, atas nama Fakultas Hukum dan Komunikasi, pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan yang sangat kami butuhkan dalam proses re-akreditasi ketiga program studi tersebut sehingga memperoleh peringkat akreditasi tertinggi dari BAN-PT yakni ‘UNGGUL’.

Tahun ini kita juga berbahagia, karena selesainya proses ‘pindahan’ fakultas dari Gd. Antonius ke Gd. Albertus, sehingga ada suasana baru yang segar yang semoga dapat memberikan spirit dan semangat baru untuk belajar, berkegiatan dan bekerja.

Telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kita meninggalkan suasana berkegiatan di rumah (wfh) karena wabah Pandemi Covid-19. Seluruh proses pembelajaran, baik perkuliahan, tugas, praktikum di laboratorium, bimbingan tugas akhir dan kegiatan lainnya, saat ini, sudah dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan tatap muka dengan kehadiran segenap civitas akademika di Kampus. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pandemi Covid-19 juga telah mengajarkan kita banyak hal, termasuk perubahan cara belajar, berkegiatan, dan bekerja, yang tadinya hanya secara tatap muka di Kampus, namun sekarang dapat diselenggarakan secara daring dengan menggunakan berbagai platform digital.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi terkait dengan banyak sekali aspek, termasuk informasi, maka Buku Pedoman Fakultas Hukum dan Komunikasi ini diterbitkan sebagai suatu acuan yang dapat digunakan baik oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan berbagai kegiatan, terutama kegiatan dan proses belajar-mengajar.

Buku ini berisi visi-misi universitas, fakultas dan program studi, profil atau data dosen dan tenaga kependidikan fakultas, struktur kurikulum dan pembelajaran, serta informasi lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di program studi. Buku panduan ini juga memberikan informasi berbagai aturan, kebijakan akademik yang diterbitkan di lingkungan universitas, fakultas dan program studi yang dibuat agar mahasiswa semakin memahami proses pembelajaran dan dapat menjalani proses ini dengan lancar serta menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang menggembirakan.

Buku Pedoman Fakultas juga memberikan informasi mengenai proses pembelajaran di Program Studi Magister Hukum Kesehatan (S-2), setelah pada tahun-tahun sebelumnya, Program Studi Magister membuat Buku Pedoman tersendiri. Dengan kehadiran informasi dari Program Studi Magister Hukum Kesehatan, maka mahasiswa Program Studi tingkat Sarjana (S-1) juga dapat mempelajari informasi proses pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi Magister Hukum Kesehatan ini untuk kemudian, jika telah lulus, dapat ikut melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Pedoman ini, atas nama fakultas, kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Buku Pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dan semoga Tuhan senantiasa memberkati semua upaya, kerja, dan usaha baik kita bersama.

Semarang, Medio Agustus 2024

Dekan,

Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum

DAFTAR ISI

<i>Foto Mgr. Soegijapranata, SJ.</i>	<i>vi</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>vii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ix</i>
BAB I INFORMASI UMUM FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI	1
<i>Visi, Misi dan Tujuan</i>	<i>2</i>
<i>Struktur Organisasi</i>	<i>3</i>
<i>Penyelenggaraan Pendidikan</i>	<i>15</i>
<i>Kemahasiswaan dan Alumni</i>	<i>22</i>
BAB II INFORMASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	27
<i>Visi, Misi dan Tujuan</i>	<i>27</i>
<i>Standart Kompetensi Lulusan, Lulusan</i>	<i>30</i>
<i>Prospek Lulusan, Profil Lulusan</i>	<i>32</i>
<i>Deskripsi Program Studi</i>	<i>33</i>
<i>Perumusan Profil Lulusan dan Deskripsi Profil</i>	<i>34</i>
<i>Capaian Pembelajaran</i>	<i>36</i>
<i>Kurikulum</i>	<i>48</i>
<i>Unit-Unit Pendukung</i>	<i>75</i>
<i>Laboratorium Hukum</i>	<i>76</i>
<i>Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum</i>	<i>77</i>
<i>Prosedur dan Proses Bimbingan Skripsi</i>	<i>80</i>
BAB III INFORMASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI	87
<i>Visi, Misi dan Tujuan</i>	<i>88</i>
<i>Evaluasi Kurikulum</i>	<i>88</i>
<i>Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum</i>	<i>89</i>
<i>Capaian Pembelajaran Lulusan</i>	<i>91</i>
<i>Alur Kurikulum 2018</i>	<i>96</i>
<i>Alur Kurikulum 2023</i>	<i>97</i>
<i>Rencana Pembelajaran Semester</i>	<i>98</i>
<i>Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum</i>	<i>98</i>

<i>Penutup</i>	98
<i>Pedoman Konversi Mata Kuliah (Kurikulum 2018 ke kurikulum 2023)</i>	99
<i>Aturan Konversi Nilai Mata Kuliah</i>	99
<i>Distribusi Mata Kuliah Per Semester</i>	(lampiran hal terakhir)
<i>Form Konversi Mata Kuliah Kurikulum Lama (2018) Ke Mata Kuliah Kurikulum Baru (2023)</i>	(lampiran hal terakhir)
<i>Pembagian Mata Kuliah Tiap Semester (Kurikulum 2023)</i>	107
<i>Diskripsi Mata Kuliah</i>	114
BAB IV INFORMASI UMUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	129
<i>Sejarah Singkat</i>	129
<i>Pengelolaan Program Studi</i>	130
<i>Matakuliah Wajib</i>	134

BAB I

INFORMASI UMUM FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, didirikan pada tahun 1982. Pada awal didirikan, Fakultas ini memiliki 1 (satu) program studi yakni Program Studi Ilmu Hukum (S-1). Pada Reakreditasi Ban-BT tahun 2009, sesuai Keputusan BAN-PT tanggal 14 Maret 2009 Nomor 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009, Program Studi Ilmu Hukum mencapai peringkat “A”. Peringkat “A” tersebut dapat dipertahankan dalam Reakreditasi tahun 2019 berdasarkan SK BAN-PT Nomor 3966/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024. Saat ini Program Studi Ilmu Hukum telah terakreditasi oleh BANPT dengan peringkat “Akreditasi UNGGUL” sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 3725/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/IV/2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.

Pada tahun 2013 izin operasional dari Pemerintah untuk Program Studi Ilmu Komunikasi (S-1) terbit dan oleh universitas program studi ini diputuskan untuk dikelola oleh Fakultas Hukum. Pada saat itu nama Fakultas kemudian diubah menjadi Fakultas Hukum dan Komunikasi berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0138/G/SK.Rek/III/2013 tentang Perubahan Nama Fakultas Hukum menjadi Fakultas Hukum dan Komunikasi pada tanggal 27 Maret 2013. Sejak itu Fakultas mengelola dua

program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Ilmu Komunikasi yang juga telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat “Akreditasi UNGGUL” sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 728/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2029.

Sejalan dengan perkembangan, pada akhir tahun 2017 oleh Universitas berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 068/G.10/SK-Rek/XI/2017 Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan (S-2) (selanjutnya disebut Program Studi Magister Hukum Kesehatan), yang sebelumnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana diputuskan untuk dikelola oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi. Sejak saat itu, Fakultas Hukum dan Komunikasi kemudian mengelola 3 (tiga) program studi yakni Program Studi Ilmu Hukum (S-1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S-1), dan Program Magister Hukum Kesehatan (S-2). Adapun Program Studi Magister Hukum Kesehatan juga telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat “Akreditasi UNGGUL” sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 1501/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2023 yang berlaku sampai tanggal 18 April 2028.

VISI, MISI, TUJUAN

A. Visi

Menjadi fakultas berdaya saing internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan, humanis, dan cinta tanah air.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, humanis, dan cinta tanah air;
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil;
3. Mengembangkan sistem kepemimpinan operasional, organisasional dan kepemimpinan publik yang dilandasi spiritualitas kepemimpinan kristiani sebagai pelayan (servant), gembala (shepherd), pengurus (steward);
4. Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang melampaui standar pendidikan tinggi;
5. Mengembangkan kerja sama, dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional.

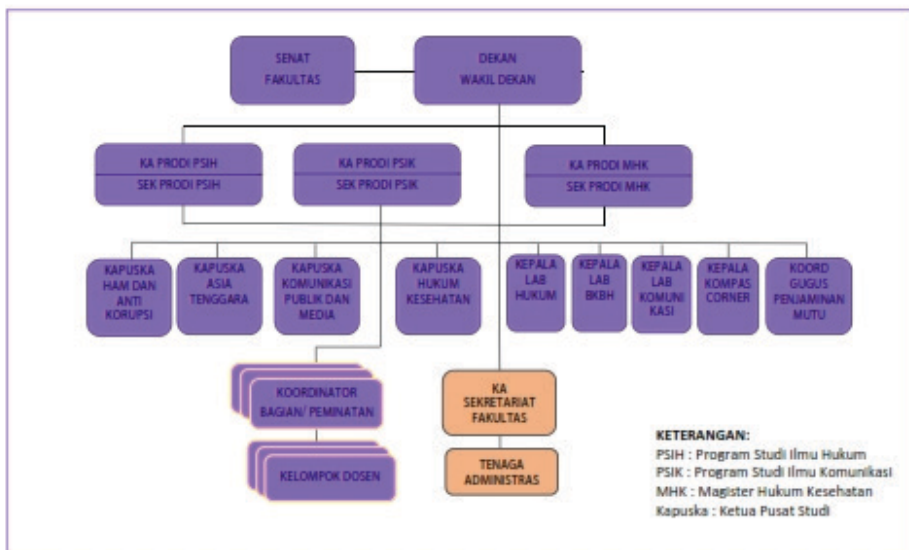
C. TUJUAN

Berdasarkan misi di atas, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik

Soegijapranata bertujuan untuk:

1. Mewujudkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, humanis dan cinta tanah air;
2. Mewujudkan tata pamong dan tata kelola fakultas yang baik guna meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, humanis dan berdaya saing internasional.
4. Mewujudkan jaringan kerja sama dan kemitraan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mewujudkan program studi yang mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berdaya saing internasional.
6. Memperoleh akreditasi unggul untuk seluruh program studi.

STRUKTUR ORGANISASI



Senat Fakultas :

Ketua	Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum.
Sekretaris	Dr. Eko Nurmardiansyah, SH.,M.Hum.

Anggota	1. Drs. St. Hardiyarso, M.Hum.
	2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.
	3. Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi, S.I.Kom.,MA.
	4. Prof. Rika Saraswati, SH.CN., M. Hum, Ph.D.
	5. Fidelis Aggiornamento Saintio, S.Fil.,M.I.Kom.
	6. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH.
	7. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.
	8. Dr. A. Joko Purwoko, SH.,M.Hum.
	9. Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.
	10. Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.
	11. Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA.
	12. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum.
	13. B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom.

PIMPINAN FAKULTAS :

Dekan	Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum.
Wakil Dekan Inovasi, Riset dan Pengembangan Sumber Daya	Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.
Wakil Dekan Akademik, Akreditasi dan Penjaminan Mutu	Drs. St. Hardiyarso, M.Hum.
Wakil Dekan Promosi, Kemahasiswaan dan Alumni(Pjs)	Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi, S.I.Kom.,MA.

PIMPINAN PROGRAM STUDI

Program studi adalah unsur pelaksana fakultas dalam bidang studi tertentu yang secara struktural pengelolaannya berada di bawah koordinasi Dekan.

Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan dalam tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program studi.

Di bawah Program studi terdapat kelompok Pengajar dan Laboratorium.

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Ka. Progdil Ilmu Hukum	Prof. Rika Saraswati SH.,CN.,M.Hum.,PhD
Sek. Progdil Ilmu Hukum (Pjs)	Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.

KETUA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Ka. Progdil Ilmu Komunikasi (Pjs)	Fidelis Aggiornamento Saintio, S.Fil.,M.I.Kom.
Sek. Progdil Ilmu Komunikasi(Pjs).	Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA..

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Prodi Magister Hukum Kesehatan	Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.
Sek. Prodi Magister Hukum	Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.

PEJABAT FAKULTAS NON STRUKTURAL

1. KETUA PUSAT KAJIAN

Ka. Puska HAM dan Anti Korupsi	P. Donny Danardono, SH.,Mag.Hum.
Ka. Puska Asia Tenggara	B. Danang Setianto, SH.,LLM.,MIL.,Ph.D.
Ka. Puska Komunikasi Publik dan Media	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.
Ka. Puska Pancasila dan Konstitusi	

2. KETUA LABORATORIUM DAN KEPALA BIRO

Ka. Laboratorium Hukum	Emanuel Boputra, SH.,MH.
Ka. Lab. Jurnalisme dan Industri Media	Cecilia Pretty Grafiani, S.I.Kom.m.i.Kom.
Ka. Lab. Komunikasi Publik dan Strategis	Samantha Elisabeth Claudya, S.I.Kom.,M.I.Kom.,CPS.
Ka. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum	Yovita Indrayati, SH.,M.Hum.
Ka. Kompas Corner	Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A.

3. KOORDINATOR BAGIAN PRODI ILMU HUKUM

Bagian Dasar dan Metode Ilmu Hukum	P. Donny Danardono, SH., Mag.Hum.
Bagian Keperdataan	Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.

Bagian Kepidanaan	Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.
Bagian Kehidupan Kenegaraan	Yovita Indrayati, S.H., M.Hum

4. KOORDINATOR PEMINATAN PRODI ILMU KOMUNIKASI

Bidang Kajian Komunikasi Dasar dan Metodologi	
Bidang Kajian Media Kreatif	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.
Bidang Kajian Komunikasi Publik dan Strategis	Drs. St. Hardiyarso, M.Hum.

5. KOORDINATOR KEGIATAN

Koord. Penelitian & Pengabdian	I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, SH.,M. Kn.
Koord. Gugus Penjaminan Mutu	B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom.

6. PENDAMPING UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BIDANG	NAMA UKM	DOSEN PENDAMPING
Minat Bakat	UKM Locomuse	Fidelis Aggiornamento S., S.Fil.,M.I.Kom.
	UKM Basket	Yoshua Putra Dinata Naiborhu, SH.,M.Kn.
	UKM Futsal	Emanuel Boputra, SH.,MH.
	UKM Mahupa	Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA.
	UKM Badminton	Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH.
	UKM Komunitas Film Mahasiswa Ilmu Hukum dan Ilmu Komunikasi (KOFIMILK)	Donny Danardono, S.H., Mag. Hum.
	UKM Dance/Lawtion	B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom.

I. DOSEN, DOSEN WALI DAN STAF ADMINISTRASI

1. Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA	RIWAYAT PENDIDIKAN	JABATAN AKADEMIK	KOMPETENSI / RESEARCH AREA	ALAMAT
1	Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. NPP: 058.1.1984.0006	S1: Universitas Diponegoro S2: Universitas Indonesia S3: Unika Parahyangan	Lektor Kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Administrasi Negara • Hukum Kesehatan 	Jl. Karangrejo RT 02/ RW II Semarang Telp. 8442639
2	Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H. NPP: 058.1.1988.035	S1: Unika Soegijapranata S2: Universitas Gadjah Mada S3: Universitas Diponegoro	Lektor Kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Dagang • HKI • Hukum Asuransi • Kepailitan • Kebijakan Investasi 	Jl. Candi Mutiara Slt 582 Semarang Telp. 085712066801
3	P. Donny Danardono, S.H., Mag. Hum. NPP: 058.1.1990.070	S1: Universitas Brawijaya S2: STF Driyarkara <i>Sedang studi lanjut S3 di Radboud University Nijmegen</i>	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Filsafat Hukum • Hukum dan Jender 	Jl. Kaliwiru IV/21 Smg Telp. 8440369 081215250761
4	Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. NPP: 058.1.1990.081	S1: Universitas Gadjah Mada S2: Universitas Gadjah Mada S3: Universitas Gadjah Mada	Lektor kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata • Hukum Perdata Internasional • Penyelesaian Sengketa Alternatif 	Jl. Mars I/D-17 Jangli Permai Semarang Telp.8449138 08122506310
5	Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H. NPP: 058.1.1991.099	S1: Unika Soegijapranata S2: Universitas Diponegoro	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Dagang • Perbankan • Pengangkutan • Hukum dan Alih Teknologi 	Jl. Candi Permata Raya 1042 B Smg Telp. 7611571 08157684599
6	Benediktus Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL. NPP: 058.1.1992.106	S1: Universitas Diponegoro S2: Monash University, S3: Radboud University Nijmegen	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Internasional • Hukum perdagangan Internasional • Hukum perjanjian internasional • Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional • HAM Internasional • Hk. Lingkungan Internasional 	Permata Semeru B19B Semarang Telp. 8500254 08122828275

NO	NAMA	RIWAYAT PENDIDIKAN	JABATAN AKADEMIK	KOMPETENSI / RESEARCH AREA	ALAMAT
7	Prof. Rika Saraswati, S.H., C.N.,M. Hum., Ph.D. NPP: 058.1.1992.120	S1: Universitas Gadjah Mada Sp1: Universitas Diponegoro S2: Universitas Gadjah Mada S3: Wollongong University New South Wales, Australia	Guru Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata • Hukum Adat • Hukum dan Jender • Hukum Perlindungan Anak 	Jl. Karangrejo Selatan RT 4 / RW 8 No.35 Semarang Telp. 08112718655
8	Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum. NPP: 058.1.1993.138	S1: Universitas Diponegoro S2: Unika Parahyangan S3 : Universitas Diponegoro	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Keperdataan • Hukum Perlindungan • Konsumen Electronic Commerce • (E-Commerce) Hukum Persaingan • Usaha 	Taman Setiabudi C - 8 Banyumanik Smg Telp. 7463758 08122540632
9	Dr. Hotmauli Sidabalok , SH.,CN.,MH. NPP: 058.1.1993.148	S1: Universitas Negeri Surakarta Sp1: Universitas Diponegoro S2: Universitas Indonesia S3 : Radboud University Nijmegen	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Pajak • Politik Hukum • Hukum Lingkungan • Hukum Perburuhan • Hukum Agraria 	Jl. Gombel Permai III No. 159 Smg Telp. 7472615
10	Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. NPP: 058.1.1994.161	S1: Universitas Diponegoro Sp1: Universitas Diponegoro S2: Universitas Diponegoro S3: Universitas Diponegoro	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/Politik Hk. Pidana • Hukum Pidana • Hukum Acara Pidana • Hukum Pidana Internasional • Pendidikan Anti Korupsi • Kriminologi • Penegakan Hk. Pidana • Hukum Pidana Anak • Isu Perempuan & Anak 	Jl. Taman Bukit Cemara No. 5 Bukit Sari Semarang Telp. 7461467 08156515763
11	Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. NPP: 058.1.1994.162	S1: Universitas Gadjah Mada S2: Universitas Gadjah Mada <i>Sedang studi Lanjut S3 di UGM</i>	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Lingkungan • Hukum Administrasi Negara • Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan ADR (Lingkungan) • Kebijakan Perburuhan 	Jl. Menoreh Tgh. VIII/53 Semarang Telp. 8317415 081904444161

NO	NAMA	RIWAYAT PENDIDIKAN	JABATAN AKADEMIK	KOMPETENSI / RESEARCH AREA	ALAMAT
12	Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum. NPP: 058.1.1995.172	S1: Universitas Gadjah Mada S2: Universitas Gadjah Mada S3: Universitas Gadjah Mada	Lektor Kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Internasional • Hukum Humaniter • Hukum Rg Angkasa & Udara • Organisasi Internasional 	Taman Sawunggaling D 11 Banyumanik, Semarang 081222783393
13	Emanuel Boputra, S.H., M.H. NPP: 058.1.1995.173	S1: Universitas Brawijaya S2: Universitas Diponegoro	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata Internasional • Hukum Perdata • Hukum Perkawinan • Hukum Jaminan • Hukum Perjanjian 	Jl. Karangrejo Tengah XII/11 Semarang
14	Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH. NPP: 058.1.2022.407	S1: Atma Jaya Yogyakarta S2: Universitas Gadjah Mada	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Pidana 	Gg. Flamboyan 491A Burikan Kudus
15	Dr. Eko Nurmardiansyah, SH.,M.Hum. NPP: 058.1.2022.413	S1 Ilmu Hukum – Universitas Katolik Parahyangan S2 Magister Ilmu Hukum – Universitas Katolik Parahyangan S3 Doktor Ilmu Hukum – Universitas Katolik Parahyangan	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Lingkungan • Hukum Administrasi Negara • Hukum Tata Ruang 	Padasuka Ideal Residence, Cluster E4 Nomor 8, RT/ RW: 003/021, Kel. Cimenyan, Kec.Cimenyan, Kabupaten Bandung.
16	Yoshua Putra Dinata Naiborhu, SH.,M.Kn. NPP. 058.1.12023.434	S1: Atma Jaya Yogyakarta S2: Universitas Gadjah Mada		<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata • Hukum Perjanjian • Hukum Waris • Hukum Kepailitan 	Jl. Candi Penataran Manyaran Semarang
17	I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, SH.,M.Kn.	S1: Atma Jaya Yogyakarta S2: Universitas Gadjah Mada	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Agraria • Hukum Perburuhan • Hukum Pajak 	Jl Karangrejo Semarang

2. Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi

NO	NAMA	RIWAYAT \ PENDIDIKAN	JABATAN AKADEMIK	KOMPETENSI / RESEARCH AREA	ALAMAT
1	Drs. ST. Hardiyarso, M.Hum. NPP: 058.1.1993.139	S1: IKIP Sanata Dharma S2: Universitas Gadjah Mada	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Filsafat • Etika • Religiositas 	Jl. Bukit Kelapa Hijau VI / Blok BD 1, Bukit Kencana Jaya, Semarang Telp. 08122906642
2	Rotumiar Pasaribu, S.S., M.I.Kom. NPP: 058.1.2014.294	S1: Unika Soegijapranata S2: Universitas Negeri Surakarta	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Massa • Periklanan • Strategi Komunikasi 	Pondok Majapajit II Blok B No.28 Mranggen Demak 081328290980
3	Drs. Adreas Pandiangan, M.Si. NPP: 058.1.2015.302	S1 : Universitas Gadjah Mada S2 : Universitas Gadjah Mada	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Ilmu Politik • Sistem Politik Indonesia • Komunikasi Masyarakat 	Jl. Jatingaleh III/138, Semarang
4	Vincentia Ananda Arum P., S.I.Kom., M.I.Kom. NPP: 058.1.2015.299	S1: Universitas Jenderal Soedirman S2: Universitas Sebelas Maret	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Ilmu Komunikasi • Teori Komunikasi • Dasar - dasar Jurnalistik • Komunikasi Massa • Komunikasi Antar Budaya • Komunifikasi Kelompok 	Jl. Rajawali Gg. Kenari Rt. 05/VII Kel. Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah 53132, 083863333202
5	Abraham Wahyu Nugroho, S.I.Kom., M.A. NPP: 058.1.2016.305	S1: Universitas Negeri Surakarta S2: Universitas Gadjah Mada	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Organisasi • PR Manajemen • Riset Komunikasi Strategi 	Perum Citra Asri 2 Leyangan Ungaran Timur, Kab. Semarang
6	Adrianus Bintang Hanto Nugroho., SE., MA. NPP: 058.1.2017.312	S1 : Universitas Gadjah Mada S2 : Universitas Gadjah Mada	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Riset Studi Keamanan Internasional • Riset Studi Perdamaian 	Jl. Arya Mukti Tengah No. 165 Semarang Telp. 08892407931
7	B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom. NPP : 058.1.2021.392	S1: Universitas Stikubank S2: Universitas Diponegoro	-	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Organisasi • Komunikasi Bisnis 	Jl. Lempuyang II No 502 Perum Korpri Sambiroto Semarang 50276

NO	NAMA	RIWAYAT \ PENDIDIKAN	JABATAN AKADEMIK	KOMPETENSI / RESEARCH AREA	ALAMAT
8	Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi, S.I.Kom., M.A NPP. 058.1.2022.411	S1: Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta S2: Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada	-	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Komunikasi • Manajemen Public Relations • Komunikasi Lingkungan • Komunikasi Pariwisata 	Villa Krista Mansion B 1, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang
9	Fidelis Aggionamento Sainio, S.Fil., M.I.Kom NPP. 058.1.2022.412	S1 - Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang S2 - Universitas Brawijaya, Malang	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran Digital • Komunikasi Media & Politik • Komunikasi & Pancasila • Hermeneutika 	Villa Krista Mansion B 1, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang
10	Cecilia Pretty Grafiani, S.I.Kom.,M.I.Kom	S1 : Public Relations, Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta S2 : Komunikasi Publik, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma		<ul style="list-style-type: none"> • Marketing Communication • Sustainability Communication • Ekologi Media dan Budaya Populer • Marketing Public Relations 	Jl. Borobudur Utara XVI no 6. RT 07 RW 3, Manyaran, Semarang Barat - Jawa Tengah 50147
11	Samantha Elisabeth Claudya,S.I.Kom., M.I.Kom.,CPS.	S1 : Public Relations, Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta S2 : Komunikasi Publik, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta		<ul style="list-style-type: none"> • Public Relation • PR Digital • Teori Komunikasi • Marketing Communication Komunikasi Organisasi • Komunikasi Interpersonal 	Jl. Mergangsan Lor, MG II No. 1067, Wirogunan Mergangsan , Kota Yogyakarta
12	Elizabeth Florence Warikar, S.I.Kom., M.I.Kom.	S1 : Universitas Atma Jaya Yogyakarta S2: Universitas Atma Jaya Yogyakarta		<ul style="list-style-type: none"> • Ekosistem Media Massa Digital • Jurnalisme • Ekonomi Politik Komunikasi • Komunikasi Massa 	Jl. Bulusan Semarang
13	Paulus Angre Edvra, S.I.Kom.,M.I.Kom	S1 - Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta S2 - Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada		<ul style="list-style-type: none"> • kajian media • riset media • teori komunikasi • teknologi komunikasi informasi 	Badran JT1/1068 RT 054 RW 012 Yogyakarta 55231

3. Dosen Tidak Tetap

NO	NAMA	MATA KULIAH
1.	PJ. Soepratignja, SH.,Sp.N.	Hukum Jaminan, MTA, Hukum Agraria
2.	Edmandus Hari Pawarta, S.Pd., M.Pd.	Hukum Agraria
3.	Drs. DP. Budi Susetyo, M.Si.	Teknik Pendampingan Klien (PLKH)
4.	Drs. Ign. Dadut Setiadi, M.M.	Manajemen Organisasi
5.	Rikarda Ratih Saptastuti, S.Sos.,M.I.Kom.	Desain Komunikasi Visual, Komunikasi Kreatif dan Inovatif
6.	Irene Syebatia Bumi, M.I.Kom.	MPKH
7.	Ir. Maksimianus Djurianto Prabowo	Dokumentasi Media
8.	Nara Patrianila, S.IP.	Penulisan Skenario
9.	Fika Permata Mustikasari, S.Pd.,MA.	Bahasa Mandarin

4. Dosen Wali

a. Program Studi Ilmu Hukum

ANGKATAN	NAMA	NIM
2017	Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.	17.C1.0001-17.C1.0035
	Emanuel Boputra, SH., MH.	17.C1.0036-17.C1.0066
	Dr. Hotmauli Sidabalok , SH.,CN.,MH.	17.C1.0067-17.C1.0107
	Donny Danardono, SH., Mag. Hum.	17.C1.0108-17.C1.0131
	Benediktus D. Setianto, S.H., LL.M., MIL.	17.C1.0132-17.C1.0151
	Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H	17.C1.0152-17.C1.0175
2018	Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.	18.C1.0001-18.C1.0082
	Prof. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.	18.C1.0083-18.C1.0122
		18.C1.0123-18.C1.0146
		20.C1.0080-20.C1.0139
2019	Yovita Indrayati, S.H., M.Hum.	19.C1.0001-19.C1.0046
	Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum.	19.C1.0047-19.C1.0089
	Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum,	19.C1.0090-19.C1.0125
	Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.	19.C1.0126-19.C1.0161

ANGKATAN	NAMA	NIM
2020	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.	20.C1.0001-20.C1.0142
	Benediktus D. Setianto, S.H., LLM., MIL.	20.C1.0037-20.C1.0079
		20.C1.0080-20.C1.0139
2021	Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.	21.C1.0001 – 21.C1.0090
	Ign. Hartyo Purwanto, SH.M.Hum	21.C1.0091-21.C1.0128
2022	P. Donny Danardono, SH., Mag. Hum.	22.C1.0041 – 22.C1.0080
	Dr. Eko Nurmardiansyah, SH.,M.Hum.	22.C1.0081-22.C1.0120
	Dr. Hotmauli Sidabalok , SH.,CN.,MH.	22.C1.0001 – 22.C1.0040
2023	Yoshua Putra Dinata N., SH.,M.Kn.	23.C1.0001-23.C1.0070
	Yovita Indrayati, S.H., M.Hum.	23.C1.0071-23.C1.0111
		23.C1.0155;23.C1.0157
	Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum.	23.C1.0112-23.C1.0152
	P. Donny Danardono, SH., Mag. Hum.	23.C1.0147. 23.C1.0153,
23.C1.0154,23.C1.0156		
2024	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.	24.C1.0001 – 24.C1.0046
	I Gusti Nyoman Winardi, SH.MKn	24.C1.0047 – 24.C1.0088
	Dr. A. Joko Purwoko, SH.M.Hum	24.C1.0089 – 24.C1.0129
	B. Danang Setianto, SH.LLM.MIL, PhD	24.C1.0130 – 24.C1.0162

b. Program Studi Ilmu Komunikasi

ANGKATAN	NAMA	NIM
2017	Adrianus Bintang Hanto Nugroho., SE., MA.	17.M1.0014 – 17.M1.0037
2018	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.	18.M1.0010 – 18.M1.0088
	Adrianus Bintang Hanto Nugroho., SE.,MA.	18.M1.0090 – 18.M1.0134
	Drs. St. Hardiyarso, M.Hum.	18.M1.0052 – 18.M1.0161
2019	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.	19.M1.0001-19.M1.0066
	Adrianus Bintang Hanto N, SE.,MA.	19.M1.0087-19.M1.0101
2020	Adrianus Bintang Hanto Nugroho., SE.,MA.	20.M1.0001-20.M1.0050
	B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom.	20.M1.0024-20.M1.0050
	Drs. St. Hardiyarso, M.Hum.	20.M1.0052-20.M1.0091
	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si	20.M1.0081-20.M1.0118

ANGKATAN	NAMA	NIM
2021	Drs. St. Hardiyarso, M.Hum	21.M1.0063 -21.M1.0097
	B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom.	21.M1.0001-21.M1.0050
	Fidelis Aggiornamento Saincio, S.Fil., M.I.Kom	21.M1.0051-21.M1.0062
	Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi, S.I.Kom.,MA.	21.M1.0086-21.M1.0114
2022	Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi, S.I.Kom.,MA.	22.M1.0001-22.M1.0063
	Fidelis Aggiornamento Saincio, S.Fil., M.I.Kom.	22.M1.0064 – 22.M1.0140
	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.	22.M1.0132
2023	Cecilia Pretty Grafiani, S.I.Kom.,M.I.Kom.	23.M1.0001-24.MI.0064
	Samantha Elisabeth Claudya, S.I.Kom.,M.I.Kom.,CPS.	23.M1.0065-23.M1.0127
2024	Elizabeth Florence Warikar, S.I.Kom.,M.I.Kom.	24.M1.0001 – 24.M1.0065
	Paulus Angre Edvra, S.I.Kom.,MA.	24.M1.0066 - 24.M1.0126

5. Tenaga Kependidikan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Sri Puji Handayani, S.M.	Kepala Kesekretariatan	Jl. Tampomas Selatan III / 14 Semarang
2	Agnesia Karlina, SH	Staf Bagian Skripsi dan Laboratorium Hukum	Jl. Tinjomoyo No 02, Bendan Dhuwur Semarang
3	Agus Sriyana	Staf Bagian Pengajaram Perkuliahan Ilmu Hukum	Griya Dempel Baru Jl Mutiara 4 / 217 Muktiharjo Kidul Semarang
4	L. Yeni Kustrisyaningsih	Staf Bagian Pengajaram Perkuliahan Ilmu Komunikasi	Jl. Gaharu Barat Dalam No. 143 Banyumanik
5	Yatiman	Bagian Rumah Tangga	Selorejo Rt 03/ Rw 05 No. 13 Bendan Dhuwur Semarang

a. Sistem Kredit Semester

- 1) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan di dalam satuan waktu semester.
- 2) Sistem Kredit Semester bertujuan memberi kemungkinan untuk menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan kemungkinan lebih kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam jenjang profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.
- 3) Satuan kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta usaha penyelenggaraan pendidikan bagi Perguruan Tinggi khususnya bagi pengajar.
- 4) Mata kuliah adalah kuliah-kuliah yang diberikan dalam rangka pendidikan mahasiswa yang berupa kuliah, praktikum atau tugas-tugas akademis lainnya.
- 5) Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah :
 - a) Nilai kredit semester perkuliahan untuk mahasiswa satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan tiga kegiatan perminggu :
 - 60 menit tatap muka terjadwal
 - 60 menit kegiatan akademik mahasiswa terstruktur
 - 60 menit pengembangan materi kuliah.
 - b) Satu SKS untuk penelitian hukum dalam Penulisan Hukum adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dan satu bulan mana dianggap setaraf dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.
 - c) Satu SKS untuk penelitian di Laboratorium adalah nilai dari beban tugas di laboratorium sebanyak 2 sampai dengan 3 jam per minggu selama 1 semester.
- 6) Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester, yaitu :
 - a) Beban Studi Kumulatif tiap mahasiswa untuk menyelesaikan studinya minimal 146 SKS yang harus diselesaikan dalam 8 semester dengan kemungkinan perpanjangan maksimal sampai dengan 14 semester.
 - b) Beban Studi Tiap Semester, yaitu jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu semester, yang besarnya ditentukan atas dasar :
 - Rata rata waktu kerja sehari yang dapat disediakan.
 - Kemampuan individu mahasiswa yang ditetapkan atas dasar tingkat keberhasilan studi pada semester yang lalu yang dinyatakan dengan Indeks prestasi (IP) semester, yaitu:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi Maks.
3,00 - 4.00	24 SKS
2,00 – 2,99	21 SKS
0,00 - 1,99	18 SKS

b. Pengisian KRS

Untuk dapat terdaftar sebagai peserta perkuliahan, mahasiswa harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membayar Uang Kuliah Pokok pada Bank yang telah ditunjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan universitas.
- 2) Dengan dibimbing oleh Dosen Wali, mahasiswa menyusun rencana pengambilan mata kuliah/rencana program studi untuk semester yang berjalan dengan berpedoman pada IP semester yang lalu dan mata kuliah yang ditawarkan. Berdasarkan Formulir KRS tersebut, mahasiswa melakukan pendaftaran matakuliah secara “On-Line” dengan cara meng-input ke dalam komputer sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas.
- 3) Pada prinsipnya pengambilan mata kuliah dilaksanakan dengan berpedoman pada:

a) Asas Kebebasan.

Dalam sistem kredit semester yang berlaku pada Fakultas Hukum Dalam sistem kredit semester yang berlaku pada Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, pada dasarnya memberikan kepada para mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah (atau kegiatan terjadwal lain) yang akan ditempuh dari antara matakuliah (atau kegiatan terjadwal lain) yang ditawarkan Fakultas pada tiap semester yang berjalan. Demikian terutama mengingat pengakuan atas adanya perbedaan tentang besarnya beban studi para mahasiswa pada tiap semester.

b) Pembatas asas kebebasan.

Selain karena besarnya IP, kebebasan pengambilan matakuliah (atau kegiatan terjadwal lain) juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Matakuliah asas hukum:
harus diambil/ditempuh lebih dahulu dari pengambilam mata kuliah hukum yang bersangkutan;
- (2) Matakuliah prasyarat /cosyarat :
harus diambil/ditempuh lebih dahulu atau bersamaan dengan pengambilan matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah cosyarat tersebut;
- (3) Kuliah Kerja Nyata (KKN) / Kuliah Kerja Usaha (KKU)/KAPKI
mahasiswa berhak menempuh matakuliah KKN atau KKU apabila telah lulus minimal 100 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00;

(4) Skripsi :

Skripsi baru boleh diambil setelah mahasiswa yang bersangkutan mengumpulkan kredit serendah-rendahnya 104 SKS matakuliah wajib dan 22 SKS matakuliah pilihan dengan IP Kumulatif tidak kurang dari 2,50.

c. Kegiatan Perkuliahan

- 1) Satu tahun akademik dibagi dalam dua semester; semester pertama (gasal) berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari, dan semester kedua (genap) berlangsung dari bulan Pebruari sampai dengan Bulan Juli.
- 2) Kegiatan Akademik tiap semester terdiri atas :
 - perkuliahan : 14 minggu,
 - ujian semester : 2 minggu.
- 3) Kegiatan perkuliahan terdiri dari :
 - a) Kuliah teori, yaitu perkuliahan yang sifatnya mengkaji dan menguasai teori konsep dan prinsip suatu bidang studi;
 - b) Responsi, yaitu: kegiatan akademik yang membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan teori;
 - c) Praktikum, yaitu : perkuliahan yang merupakan aplikasi teori dengan kondisi yang terbatas (laboratorium, kelas);
 - d) Seminar/diskusi, yaitu : pembahasan suatu topik permasalahan dengan forum pembicaraan dan pembahas dalam komunikasi dua arah;
 - e) Kuliah kerja lapangan, yaitu : kegiatan perkuliahan yang dilakukan di luar kelas dengan jalan melakukan pengamatan praktek di lapangan dan melaporkannya dalam laporan tertulis.
- 4). Kuliah Sisipan /Semester Pendek:

Kuliah sisipan diselenggarakan pada waktu antara semester gasal dan genap dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a) Semester sisipan diselenggarakan untuk matakuliah yang ditawarkan sesuai dengan keputusan rapat Program Studi;
 - b) Kuliah semester sisipan akan diselenggarakan apabila pesertanya minimal 20 mahasiswa;
 - c) Jumlah tatap muka dan komponen penilaian sesuai dengan ketentuan pada semester reguler;
 - d) Membayar uang semester sisipan sesuai dengan ketentuan universitas.

d. Tata Tertib Ujian

- 1) Peserta ujian adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata yang terdaftar sebagai peserta mata kuliah dan telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan administrasi mata kuliah;

- 2) Peserta ujian adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan hadir kuliah minimum 75% untuk matakuliah (atau kegiatan terjadual lain) yang bersangkutan;
- 3) Peserta ujian memasuki ruangan ujian setelah diijinkan oleh petugas/pengawas dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan;
- 4) Peserta **DIIZINKAN** memasuki ruangan dan mengikuti ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian berakhir.
- 5) Peserta ujian **WAJIB** :
 - a) Membawa alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis selama ujian berlangsung;
 - b) Menuliskan nama lengkap, NIM, nama mata kuliah, dan keterangan lainnya serta menandatangani kolom khusus di lembar jawaban yang disediakan;
 - c) Menandatangani daftar hadir yang diedarkan petugas/pengawas;
 - d) Meninggalkan Lembar Jawab di tempat duduk masing-masing, sebelum meninggalkan ruangan ujian.
- 6) Peserta ujian **DILARANG**:
 - a) Menyontek, menanyakan, atau berbicara dengan sesama peserta, meminjam buku/catatan ujian selama ujian berlangsung;
 - b) Merokok di dalam ruangan selama ujian berlangsung
 - c) Menggunakan alat komunikasi dan atau alat elektronik apapun pada waktu ujian berlangsung.
 - d) Membawa jaket, buku catatan maupun cetakan, atau barang lain ke tempat duduk untuk ujian yang bersifat *close book*, kecuali alat tulis yang diperlukan
 - e) Meninggalkan ruangan ujian sebelum ujian selesai tanpa seijin petugas / pengawas.
- 7) Jika terjadi **PELANGGARAN** terhadap butir-butir di atas, maka dikenai sanksi sebagai berikut :
 - 1) Teguran Lisan
 - 2) Ditulis dalam berita acara dan/atau dikeluarkan dari ruangan ujian.
- 8) Penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam angka 6 dan 7 tidak selalu berjenjang, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ujian.
- 9) Hasil ujian dinyatakan batal (gugur) apabila peserta ujian melakukan pelanggaran yang dicatat dalam Berita Acara Ujian dan/atau dikeluarkan dari ruang ujian.
- 10) Pada dasarnya Fakultas tidak menyelenggarakan ujian susulan, kecuali bagi mahasiswa yang mengajukan ijin secara tertulis dengan alasan:
 - sakit dengan disertai Surat Keterangan Dokter; atau
 - adanya anggota keluarga meninggal dunia.
 - melaksanakan tugas fakultas/ universitas.

Untuk dapat menempuh ujian susulan mahasiswa wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi yang diketahui oleh orang tua/ wali (dilampiri surat keterangan Dokter bagi yang sakit, paling lambat **tiga hari** setelah pelaksanaan ujian untuk matakuliah yang bersangkutan.

e. Evaluasi Keberhasilan Studi :

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan dengan cara mengadakan ujian, yaitu : kegiatan akademik yang terjadwal oleh Universitas/Fakultas dan wajib dilakukan untuk memperoleh ukuran yang dapat diandalkan mengenai keberhasilan proses belajar mengajar. Secara lebih rinci penyelenggaraan ujian dimaksudkan untuk :

- 1) Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan bahasan yang disajikan dalam kuliah;
- 2) Menilai apakah bahan kuliah yang disajikan sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
- 3) Apakah cara penyajian dosen sudah cukup baik.

Ujian dapat dilaksanakan secara tertulis atau lisan dalam bentuk pertanyaan, seminar, pemberian tugas, penulisan karangan, atau bentuk lain yang sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan instruksional khusus yang hendak dicapai.

Ujian terdiri dari :

- a) Ujian Tengah Semester (UTS).

Masa UTS dijadwalkan oleh Universitas dalam sebuah Kalender Akademik, atau setidaknya tidaknya disetujui oleh Pimpinan Universitas.

Ujian diselenggarakan sekurang kurangnya 2 (dua) bulan setelah masa perkuliahan berlangsung. Nilai hasil UTS diperhitungkan oleh dosen yang bersangkutan dalam menentukan nilai evaluasi studi mahasiswa pada akhir semester.

- b) Ujian Akhir Semester (UAS).

Pada Akhir tiap semester hanya diselenggarakan satu kali ujian untuk setiap matakuliah (atau kegiatan terjadwal lain).

Syarat Menempuh Ujian :

Mahasiswa yang berhak menempuh UAS atas matakuliah pada umumnya adalah :

-
- (1) Mereka yang terdaftar sebagai peserta mata kuliah dan telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan administrasi mata kuliah;
-
- (2) Mereka yang telah memenuhi persyaratan hadir kuliah, minimum 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk matakuliah (atau kegiatan terjadwal lain) yang bersangkutan;
-

F. Penilaian

Penilaian adalah proses pengukuran hasil belajar mahasiswa untuk : setiap mata kuliah; semester dan program studi. Nilai adalah ukuran ordinal yang menggambarkan hasil belajar mahasiswa. Yang berwenang untuk memberikan atau menetapkan nilai seorang mahasiswa adalah dosen penanggung jawab mata kuliah, dosen penguji dan/atau tim panitia penguji.

Nilai keberhasilan studi mahasiswa atas mata kuliah tertentu dinyatakan dengan huruf, yaitu :

Nilai	Predikat
A	Istimewa
AB	Sangat baik,
B	Baik
BC	Cukup baik
C	Cukup
CD	Kurang dari cukup
D	Kurang
E	Gagal

G. Evaluasi Semesteran

Sebagaimana telah disebutkan, keberhasilan studi mahasiswa tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Untuk menetapkan besarnya IP, maka lebih dahulu Nilai Huruf (NH) harus dirubah menjadi Nilai Bobot (NB), dengan kuantifikasi sebagai berikut :

Nilai Angka (NA)	Nilai Bobot (NB)
A	4
AB	3,5
B	3
BC	2,5
C	2
CD	1,5
D	1
E	0

baru sesudah itu dapat ditentukan besarnya IP.

Dalam Sistem Kredit Semester, besarnya IP ditentukan dengan rumus:

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{\Sigma K \times \text{NB}}{\Sigma K}$$

Keterangan :

- K : besar nilai “**Kredit**” dari masing-masing mata kuliah (atau kegiatan terjadwal lain) yang telah diambil mahasiswa.
- NB : besar “**Nilai Bobot**” dari masing-masing matakuliah (atau kegiatan terjadwal lain) yang telah ditempuh mahasiswa.

h. Evaluasi Tahunan.

Evaluasi keberhasilan studi tahunan dilakukan pada akhir semester 4, semester 6, semester 8 dan semester 10 sebagai berikut :

1) Evaluasi pada akhir semester 4.

Dalam empat semester pertama terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, mahasiswa harus sudah dapat mengumpulkan sekurang- kurangnya 48 SKS dengan IPK tidak kurang dari 2,00.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan mendapatkan **Peringatan I** dari Program Studi disertai dengan pemberitahuan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat terkena sanksi putus kuliah apabila nilai-nilai dan/atau IPK berikutnya tidak menjadi lebih baik.

2) Evaluasi pada akhir semester 6.

Dalam enam semester pertama terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, mahasiswa harus sudah dapat mengumpulkan sekurang kurangnya 72 SKS dengan IPK tidak kurang dari 2,00.

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan mendapat pemberitahuan dari Program Studi, bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan dapat terkena sanksi putus kuliah apabila nilai nilai maupun jumlah kredit dan/atau IPK berikutnya tidak bertambah.

3) Evaluasi pada akhir semester 8.

Pada akhir semester delapan, mahasiswa harus sudah dapat mengumpulkan sekurang kurangnya 96 SKS dengan IPK tidak kurang dari 2,00.

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan mendapat **Peringatan II** dari Program Studi disertai dengan pemberitahuan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat terkena sanksi putus kuliah apabila nilai-nilai dan/atau IPK berikutnya tidak menjadi lebih baik.

4) Evaluasi pada akhir semester 10.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa pada akhir semester ini adalah, bahwa mahasiswa paling sedikit harus telah mengumpulkan kredit sejumlah

120 SKS dengan IPK tidak kurang dari 2,00. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan mendapat pemberitahuan dari Fakultas, bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan dapat terkena sanksi putus kuliah apabila nilai nilai maupun jumlah kredit dan/atau IPK berikutnya tidak bertambah.

5) Evaluasi pada akhir semester 12

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa pada akhir semester ini adalah, bahwa mahasiswa paling sedikit harus telah mengumpulkan kredit sejumlah 144 SKS dengan IPK tidak kurang dari 2,00. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan mendapat **Peringatan III (Terakhir)** dari Program Studi disertai dengan pemberitahuan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya mempunyai sisa masa studi 2 (dua) semester. Apabila tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester 14 (empatbelas), maka mahasiswa yang bersangkutan terkena sanksi putus kuliah.

i. Penyelesaian Studi.

Untuk dapat dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, seorang mahasiswa diwajibkan sudah mengumpulkan kredit sejumlah minimal 146 SKS atau maksimal 160 SKS dengan IP Kumulatif minimal 2,00 ; nilai D maksimal 20 % dari seluruh SKS (29 SKS) ; serta tidak terdapat nilai E.

Predikat keberhasilan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata ditetapkan sebagai berikut :

IP Kumulatif	Predikat Kelulusan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian
2,76 – 3.50	Sangat Memuaskan
2,00 – 2,75	Memuaskan

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1) Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak mengikuti segala kegiatan baik akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Soegijapranata. Kegiatan tersebut meliputi:

- a) perkuliahan, mendapatkan dan mengerjakan tugas-tugas, mengikuti ujian dan segala kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;

- b) keorganisasian kemahasiswaan, pengembangan dalam bidang penalaran dan minat bakat pada unit-unit kegiatan kemahasiswaan; dan
 - c) mendapatkan kesejahteraan antara lain konseling psikologi, pendampingan kerohanian, beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan, dan informasi maupun bimbingan dalam rekrutmen bursa pekerjaan.
- 2) Kewajiban Mahasiswa
- Mahasiswa berkewajiban memenuhi semua persyaratan administrasi dan menaati serta menjalankan tata tertib yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

B. Organisasi Kemahasiswaan

Pembentukan, pengembangan, dan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) pada tingkat Fakultas didasarkan pada:

- 1) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 2) Pola Pengembangan Kemahasiswaan Direktorat Kelambagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional-Republik Indonesia 2006;
- 3) Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: 0275/C.8/Rek/X/2006 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan; dan
- 4) Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: 0274/C.9/Rek/X/2006 Tentang Pedoman Pendampingan Kemahasiswaan Universitas Katolik Soegijapranata.

Pengembangan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki *soft skills* di samping kemampuan akademik dalam kegiatan perkuliahan sehingga diharapkan para lulusan dari Universitas Katolik Soegijapranata siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang akan ditempuhnya kemudian.

Organisasi kemahasiswaan untuk periode 2018-2019 di Universitas Katolik Soegijapranata terdapat :

- 1) Senat Mahasiswa Universitas (SMU)
- 2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)
- 3) Unit Kegiatan Mahasiswa di Tingkat Universitas (UKM)
- 4) Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)
- 5) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
- 6) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF)
- 7) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Pada tingkat fakultas, di Fakultas Hukum periode 2019-2020 terdapat:

1) Senat Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi (SMFHK)

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat fakultas yang berfungsi sebagai:

- a) forum perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan aspek kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler; dan
- b) forum komunikasi antar pimpinan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.

Organisasi kemahasiswaan ini merupakan kelengkapan non struktural pada Fakultas Hukum dan Komunikasi yang bertugas menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan berdasarkan Program Kegiatan Fakultas Hukum dan Komunikasi.

Susunan kepengurusan SMFHK terdiri dari:

- a) Ketua;
- b) Sekretaris;
- c) Bendahara;
- d) Komisi Advokasi;
- e) Komisi Organisasi;
- f) Komisi Evaluasi Program;

2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi (BEMFHK)

Badan ini merupakan kelengkapan non struktural pada Fakultas Hukum. BEMFHK memiliki fungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, khususnya dalam lingkup bidang Hukum sesuai dengan Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan yang telah disusun oleh SMF. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang merupakan tugas BEMF ini diwujudkan dalam bentuk UKMF.

Susunan kepengurusan BEMFHK terdiri dari:

- a) Ketua;
- b) Wakil Ketua;
- c) Sekretaris;
- d) Bendahara;
- e) Seksi Kaderisasi
- f) Seksi Penalaran;
- g) Seksi Minat Bakat; dan
- h) Seksi Kesejahteraan.

3) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum (UKMFH)

Organisasi mahasiswa ini berfungsi untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam bidang penalaran dan minat bakat sesuai yang telah direncanakan oleh BEMFHK. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini setiap UKMFHK didampingi oleh Dosen Pendamping sesuai dengan kompetensi bidang yang dikembangkan masing-masing UKMFHK. Kegiatan UKMFHK dijalankan sesuai dengan pilihan para mahasiswa yang dilakukan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2018/2019 ini, kegiatan UKMF meliputi:

Bidang	Nama UKMFH	Dosen Pendamping
Minat Bakat	• UKM Locomuse	• Fidelis Aggiornamento Saintio, S.Fil.,M.I.Kom.
	• UKM Basket	• Yoshua Putra Dinata Naiborhu, SH.,M.Kn.
	• UKM Futsal	• Emanuel Boputra, SH.,MH.
	• UKM Mahupa	
Minat Bakat	• UKM Badminton	• Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH.
	• UKM Komunitas Film Mahasiswa	• Donny Danardono, S.H., Mag.Hum.
	• Ilmu Hukum dan Ilmu Komunikasi (KOFIMILK)	
	• UKM Dance/Lawtion	• B. Lenny Setyowati, SS.,M.I.Kom.

Kegiatan UKMFHK ini dipersiapkan pula untuk mengikuti dalam kegiatan pada tingkat regional, nasional, dan internasional sehingga berfungsi pula sebagai wahana pengembangan jaringan kemahasiswaan.

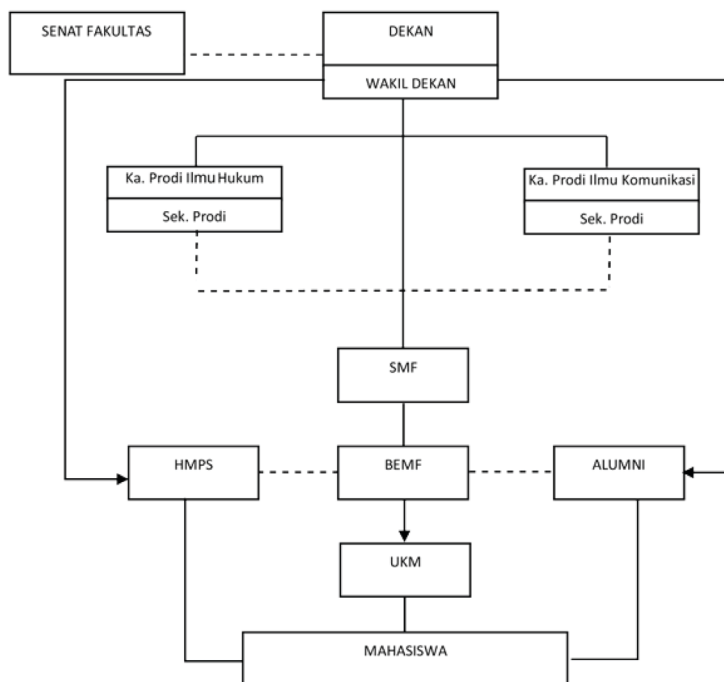
Untuk kegiatan UKM yang tidak diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi, maka mahasiswa mengikuti UKM pada tingkat Universitas, yaitu: UKM Basket, UKM Wanacaraka (Pecinta Alam), UKM Tenis, UKM Radio Soepa, UKM Futsal, UKM Gratia (Paduan Suara), UKM Sepak Bola (tergabung dalam UNIKA FC, anggota divisi II PSIS), UKM Bulutangkis, UKM Bridge, UKM Menwa, UKM Karate, UKM Fotografi Mirror, UKM Capoeira, UKM Seni, UKM Paraga (Jurnalistik), UKM

4) Satuan Kredit Kemahasiswaan (SKK)

Semua mahasiswa Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh universitas, fakultas, program studi ataupun organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum No. No. 01/C.1/PER.FH/XII/2010 yang telah diperbarui dengan Peraturan Fakultas Hukum dan Komunikasi No. 00629/B.9/PER.FHK/VIII/2018 Semua kegiatan yang diikuti mahasiswa akan diperhitungkan sebagai pencapaian SKK, di mana setiap mahasiswa berkewajiban mengumpulkan setidaknya 38 SKK. Seluruh bukti kegiatan tersebut harus disimpan oleh mahasiswa dan diperiksa kebenarannya oleh Sekretaris Program Studi sebelum mengikuti Ujian Skripsi. Selain itu, mahasiswa juga berkewajiban mengunggah bukti kegiatan tersebut dalam sintak mahasiswa yang akan diperhitungkan sebagai bukti Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

5) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Struktur Organisasi Kemahasiswaan



c. Alumni

Fakultas Hukum dan Komunikasi Univeritas Katolik Soegijapranata telah meluluskan Sarjana Hukum (S.H.) dan Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.) yang berkualitas dan kredibel. Mereka telah bekerja di berbagai lapangan pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta disamping menjadi pengacara, dosen, pegawai bank dan lain-lain. Pada saat ini telah terbentuk sebuah wadah Alumni Fakultas Hukum yang didasarkan pada SK Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Nomor: A.2.02/287/UKS.05/XI/1995 dan diberi nama IKAHUM.

Ikatan alumni ini mengadakan pertemuan rutin dan pertemuan ini diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi di samping forum tukar-menukar informasi, utamanya bagi kemungkinan lulusan baru dalam melihat dan menembus bursa kerja.

BAB II

INFORMASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

VISI DAN MISI

Program Studi Ilmu Hukum merupakan salah satu program studi pada Universitas Katolik Soegijapranata, yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1982 berdasarkan Keputusan Yayasan Sandjojo Nomor 175/YS/SK/VII/1981 jis. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah Nomor 59/K22/Kop/VII/1982 tanggal 5 Agustus 1982 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04000/0/1983 tertanggal 24 September 1983.

Pada tahun 1982, Fakultas Hukum berdiri berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sandjojo Nomor: 175/YS/SK/VII/1981. Status yang diperoleh saat itu adalah “Terdaftar” berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Nomor 659/K/22/Kop/1982.

Pada tahun 1989, Fakultas Hukum mendapat status “Diakui” berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 08/0/1989 tanggal 16 Desember 1989.

Pada tahun 1992, Fakultas Hukum mendapat status “Disamakan” berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Nomor: 41/Dikti/KEP/1993 tanggal 29 Januari 1993. Pada tahun 1997, Fakultas Hukum mendapat status “Terakreditasi” berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.78/D/0/1997.

Pada tahun 2003, berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 462/SKBAN-PT/Akred/S/XII/2014 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dinyatakan TERAKREDITASI dengan Peringkat A. Peringkat A ini tetap dipertahankan pada Akreditasi BAN-PT Tahun 2019, berdasarkan SK BAN-PT Nomor 3966/SK/BAN-PT/Akred/S/ X/2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.

Pada tanggal 16 April 2024 Program Studi Ilmu Hukum telah mendapatkan predikat “Akreditasi UNGGUL” berdasarkan SK BAN-PT Nomor 3725/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan menderivasi visi dan misi Fakultas, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata menetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

Visi

Menjadi Program Studi yang berdaya saing di Asia Tenggara dalam pengembangan ilmu hukum berdasarkan nilai-nilai Kristiani: keadilan, humanisme, dan cinta tanah air

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang hukum yang terencana dan bermutu dalam rangka pengembangan kepribadian secara utuh dengan memanfaatkan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian dan publikasi ilmiah di bidang hukum dengan memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan umat manusia.
3. Mengembangkan ilmu hukum dan hukum yang peduli terhadap isu lingkungan dan kelompok masyarakat marginal, terutama perempuan dan anak.
4. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengelola program studi berdasarkan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil, serta melaksanakan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Tujuan Pendidikan

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang:
 - a. Berdaya saing di Asia Tenggara

- b. Etis, profesional, berintegritas, disiplin, dan menguasai teknologi
 - c. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan
 - d. Menjunjung tinggi nilai keadilan, humanisme dan cinta tanah air
 - e. Memiliki semangat cinta kasih dengan memberi perhatian khusus terhadap lingkungan, kelompok masyarakat marginal, terutama perempuan dan anak.
 - f. Menguasai hukum nasional dan mengenal hukum asing
 - g. Menguasai dasar ilmiah dan kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum
 - h. Peka dan mampu menganalisis masalah hukum dan keadilan dalam masyarakat
 - i. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasarkan atas prinsip hukum.
 - j. Mampu menyampaikan pemikiran secara lisan maupun tertulis dengan baik
 - k. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengembangkan kompetensinya
2. Menghasilkan dan meningkatkan:
 - a. Penelitian dan kajian ilmiah yang berorientasi pada terciptanya keadilan, humanisme dan cinta tanah air;
 - b. Publikasi ilmiah yang dapat meningkatkan reputasi institusi, dosen dan mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri demi kesejahteraan umat manusia.
 3. Mewujudkan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kajian dan publikasi ilmiah ilmu hukum dan hukum yang peduli terhadap isu lingkungan dan kelompok masyarakat marginal, terutama perempuan dan anak.
 4. Mewujudkan kerja sama dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan umat manusia.
 5. Mewujudkan tata kelola Program Studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
 6. Mewujudkan program studi yang unggul melalui sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Lulusan Program Studi Hukum Unika Soegijapranata memiliki :

- a. Sikap etis, profesional, jujur, disiplin, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta memiliki semangat cinta kasih dengan memberi perhatian khusus terhadap lingkungan, kelompok masyarakat terdosis, terutama perempuan dan anak-anak.
- b. Kemampuan untuk menguasai serta mengembangkan hukum dan ilmu hukum.
- c. Ketramampilan menggunakan hukum sebagai sarana untuk menganalisa dan memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan prinsip hukum, baik sendiri maupun dalam tim.

LULUSAN

A. PROSPEK LULUSAN

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum memiliki prospek yang baik karena dapat memasuki hampir semua bidang pekerjaan, baik sebagai praktisi (profesional) di bidang hukum seperti hakim, jaksa, advokat, kurator, notaris, maupun bekerja di berbagai kantor/ instansi/ lembaga/perusahaan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kantor/ instansi/ lembaga/perusahaan pasti membutuhkan ahli hukum (legal officer atau in-house lawyer). Selain itu tentu dapat pula berkarya sebagai usahawan, politisi, akademisi ataupun peneliti. Kesempatan berkarya di berbagai bidang tersebut semakin terbuka lebar bagi lulusan Program Studi yang telah dipersiapkan dan dibekali, baik aspek hard-skill (ilmu pengetahuan baik teori maupun praktek di bidang hukum) maupun soft-skill (leadership, pengembangan kepribadian, berorganisasi) selama kuliah.

B. PROFIL LULUSAN

Berikut ini beberapa profil dan pendapat dari lulusan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata :

1. Paulus Pangka, S.H. (Manajer Museum Rekor Indonesia/MURI)

“Mahasiswa sebagai bagian dari kampus sudah selayaknya mendapatkan tempat yang wajar, apalagi UNIKA sebagai universitas besar di Jawa Tengah sudah sewajarnya menghargai mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat. Pada posisi ini saya memandang bahwa semangat Mgr. Soegijapranata menjadi sangat relevan”.

2. Dr. Edith Ratna, SH.,MKn (Notaris-PPAT Kota Semarang, Dosen)

“Ilmu yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, sangat bermanfaat bagi profesi saya sebagai Notaris-PPAT dan juga sebagai Dosen. Bimbingan, saran dan kritik dari para dosen selama saya kuliah tidak pernah saya lupakan dan menjadi motivasi saya untuk terus menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Terimakasih FH Unika, terimakasih buat semua dosen.. God Bless You.. Terus maju FH Unika Soegijapranata, bersamamu ku raih impianku..”

3. Ariawan Agustriono, SH. (Jaksa pada KPK)

“Saya sangat ingin bekerja sesuai dengan bidang saya, dan ternyata saya lulus tes dan ditempatkan di Kupang. Menghadapi kultur atau budaya yang berbeda, mau tidak mau membutuhkan trik khusus agar dapat bersosialisasi, dan trik yang saya lakukan justru saya dapatkan ketika menjadi aktivis kampus”.

4. Brigitta Lukita Purnamasari Adam, SH. (Staf Global Consumer Banking Citibank NA)

“Banyak ilmu dari bangku kuliah yang bermanfaat, antara lain Hukum Perdata, Hukum Perbankan, Pasar Modal dan Manajemen Perusahaan. Kita harus pintar-pintar memilih matakuliah pendukung (pilihan) yang nantinya akan selalu up to date sehingga hasilnya berguna dan dapat diterapkan di dunia kerja”.

5. Chr. Kushandoko Seto, SH. (Advokat)

“Mempelajari ilmu hukum sangat menguntungkan karena seluruh lini kehidupan bermasyarakat senantiasa bersentuhan dengan hukum”.

6. Bayu Satyantoro Arie Widyatmoko, SH (angkatan 1992, PT. PonnyEkspress Suksestama Semarang)

“Saat ini saya merasakan manfaat kuliah di Unika, Ketika terjun di dunia kerja saya merasa bahwa Unika membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berkiprah di dunia kerja dengan baik. Saya berterimakasih khususnya pada almamater dan MAHUPA. Tanpa mereka saya tidak bisa seperti sekarang.”

7. Arka Yani Prihatmoko, SH. (angkatan 1999, Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup-Yogyakarta)

“Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan, yang pasti di fakultas hukum sangat menyenangkan dan sangat menikmati masa belajar di sana. Saya tidak hanya belajar tentang hukum saja, namun saya juga belajar menjadi anggota masyarakat yang hebat.”

8. Mireille Titisari Miarti Prastuti, SH.,MKn. (angkatan 2000, PT. Surya Dharma Perkasa – Jakarta)

“Menerapkan keilmuan dan kedisiplinan dalam kegiatan belajar mengajar. Dosen-dosennya ramah, baik dan bersahabat (tidak kaku seperti dosen dan murid), menguasai matakuliah bahan ajar yang diampu. Pada intinya betah banget kuliah di sini”.

9. Ariehta Eleison Sembiring, SH.LLM, (angkatan 2006 lulus tahun 2010), penerima beasiswa S2 (LL.M. in Law and Technology), Tilburg University, the Netherlands pada tahun 2018. Pendiri, partner dan lawyer di TRIFIDA at Law, Jakarta.

“Kedekatan dosen dengan mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum ini menurut saya tidak diperoleh di universitas lain. Kedekatan ini perlu dipertahankan karena memudahkan untuk berdiskusi, karena mendukung mahasiswa sehingga kami bisa seperti ini”.

10. Indra Sutyarso, SH, (angkatan 2013, lulus 2017) industrial/employee relations BCA Finance, Jakarta

“Kita mau S2 atau S3 sebenarnya jati diri saya adalah di Unika. Jadi darah saya tidak merah atau biru tetapi ungu.Ungu Unika”.

11. Wahyu Aryono Nugroho,SH (angkatan 2015, lulus 2019), bekerja sebagai analis hukum KPU Purworejo.

“Karakter, ketrampilan dari visi dan misi Prodi Hukum patut dipertahankan. Hard skill dan soft skill perlu dipertahankan melalui organisasi kemahasiswaan. Cara mengatasi berbagai masalah dan pendapat adalah dilatih dengan melalui organisasi. Pembelajaran melalui organisasi kemahasiswaan”.

11. Nicolas Bayu Kusuma Aji, S.H. angkatan 2018, lulus tahun 2022 bekerja di PT Medquest Jaya Global Jakarta sebagai in house legal)

“Berkuliah di Prodi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata tidak hanya dibekali ilmu hukum namun nilai-nilai dari Mgr. Soegijapranata tetap diimplementasikan. Selain itu, selama menjadi mahasiswa saya dipercayai oleh teman dan dosen untuk menjadi Ketua HMPSIH periode 2019-2020, melalui pengalaman tersebut saya berlatih untuk membiasakan diri mengurus banyak hal dan benar saja saat ini saya mengurus 5 entitas perseroan terbatas dalam Medquest Group. Bagi saya selama berkuliah saya berkembang baik secara pengetahuan keilmuan, cara berpikir, kepekaan, komunikasi, dan kepemimpinan.”

C. DESKRIPSI PROGRAM STUDI

1.	NAMA PRODI	: HUKUM
2.	Evaluasi Kurikulum	: Tahun 2024
3.	Asosiasi Profesi (Rujukan) : Asosiasi Advokat <ul style="list-style-type: none"> • IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) • AAI (Asosisasi Advokat Indonesia) • IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) • HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) • SPI (Serikat Pengacara Indonesia) • AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia) • HKPM (Himpunan Konsultasn Hukum Pasar Modal) • APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) • Asosiasi Notaris • INI (Ikatan Notaris Indonesia) 	
4.	Tracer study (yang terakhir kali dilakukan)	: tahun 2023
5.	Jumlah responden tracer study yang mengembalikan berkas	: 100
6.	Evaluasi kurikulum dengan stakeholders	: tahun 2016
7.	Stakeholders yang terlibat	: Kantor Notaris, Kantor Imigrasi, Dep. Perhubungan, Perusahaan, Kantor Advokad Pemkab, Pemkot, Pemprov. Pengadilan.

D. PERUMUSAN PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL

NAMA PRODI : ILMU HUKUM

Nomor	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1.	Staf Bidang Hukum (Legal Officer) pada instansi pemerintah, BUMN, dan swasta	Staf Bidang Hukum (Legal Officer) yang : a. Mengidentifikasi, menganalisis, dan b. menyelesaikan masalah-masalah hukum; c. Merancang peraturan hukum; d. Melakukan legal audit; e. Memberi pertimbangan hukum; f. Membuat surat-surat keacaraan hukum dan g. dokumen hukum
2.	ADVOKAT/ PENASIHAT HUKUM	Advokat/ penasihat hukum yang: a. Mengidentifikasi, menganalisis, melaksanakan, b. menyelesaikan masalah-masalah hukum di semua lingkungan peradilan dan tingkat peradilan; c. Membuat surat-surat keacaraan hukum dan d. perjanjian (contract drafting)
3.	Konsultan hukum	Konsultan hukum yang memberikan jasa konsultasi hukum dan alternatif penyelesaian hukumnya
4.	Asisten Notaris/PPAT	Asisten Notaris/PPAT yang: a. Merancang akta notariil dan akta para pihak; b. Mengurus surat-surat sesuai tugas notaris/PPAT di instansi terkait

5.	JAKSA/PENUNTUT UMUM	Jaksa/Penuntut umum yang: a. Mengidentifikasi, menganalisis dan b. menyelesaikan masalah-masalah hukum; c. Melaksanakan proses penuntutan dalam semua tingkatan pengadilan; d. Mengesekseki putusan pidana; e. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana khusus; f. Menjadi pengacara negara
6.	HAKIM	Hakim yang: a. Mengidentifikasi, menganalisis, melaksanakan, menyelesaikan masalah- masalah hukum di semua lingkungan peradilan dan tingkatan pengadilan; b. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan; c. Melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara yang diintegrasikan ke dalam
7.	Penyidik	Pejabat pemerintah yang: a. Mengidentifikasi, menganalisis masalah-masalah hukum; b. Melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana
8.	Negosiator/Mediator/Arbiter/Konsiliator	Seseorang yang mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi (win-win solution) dalam penyelesaian masalah-masalah hukum
9.	Asisten Peneliti	Seseorang yang membantu merancang dan melakukan penelitian di bidang hukum (monodisplin)

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN

SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang dilandasi nilai-nilai (kristiani), cinta kasih, keadilan dan kejujuran;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang miskin, lemah dan tersingkir, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa berdasarkan semangat Soegijapranata;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;
11. Kritis memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan serta memberi pengharapan;
12. Peduli terhadap lingkungan dan kelompok masyarakat yang termajinalkan dan difabel terutama perempuan dan anak.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Menguasai secara umum asas-asas dan teori-teori hukum, serta ketrampilan hukum;

2. menguasai teori-teori dan ketrampilan hukum bagi perlindungan lingkungan, perempuan dan anak;

KETRAMPILAN KHUSUS

1. menerapkan teori-teori hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum;
2. mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan masalah-masalah;
3. mampu merancang perundang-undangan, surat-surat keacaraan, dan akta;
4. mampu memanfaatkan IPTEKS untuk menyelesaikan masalah prosedural.

KETRAMPILAN UMUM

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut :

1. mampu bekerja di bidang profesi hukum untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar;
7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

F. KURIKULUM

Kurikulum Program Studi Hukum Universitas Katolik Soegijapranata disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan Visi, Misi, Standar Kompetensi Lulusan dan *Centre of Excellence*.

Berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 00476/F.6.1./FHK/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 telah dilakukan perubahan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum. Alasan meninjau kurikulum adalah untuk menyelaraskannya dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). SNPT—yang diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidik Tinggi juncto Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi—adalah norma yang dipakai untuk menetapkan kriteria minimal bagi proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi demi mencapai mutu. Tujuannya adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian itu bisa mencapai standar-standar tertentu yang ditetapkan dalam SNPT tersebut. Sedangkan KKNI—yang diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia—adalah sebuah norma yang mengatur tentang penyandingan, penyetaraan, dan pengintegrasian antara pendidikan tinggi dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan demikian penyelarasan kurikulum 2018 dengan SNPT dan KKNI akan membuat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Ilmu Hukum dapat mencapai standar-standar di SNPT dan lulusannya mencapai mutu yang ditetapkan dalam KKNI, sehingga berkompeten saat masuk ke pasar tenaga kerja.

Selain itu, Program Studi Ilmu Hukum telah meninjau kurikulum pada tahun 2022 dengan menentukan mata kuliah untuk program dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada tahun 2024 melalui rapat kerja Program Studi, telah dilakukan peninjauan kurikulum untuk mendukung percepatan masa studi dan keberhasilan studi para mahasiswa, serta menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1. *Centre of Excellent* :

Ada tiga hal yang harus diperhatikan :

- a. SDM (*Resource : networking, sumber belajar, rekam jejak kegiatan institusi dan dosen sebagai individu*);
- b. Pasar (*input/output*);
- c. Segmentasi Prodi Hukum.

Unsur berkaitan dengan relasi :

1. Majikan dan Pekerja
Relasi ini berkaitan dengan ketenagakerjaan, keperdataan, perlindungan khusus untuk pekerja, penyelesaian perselisihan, jaminan kesejahteraan, pajak (PPH), hak asasi manusia.
2. Pemerintah dan Perusahaan
Regulasi, kepidanaan, tata usaha negara (administrasi: pengawasan, perijinan), pajak, penegakan hukum.
3. Perusahaan dan Lingkungan
Tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan konsumen, etika lingkungan.
4. Intra dan antar Perusahaan
Keperdataan, bisnis, investasi, HAKI, hubungan internasional (publik dan privat), alih teknologi, perbankan, asuransi, finansial, persaingan usaha tidak sehat, monopoli, etika bisnis, pertanahan, AKAN (Antar Kerja Antar Negara).

2. Beban Studi

Beban studi program pendidikan sarjana (strata 1) pada Program Studi Hukum Universitas Katolik Soegijapranata ditetapkan minimal 146 SKS, yang terdiri dari:

- a. Mata kuliah wajib sebanyak 114 SKS;
- b. Mata kuliah pilihan sebanyak minimal 32 SKS.
- c. Mahasiswa dalam menentukan mata kuliah pilihan yang akan ditempuh hendaknya mengingat relevansinya dengan materi yang akan ditulis sebagai skripsi dan kompetensi yang dibutuhkan.

3. Alur Mata Kuliah (terlampir)

4. Susunan Matakuliah Wajib dan Pilihan

1) Mata Kuliah Wajib

SEMESTER I				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	UKS 101	Pendidikan Agama	2	-
2	UKS 102	Pendidikan Pancasila	2	-
3	UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2	-
4	IHW 101	Pengantar Ilmu Hukum	2	-
5	IHW 102	Pengantar Hukum Indonesia	2	-
6	IHW 103	Ilmu Negara	2	-
7	IHW 104	Bahasa Indonesia Hukum	2	-
8	IHW 105	Bahasa Inggris Hukum	2	-

SEMESTER I				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
9	IHW 106	Manajemen Organisasi	2	-
10	IHW 119	Penelusuran Literatur	2	-
JUMLAH SKS			20	

SEMESTER II				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 108	Politik Hukum	2	Co-Hk HTN dan HAN
2	IHW 109	Hukum Perdata	3	PHI, PIH, Ilmu Negara
3	IHW 110	Hukum Pidana	3	PHI, PIH, Ilmu Negara
4	IHW 111	Hukum Tata Negara	3	PHI, PIH, Ilmu Negara
5	IHW 112	Hukum Administrasi Negara	3	PHI, PIH, Ilmu Negara, Co-HTN
6	IHW 113	Hukum Adat	2	PHI, PIH
7	IHW 114	Hukum Islam	2	PHI, PIH
8	IHW 117	Hukum Lingkungan	2	Co-HAN
JUMLAH SKS			20	

SEMESTER III				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 118	Kriminologi	2	Hk. Pidana
2	IHW 201	Hukum Dagang	3	Hk Perdata
3	IHW 202	Hukum Pidana	2	Hk Pidana
4	IHW 203	Hukum Internasional	3	HTN
5	IHW 204	Hukum Perjanjian	2	Hk Perdata
6	IHW 205	Hukum Perbuatan Pemerintah	2	HAN
7	IHW 206	Hukum Perburuhan	2	HAN, Hk Perdata
8	IHW 208	Legal Drafting	2	HTN, HAN
9	IHW 209	Metodologi Penelitian Hukum (MPH)	2	-
10	IHW 210	Hukum Acara PTUN	2	HAN
11	IHW 211	Hukum Agraria	2	HAN
JUMLAH SKS			24	

SEMESTER IV				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 107	Logika Hukum	2	MPH dan Bahasa Indonesia Hukum
2	IHW 207	Hukum, HAM dan Identitas	2	Hk. Perdata, Hk. Pidana, HAN, HI.
3	IHW 212	Hukum Acara Perdata	3	Hk Perdata
4	IHW 213	Hukum Acara Pidana	3	Hk Pidana
5	IHW 214	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	2	Hk Perburuhan
6	IHW 215	Hukum Pajak	2	HAN
7	IHW 216	Hukum Bisnis	2	Hk Dagang
8	IHW 217	Hukum Jaminan	2	Hk Perdata
9	IHW 218	Hukum Lembaga Keuangan	2	Hk. Dagang
10	IHW 220	Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	2	Hk. Pemidanaan, Kriminologi, Co-Hk Bisnis
11	IHW 302	Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH)	2	MPH
JUMLAH SKS			24	

SEMESTER V				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 115	Hukum Perkawinan	2	Hk. Perdata, Hk. Islam, Hk. Adat
2	IHW 116	Sosiologi Hukum	2	-
3	IHW 219	Hukum Kepailitan	2	Hk. Dagang
4	IHW 221	Etika Profesi Hukum	2	Hk. Acara Pidana, Hk. Acara Perdata, Hk. Acara PTUN
5	IHW 301	Hukum Eksekusi	2	Hk Acara Pidana, Hk Acara Perdata, Hk Acara TUN, PPHI
6	IHW 304	Filsafat Hukum	2	Hk Pidana, Hk Perdata, HAN
		6 Matakuliah Pilihan	12	
JUMLAH SKS			24	

SEMESTER VI				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 307	PLKH	6	Hk Perdata, Hk.Pidana, Hk. Tata Negara, Hk.Administrasi Negara, Hk.Perburuhan, Hk. Acara Pidana, Hk. Ac.Perdata, Hk. Ac.PTUN, Legal Drafting
2		9 Mata kuliah Pilihan	18	
JUMLAH SKS			24	

SEMESTER VII				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 303	KKP/Magang	2	Lulus seluruh MK wajib kecuali Skripsi
2	IHW 401	Skripsi**	4	Lulus 110 sks (Terdiri MK wajib 106 sks, dan MK pilihan 4 SKS). IPK 2.50
3	UKS 410	KKN	2	Lulus 100 SKS
4		1 Mata kuliah pilihan	2	
JUMLAH SKS			10	

SEMESTER VIII				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHW 401	Skripsi** (Sesuai dengan SK Rektor yang terbaru)	4	Lulus 110 sks (Terdiri MK wajib 106 sks, dan MK pilihan 4 SKS). IPK 2.50
JUMLAH SKS			4	

Nilai untuk mata kuliah prasyarat tidak boleh E.

** Skripsi (tugas akhir) direncanakan 2 (dua) semester

*** Mahasiswa dapat menempuh/mengulang mata kuliah pilihan dan/atau mata kuliah wajib (untuk memperbaiki IP)

2) Mata Kuliah Pilihan (Syarat Pengambilan telah Lulus Minimal 72 SKS)

BAGIAN DASAR/UMUM/KEILMUAN HUKUM				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHP 301	Antropologi Hukum	2	-
2	IHP 302	Psikologi Hukum	2	-
3	IHP 303	Hukum dan Jender	2	Hukum, HAM, dan Identitas
4	IHP 304	Hukum Perlindungan Anak	2	Hukum, HAM, dan Identitas
5	IHP 305	Resolusi Konflik Sosial	2	-
6	IHP 306	Anatomi Mafia Hukum	2	-

BAGIAN KEPERDATAAN				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHP 307	Perbandingan Hukum Perdata	2	Hk Perdata
2	IHP 308	Hukum Perdata Internasional	2	Hk Perdata
3	IHP 309	Hukum Waris	2	Hk Perdata, Hk Adat, Hk Islam
4	IHP 310	Hukum Bangunan	2	Hk Perdata
5	IHP 311	Hak Kekayaan Intelektual	2	Hk Dagang
6	IHP 312	Hukum Alih Teknologi	2	Hk Dagang
7	IHP 313	Hukum Persaingan Usaha	2	Hk Dagang
8	IHP 314	Syariah Ekonomi	2	Hk Islam
9	IHP 315	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Hk Dagang
10	IHP 317	Penyelesaian Sengketa Alternatif	2	Hk Ac Perdata

BAGIAN KEPIDANAAN				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHP 318	Perbandingan Hukum Pidana	2	Hk Pidana, Hk Pidanaaan
2	IHP 319	Hukum Pidana Perekonomian	2	Hk Pidana, Hk Pidanaaan
3	IHP 320	Hukum Media dan Tindak Pidana Pers	2	Hk Pidana, Hk Pidanaaan
4	IHP 321	Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	2	Hk Pidana, Hk Pidanaaan

BAGIAN KEPIDANAAN				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
5	IHP 322	Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia	2	Hk Pidana, Hk Pidanaan
6	IHP 323	Hukum Pidana Internasional	2	Hk Pidana, Hk Pidanaan, Hukum Internasional
7	IHP 324	Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi	2	Hk Pidana, Hk Pidanaan
8	IHP 325	Tindak Pidana Politik dan Terorisme	2	Hk Pidana, Hk Pidanaan
9	IHP 326	Sistem Peradilan Pidana	2	Hk Pidana, Hk Acara Pidana
10	IHP 327	Ilmu Kedokteran Forensik	2	Hk AC Pidana
11	IHP 328	Viktimologi	2	Kriminologi

BAGIAN KENEGARAAN				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
1	IHP 329	Hukum Pemda	2	HTN
2	IHP 331	Hukum dan Demokrasi	2	HTN
3	IHP 332	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HTN
4	IHP 334	Hukum Perburuhan Internasional	2	Hk Perburuhan
5	IHP 335	Hukum Sumber Daya Alam	2	Hk Lingkungan
6	IHP 336	Hukum Mitigasi Bencana	2	Hk Lingkungan
7	IHP 337	Hukum Kesehatan	2	HAN
8	IHP 338	Hukum Organisasi Internasional	2	HI
9	IHP 339	Hukum Perdagangan Internasioanal	2	HI
10	IHP 340	Hukum Perjanjian Internasional	2	HI
11	IHP 341	Hukum Lingkungan Internasional	2	HI
12	IHP 342	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	HI
13	IHP 343	Hukum Humaniter	2	HI
14	IHP 344	Hukum tata Ruang	2	Hk Lingkungan

BAGIAN KENEGARAAN				
No	Kode	Matakuliah	SKS	PRASYARAT
15	IHP 345	Metode Penyelesaian Sengketa Internasional (MPSI)	2	HI
16	IHP 346	Hukum Perlindungan Buruh Migran	2	Hk Perburuhan
17	IHP 347	Pluralitas Hukum Agraria	2	HK Agraria, Hk Adat
18	IHP 348	Hukum dan Bioteknologi Sumber Daya Alam Hayati	2	Hk. Lingkungan
19	IHP 349	Hukum Penanggulangan Bencana	2	Hk. Lingkungan

5. Deskripsi Singkat Matakuliah

UKS101	Pendidikan Agama	2 SKS
Matakuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menganalisis secara kritis kehidupan beragama masyarakat, merefleksikan kehidupan imannya secara jujur serta mencari dan menemukan bentuk penghayatan iman secara dewasa dan bertanggungjawab.		

UKS102	Pendidikan Pancasila	2 SKS
Matakuliah ini berisi kajian sistematis dan terstruktur tentang fenomena hidup bangsa dan negara Indonesia dengan melandaskan pada nilai-nilai etis yang tersirat dalam sila-sila Pancasila		

UKS103	Pendidikan Kewarganegaraan	2 SKS
Matakuliah ini mempelajari, memahami dan menghayati pengetahuan dan kemampuan dasar warganegara dalam hubungannya dengan negara, termasuk hak dan kewajiban bela negara. Kajian dalam matakuliah ini meliputi: Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, serta Politik dan Strategi Nasional.		

IHW101	Pengantar Ilmu Hukum	2 SKS
<p>Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum berisi tentang pengertian dan ruang lingkup PIH meliputi: Pengertian hukum, obyek dan ruang lingkup PIH serta metode pendekatan; Manusia, masyarakat dan hukum meliputi manusia sebagai makhluk sosial, kaidah hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, sollen-sein, dan alasan keberadaan hukum; Ikhtual pengertian, asas dan tujuan hukum meliputi konsep-konsep dasar tentang hukum, asas hukum-ratiologis, fungsi dan tujuan hukum serta hukum sebagai persoalan keadilan; Sikap dan Tindak hukum/hukum dalam kenyataan meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum; Teknologi hukum/seni hukum/politik hukum meliputi aliran-aliran dalam penerapan hukum, ikhtual perundang-undangan, peradilan, administrasi, kepolisian dan penafsiran hukum serta konstruksi hukum; Maszhab-maszhab Ilmu Hukum meliputi aliran-aliran analitis, historis, teori hukum murni, sosiologis, dan realisme hukum; Sistem dan Klasifikasi Hukum meliputi pengertian sistem, sistem tata hukum, macam-macam sistem hukum dan klasifikasi hukum; Sumber- sumber hukum meliputi perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan hukum, dasar-dasar keahlian hukum, penguasaan hukum dan ilmu hukum serta tujuan hukum. Menguasai dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; mengenal dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan; mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat.</p>		

IHW102	Pengantar Hukum Indonesia	2 SKS
<p>Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal/landasan yang kuat dalam mempelajari hukum Indonesia. Oleh karena itu, pembahasannya lebih menekankan pada sejarah sistem hukum Indonesia, kondisi sekarang, dan arah perkembangan sistem hukum Indonesia, serta asas-asas hukum materil dan sistem penegakan hukum, yang meliputi kekuasaan kehakiman, instansi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, badan/instansi penyelesaian sengketa alternatif, dan asas-asas hukum</p>		

IHW103	Ilmu Negara	2 SKS
<p>Mata kuliah Ilmu Negara merupakan mata kuliah dasar yang berisikan teori- teori dan asas-asas negara secara umum yang berkembang yang meliputi, Pengertian negara, teori asal mula negara, mati tuanya negara, teori kedaulatan, teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori tujuan dan fungsi, organisasi negara dan teori konstitusi. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan memperoleh gambaran secara jelas segala sesuatu yang berkenaan dengan Negara secara umum yang dapat menghantarkan mahasiswa di dalam mendalami mata kuliah lanjutannya, yaitu HTN dan HAN.</p>		

IHW105	Bahasa Inggris Hukum	2 SKS
<p>Mata kuliah ini mempelajari dan memahami: ungkapan-ungkapan presentasi bahasa Inggris: ungkapan-ungkapan percakapan sederhana; menggunakan ungkapan-ungkapan presentasi bahasa Inggris dalam presentasi dengan topik-topik yang berkaitan dengan hukum dan mampu menggunakan ungkapan-ungkapan percakapan sederhana dalam percakapan dengan topik-topik keseharian.</p>		

IHW106	Manajemen Organisasi	2 SKS
<p>Manajemen Organisasi adalah mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang pengelolaan organisasi sebagai wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan agar mampu bertahan dan terus berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal yang terus menerus berubah dan dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi.</p>		

IHW107	Logika Hukum	2 SKS
<p>Logika Hukum bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat keputusan-keputusan (pernyataan-pernyataan) hukum logis. Maka mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian dari logika, pembagian (penggolongan) dan definisi, keputusan, pembalikan dan perlawanan, penyimpulan, silogisme hipotetis, dan silogisme kategoris. Selain itu juga akan dibahas tentang model penalaran induksi dan deduksi, metode penemuan hukum, berbagai aliran penemuan hukum, dan prosedur penemuan hukum.</p>		

IHW1108	Politik Hukum	2 SKS
<p>Politik hukum merupakan kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara, politik hukum tidak berdiri sendiri lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Politik Hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia itu bertindak untuk menata dirinya, negara dan dimensi-dimensi lain yang melingkupi manusia. Oleh sebab itu dalam mata kuliah Politik Hukum akan disajikan materi kuliah yang meliputi; Pengertian politik hukum, politik hukum sebagai kajian HTN, Hukum sebagai alat dan tujuan, Ruang lingkup politik hukum, Sejarah pembentukan hukum masa rezim demokrasi liberal, rezim demokrasi terpimpin, rezim Orde Baru, Paradigma baru politik hukum pasca rezim reformasi, hubungan kausalitas antara hukum dan politik, hukum represif, otonom, demokratis dan responsif, sifat pelaksanaan politik hukum di Indonesia, hukum sebagai produk politik serta politik hukum pembentukan perundang-undangan. Di samping itu mata kuliah politik hukum sebagai dasar mata kuliah selanjutnya, baik itu politik hukum perburuhan, politik hukum pidana dan sebagainya serta mengantar mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah legal drafting.</p>		

IHW109	Hukum Perdata	3 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami hubungan keperdataan yang terjadi di masyarakat. Materi yang dipelajari mahasiswa meliputi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, dan hukum perikatan yang semuanya merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam praktek.</p>		

IHW110	Hukum Pidana	3 SKS
<p>Mata Kuliah didahului dengan materi: pengertian hukum pidana, fungsi hukum pidana, hubungan ilmu hukum pidana dan kriminologi, sumber-sumber hukum pidana (termasuk hukum pidana adat, hukum pidana internasional dan perubahan dalam kuhp), bagian umum dan bagian khusus dalam hukum pidana. Selanjutnya kepada mahasiswa akan diberikan materi berlakunya peraturan pidana menurut waktu – asas nullum delictum serta berlakunya peraturan pidana menurut tempat. Materi selanjutnya adalah tentang istilah tindak pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, rumusan tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, perbuatan, kausalitas (hubungan sebab-akibat), pengertian sifat melawan hukum, pengertian kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kealpaan serta ditutup dengan materi alasan penghapus pidana yang terdiri alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana yang ada di luar KUHP.</p>		

IHW111	Hukum Tata Negara	3 SKS
<p>Mata Kuliah ini berusaha mengungkapkan Ketatanegaraan Indonesia secara tuntas, yaitu dengan memberikan gambaran, penjelasan dan bandingan- bandingan tentang pengertian HTN, Obyek penelitian HTN, Konstitusi, Azas- azas dalam UUD'45, Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan dalam UUD'45, Demokrasi, Negara Hukum, Bentuk dan Sistem Pemerintahan, Welfare State, Partai politik, Organisasi Negara Indonesia, Penetapan Penguasa, Pemilihan Umum dan Kewarganegaraan. Sedangkan untuk lebih memberikan tekanan nyata, mahasiswa diarahkan dalam diskusi teori dan praktek kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.</p>		

IHW112	Hukum Administrasi Negara	3 SKS
<p>Matakuliah HAN berbobot 3 sks merupakan matakuliah wajib, yang terdiri dari beberapa bab. Bab I : Pendahuluan yang antara lain membahas tentang peristilahan dan definisi, kedudukan dan landasan HAN, batas HAN dengan HTN dan hubungannya dengan bidang-bidang hukum yang lain serta ruang lingkup HAN. Pada Bab II membahas ttg sumber-sumber dan sifat-sifat HAN, Bab III tentang Asas dan Fungsi HAN. Bab IV membahas tentang faktor- faktor pendorong perkembangan HAN di Netherland yang sekaligus dikemukakan tentang perkembangan HAN di Indonesia. Bab V tentang Pemerintah dan Bab VI tentang Instrumen Yuridis Pemerintahan. Pada Bab VII akan dibahas tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dilengkapi dengan pembahasan ttg Good Governance. Bab VIII membahas ttg Falsafah Pemerintahan, sedangkan Bab IX membahas tentang Pengawasan.</p>		

IHW113	Hukum Adat	2 SKS
<p>Mata kuliah ini akan mengajarkan pengertian hukum adat, latar belakang berlakunya dan pemberlakuannya. Melalui mata kuliah ini mahasiswa memahami corak hukum adat yang berbeda dengan hukum nasional yang bersifat tertulis, dan kedudukan hukum adat di dalam hukum nasional pada masa sekarang, serta relevansinya terhadap pembangunan hukum nasional pda khususnya dan pembangunan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya.</p>		

IHW114	Hukum Islam	2 SKS
<p>Mata kuliah ini mengajarkan mengenai sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia, kedudukan dan relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan tentang sumber-sumber hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Indonesia dan UU tentang Peradilan Agama. Perkembangan pemberlakuan hukum Islam di wilayah tertentu juga menjadi pokok pembahasan mata kuliah Hukum Islam.</p>		

IHW115	Hukum Perkawinan	2 SKS
<p>Hukum Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata khususnya tentang hukum keluarga (Buku Ke satu Tentang Orang). Keluarga dan atau Rumah Tangga merupakan sendi dasar kehidupan masyarakat. Penguasaan dan pemahaman yng benar tentang norma hukum yang terkait dengan kehidupan berkeluarga / berumah tangga sangatlah penting. Oleh karena itu materi kuliah hukum perkawinan merupakan salah satu materi pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum dimana dalam proses pembelajaran akan diulas secara lengkap tentang seluk beluk perkawinan dari segala aspek hukumnya (Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Hukum Kanonik)</p> <p>Sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran Hukum Perkawinan, mahasiswa juga akan mengikuti proses peradilan (baik itu di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama) terkait masalah-masalah perkawinan. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu menguasai tidak saja dari aspek keilmuan tetapi juga dalam hal praktek kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa-sengketa perkawinan.</p>		

IHW116	Sosiologi Hukum	2 SKS
<p>Sosiologi Hukum merupakan cabang dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Matakuliah ini membahas tentang hubungan antara masyarakat dengan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, serta memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi obyek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial.</p>		

IHW117	Hukum Lingkungan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pandangan baru tentang hubungan antara lingkungan hidup dan manusia. Hubungan tersebut berubah dari paradigma lama ke arah paradigma baru yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manusia dan dalam konteks hukum lingkungan dipandang sebagai subjek hukum.</p> <p>Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dibekali materi: pengertian dasar lingkungan hidup dan ekosistem; hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup; perkembangan global dan nasional dalam rangka kebijakan perlindungan lingkungan hidup; etika lingkungan; masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia; perkembangan pengaturan di Indonesia; dan implementasi ketentuan hukum dengan dilengkapi bekal contoh-contoh kasus yang terjadi di lapangan. Dengan mempelajari kasus-kasus yang ada maka mahasiswa mampu melakukan analisis hukum serta mampu memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan yang ada.</p>		

IHW 119	Penelusuran Literatur	2 SKS
<p>Penelusuran literatur adalah mata kuliah yang sangat penting karena membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengenali sumber informasi yang kredibel, serta memahami dan menyusun argumen berdasarkan penelitian yang ada. Dalam penelusuran literatur terutama mahasiswa diperkenalkan memahami struktur jurnal ilmiah dan cara membaca secara kritis, sehingga mereka memperoleh kemampuan untuk menafsirkan abstrak, mengenali metodologi penelitian, serta menyaring informasi yang valid dan relevan. Selain itu, mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada berbagai sumber literatur, baik yang tercetak maupun digital, dan memberi mereka wawasan tentang bagaimana ilmuwan berkontribusi pada pengetahuan yang ada.</p>		

IHW201	Hukum Dagang	3 SKS
<p>Mata kuliah ini terutama mengkaji asas-asas hukum perusahaan dan hukum pengangkutan. Pokok bahasan utama hukum perusahaan meliputi pengertian perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan (Firma, CV, PT dan Koperasi), cara pendirian, pengertian dan arti pentingnya dokumen perusahaan, pengusaha dan pembantu pengusaha (makelar, komisioner, agen perusahaan, cabang perusahaan), hubungan hukum antara pengusaha dan pembantu pengusaha, serta pertanggungjawaban (liabilities) dari para pendiri dan pengurusnya. Selain itu, matakuliah ini juga membahas tentang hukum pengangkutan mengingat letak geografis Indonesia yang sangat memungkinkan adanya usaha jasa transportasi di tiga bidang jalur yaitu darat, laut dan udara. Materi yang akan dibicarakan dalam hukum pengangkutan adalah : asas-asas publik dan perdata dalam usaha pengangkutan. Kemudian hubungan hukum dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam usaha pengangkutan. Selanjutnya akan dibahas peraturan/perundang-undangan yang dapat mencegah dan memperkecil timbulnya resiko dalam usaha pengangkutan, meliputi; kelayakan angkut, tanggung jawab pengangkut, asuransi pengangkutan, dan sebagainya.</p>		

IHW202	Hukum Pidana	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini diberikan kepada mahasiswa agar dapat mengetahui asas-asas pidana dalam sistem pidana yang ada di Indonesia baik secara teoretis maupun pengaturannya dalam KUHP dan di luar KUHP. Materi yang diberikan meliputi pengertian percobaan (poging) dan syarat-syarat penjatuhan pidananya, pengertian penyertaan (delneeming) meliputi pembuat dan pembantu serta syarat-syarat penjatuhan pidananya, pengertian perbarengan (concursum) yang meliputi concursum realis, concursum idealis dan delictum continuatum dan syarat-syarat penjatuhan pidananya, pengertian pengulangan tindak pidana (recidive) serta syarat-syarat penjatuhan pidananya, jenis-jenis pidana dan teknik penyusunan rumusan pidana, pengertian disparitas pidana serta alasan-alasan penghapusan penuntutan baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP.</p>		

IHW203	Hukum Internasional	3 SKS
<p>Mata Kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa agar bisa memahami prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masyarakat internasional. Mata kuliah ini lebih ditujukan kepada sisi publik dari hukum internasional sehingga tidak akan mengajarkan prinsip-prinsip hukum bisnis ataupun hukum perdata internasional yang menyangkut hubungan antar individu dalam ranah perdata seperti perkawinan dsb. Terkait dengan mata kuliah ini adalah pengertian negara dan hubungannya dengan negara-negara lainnya, sehingga kajian utama dari mata kuliah ini lebih kepada bagaimana satu negara dapat melakukan hubungan dengan negara lainnya dalam suatu kerangka masyarakat internasional yang saling menghormati.</p>		

IHW204	Hukum Perjanjian	2 SKS
<p>Mata kuliah hukum perjanjian merupakan bahasan lanjutan dari hukum perdata khususnya mengenai macam-macam perjanjian dengan segala seluk beluk aspek hukumnya. Disamping yang dipelajari tentang macam-macam perjanjian bernama sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga dipelajari mengenai kontrak baku yang menjadi model perjanjian yang seringkali terjadi dan berlaku dalam praktek kehidupan sehari-hari.</p> <p>Dengan penguasaan dan pemahaman yang benar tentang aspek hukum perjanjian juga segala hal yang terkait dengan perjanjian pada umumnya diharapkan dapat menjadikan dan memberikan pedoman yang baik terlebih manakala merancang ataupun menjadi para pihak dalam suatu perjanjian. Disamping itu penguasaan yang benar dari aspek hukum dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa-sengketa perjanjian.</p>		

IHW205	Hukum Perbuatan Pemerintah	2 SKS
<p>Matakuliah Hukum Perbuatan Pemerintah merupakan matakuliah wajib, berisi tentang: Pendahuluan, yang antara lain membahas tentang Pengertian Pemerintah, Pemerintahan dan perbuatan Pemerintah, Bab II. Membahas tentang Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah, Bab III. Ombudsman, Bab IV. Public Domein, Bab V. membahas tentang Bentuk2 BUMN, Bab VI. Hukum Kepegawaian, Bab VII. Peradilan Administrasi, Bab VIII. Sanksi-Sanksi Dalam Hukum Administrasi, Bab IX. Hukum Keuangan Negara.</p>		

IHW206	Hukum Perburuhan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa agar mampu memahami pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai mata kuliah pengantar, maka mata kuliah ini merupakan suatu rangkaian dengan mata kuliah lainnya, terutama Politik Hukum Perburuhan, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, dan Penanganan Perkara Perselisihan Perburuhan dalam PLKH sebagai matakuliah kemahiran hukum. Mata kuliah Hukum Perburuhan membekali mahasiswa tentang sumber-sumber hukum perburuhan (materiil dan formil); hubungan industrial terutama peran dan fungsi pemerintah; hubungan kerja yang menjelaskan dasar terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan dan akibat hukum dari hubungan kerja; aspek-aspek perlindungan hukum dalam hubungan kerja yang meliputi kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan sosial tenaga kerja; dan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri serta Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia.</p>		

IHW207	Hukum, HAM, dan Identitas	2 SKS
<p>Hukum dan HAM bertujuan memberi pemahaman tentang keterkaitan antara hukum dan hak-hak asasi manusia yang akan membuat hukum tak lagi merupakan norma tentang kekuasaan, tapi terkait dengan moralitas. Untuk itu mata kuliah ini akan menyampaikan sejarah konsep-konsep tentang humanisme yang berpengaruh pada pembentukan hak-hak dasar manusia; sejarah HAM; perdebatan antara perspektif universalisme (liberalisme), komuntarisme (partikularisme), dan Habermasianisme (yang menggabungkan universalisme dan komuntarisme berdasarkan teori komunikasi); perspektif postmodernisme tentang HAM; instrumen-instrumen hukum internasional tentang HAM; peraturan-peraturan hukum nasional tentang HAM; hukum dan HAM dalam pluralisme identitas (agama, etnis, orientasi seksual, gender, kelas, status sosial, usia, dan nasionalisme), dan penegakan hukum dalam berbagai bentuk kejahatan HAM.</p>		

IHW208	Legal Drafting	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan materi ilmu pengetahuan perundang-undangan (<i>Gesetzgebungswissenschaft</i>) yang meliputi teori perundang-undangan (<i>Gesetzgebungstheori</i>) dan ilmu perundang-undangan (<i>Gesetzgebungslehre</i>). Teori perundang-undangan (<i>Gesetzgebungstheori</i>) berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian (<i>erklarungsorientiert</i>) dan bersifat kognitif, memuat materi antara lain bentuk negara, bentuk pemerintahan, lembaga negara, dan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan (<i>Gesetzgebungslehre</i>) berorientasi pada melakukan perbuatan (<i>handlungsorientert</i>) bersifat normatif, memuat bentuk-bentuk produk hukum, jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan, asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dengan disertai format masing-masing peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini merupakan pengantar yang akan dilanjutkan dengan praktik dalam Mata Kuliah PLKH non Litigasi, yaitu Legal Drafting.</p>		

IHW209	Metodologi Penelitian Hukum (MPH)	2 SKS
<p>Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum berisi tentang: seluk-beluk penelitian pada umumnya dan penelitian hukum khususnya dan produk ilmu pengetahuan; kebenaran ilmiah, tujuan penelitian; tipologi penelitian hukum; paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif; langkah langkah dalam penelitian hukum, unsur-unsur pokok dalam penelitian; serta kerangka rancangan usulan penelitian.</p>		

IHW210	Hukum Acara PTUN	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengertian dasar dalam PTUN, sejarah lahirnya PTUN, asas-asas dalam peradilan TUN, objek sengketa, para pihak yang bersengketa, kompetensi PTUN, perbandingan dengan negara lain, perbandingan dengan Peradilan lainnya, upaya administratif dan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk upaya hukum dalam PTUN. Mata kuliah ini membekali pula contoh-contoh kasus dan putusan PTUN sebagai bahan kajian untuk memperdalam materi. Mata Kuliah ini merupakan pengantar dan rangkaian yang akan dilanjutkan dengan praktik dalam Mata Kuliah PLKH Litigasi, yaitu Hukum Acara PTUN.</p>		

IHW211	Hukum Agraria	2 SKS
<p>Mata kuliah Hukum Agraria memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori-teori dan asas-asas yang berkembang di bidang Agraria, khususnya di bidang pertanahan, yang meliputi: Pengertian Hukum Agraria, Politik Hukum Agraria sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, Sejarah pembentukan Hukum Agraria Nasional, Asas-asas dan Konsep Dasar Hukum Agraria Nasional, Hak-Hak Penguasaan atas tanah berdasar Hukum Agraria Nasional, Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Hak Tanggungan, Land Reform dan Land Use, dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah. Untuk lebih mendalami materi tersebut mata kuliah ini diselenggarakan dengan tatap muka maupun diskusi kelas, yang mana mahasiswa mendapat tugas-tugas dengan membuat paper untuk mempelajari kasus kasus pertanahan yang terjadi di lapangan.</p>		

IHW212	Hukum Acara Perdata	3 SKS
<p>Hukum Acara Perdata positif sebagian besar masih bersumber pada HIR dan RBg yang merupakan warisan kolonial. Dalam menyesuaikan dengan kebutuhan praktik penegakan hukum perdata, maka dimunculkan lembaga-lembaga hukum yang baru serta dikeluarkan peraturan perundangan baru yang masih bersifat partial. Kondisi ini masih akan berjalan terus sampai terbentuknya Hukum Acara Perdata baru dan pada masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, matakuliah ini menekankan pembahasannya pada asas-asas peradilan dan asas-asas hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata terdiri dari Hukum Gugatan, Hukum Pembuktian, serta Hukum Pensitaandan Eksekusi. Matakuliah ini membahas secara mendalam mengenai hukum Gugatan dan Hukum Pembuktian, sedangkan pembahasan Hukum Pensitaan dan Eksekusi hanya secara garis besar, karena akan dibahas lebih mendalam dalam matakuliah Hukum Eksekusi Perdata. Lembaga-lembaga baru dalam bidang Hukum Acara Perdata akan mendapat pembahasan sevara khusus, diantaranya Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Mediasi di Pengadilan, dan Dissenting Opinion.</p>		

IHW213	Hukum Acara Pidana	3 SKS
<p>Beracara di Pengadilan sangat perlu dipahami oleh calon Sarjana Hukum, maka Mata Kuliah ini wajib diberikan agar Mahasiswa dapat memahami proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana. Mata Kuliah ini akan membahas tentang acara pemeriksaan dimulai dengan beracara di tingkat penyidikan, acara pemeriksaan di tingkat penuntutan, acara pemeriksaan di Pengadilan, jenis-jenis putusan Pengadilan, upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, dan pelaksanaan putusan hakim. Dalam Materi juga dibahas tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana yi. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasasyarakatan serta hal-hal penting yang harus dipahami Mahasiswa terutama tentang proses beracara dari awal sampai pelaksanaan eksekusi pidana.</p>		

IHW214	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPIH)	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini membekali kepada masiswa kemampuan menentukan dan menggunakan hukum Ketenagakerjaan khususnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara tepat dalam memecahkan perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan, antara Pekerja/Serikat Pekerja dengan Pengusaha dan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan.</p>		

IHW215	Hukum Pajak	2 SKS
<p>Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa baik secara teoritis maupun praktis berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak di masyarakat, karena itu mahasiswa akan diberikan materi-materi: Latar Belakang Perpajakan, Pengertian dan Unsur Unsur Hukum Pajak, Penggolongan dan Kedudukan Hukum Pajak, Keadilan Pajak, Timbul dan Hapusnya Utang Pajak, Penagihan Utang Pajak, Kedudukan Istimewa Negara atas Utang Pajak, Tarif Pajak, Sengketa dan Peradilan Pajak. Tatacara perhitungan PBB dan PPH. Untuk lebih mendalami materi tersebut, mahasiswa diarahkan dalam diskusi kelas dengan materi tambahan yang terjadi dalam praktek pelaksanaan di masyarakat.</p>		

IHW216	Hukum Bisnis	2 SKS
<p>Matakuliah ini berisi kajian terhadap kegiatan-kegiatan bisnis beserta pengikat hukum yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis. Mengingat sangat beragamnya kegiatan bisnis, maka dalam matakuliah ini akan dibatasi beberapa materi utama yakni meliputi Lembaga Pembiayaan, Asuransi, Surat Berharga, dan Anti Monopoli.</p> <p>Materi Lembaga Pembiayaan meliputi Leasing, Pembiayaan Konsumen, Factoring dan Modal Ventura. Sedangkan materi surat berharga akan dibahas ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat-surat berharga. Kemudian beberapa jenis surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indoensia dan beberapa surat berharga yang berkembang dalam praktik perbankan, terutama yang bersumber pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>Sedangkan untuk Hukum Antimonopoli khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur mengenai Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian mahasiswa dapat mengetahui adanya perangkat hukum yang dapat memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah atau melarang terjadinya persaingan tidak sehat dalam kegiatan bisnis.</p>		

IHW217	Hukum Jaminan	2 SKS
<p>Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang dipinjamkan akan terjamin pelunasannya dengan adanya jaminan.</p> <p>Peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi sangatlah penting. Oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang berbagai bentuk lembaga jaminan serta kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur mutlak diperlukan agar pembebanan jaminan dapat dilakukan secara baik dan benar.</p> <p>Materi kuliah hukum jaminan merupakan bagian dari hukum perdata dengan penekanan pada aspek penjaminan baik itu jaminan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Terdapat beberapa pokok bahasan penting dalam mempelajari materi hukum jaminan, antara lain tentang Gadai, Fiducia, Hak tanggungan, dan Penanggungan. Keempat hal tersebut seringkali bersinggungan dengan praktek kehidupan masyarakat sehari hari. Dengan mempelajari dan juga penguasaan yang baik tentang hal-hal tersebut diharapkan dapat memberi gambaran yang utuh dan benar tentang jaminan dan bagaimana implementasinya.</p>		

IHW219	Hukum Kepailitan	2 SKS
<p>Mata kuliah Hukum Kepailitan ini memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan dan menguraikan masalah-masalah kepailitan. Bekal tersebut berkaitan dengan konsep-konsep dasar kepailitan yang meliputi pengertian kepailitan, siapa yang bisa diajukan pailit dan siapa yang dapat mengajukan kepailitan, proses permohonan kepailitan, tugas dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam kepailitan, akibat kepailitan serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan masalah kepailitan.</p>		

IHW220	Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan kemampuan hukum untuk beradaptasi, konsep hukum teknologi informasi dan telekomunikasi, pengaturan hukum teknologi informasi dan telekomunikasi (internasional maupun nasional), berbagai aspek hukum dalam UU ITE beserta perbuatan yang dilarang (aspek hukum e-commerce, aspek hukum pengaturan informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, nama domain), berbagai aspek hukum dalam UU Telekomunikasi terkait penyelenggaraan</p>		

IHW221	Etika Profesi Hukum	2 SKS
<p>Etika Profesi Hukum bertujuan pemahaman tentang etika deontologis, etika hedonisme, etika eudaimonisme, perdebatan ketiganya dan pengaruhnya pada etika profesi hukum. Pada tataran praktis pembahasan etika profesi hukum ini akan diterapkan pada pembahasan tentang etika profesi advokat, polisi, jaksa dan hakim. Seperti diketahui keempat profesi penegak hukum ini selain diatur oleh kode etik profesi masing-masing juga diatur dengan UU profesi, maka akan dibahas berbagai persoalan etis yang muncul karena berlakunya dua jenis peraturan yang berbeda tersebut. Selain itu mata kuliah ini akan membahas kode etik dalam pemeriksaan hukum terhadap kasus yang dihadapi oleh anak dan perempuan. Akhirnya mata kuliah ini akan membahas kode etik profesi notaris.</p>		

IHW301	Hukum Eksekusi	2 SKS
<p>Mata Kuliah Hukum Eksekusi merupakan matakuliah kelanjutan/ pendalaman dari berbagai mata kuliah hukum acara, khususnya hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara tata usaha negara. Mata Kuliah Hukum Eksekusi menjadi mata kuliah tersendiri di luar mata kuliah hukum acara karena luasnya eksekusi dalam perkara perdata, perkara pidana dan perkara tata usaha negara. Eksekusi perkara perdata tidak terbatas pada eksekusi putusan pengadilan, tetapi meliputi juga eksekusi putusan arbitrase dan alas hak lainnya yang bertelelekektorial.</p> <p>Mata Kuliah Hukum Eksekusi dirancang untuk menghasilkan lulusan program sarjana hukum yang memiliki keahlian (kompetensi) di bidang hukum eksekusi baik eksekusi perkaraperdata, perkara pidanadan eksekusi perkara tata usaha negara dengan pembagian materi secara proporsional sesuai keluasan materi hukum masing-masing.</p>		

IHW302	Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH)	2 SKS
<p>Mata kuliah ini melatih dan mempersiapkan mahasiswa untuk menulis tugas-tugas perkuliahan serta tugas akhir berupa skripsi. Hasil yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah ketrampilan teknis dalam menulis karya ilmiah, khususnya di bidang ilmu hukum. Tahap-tahap penulisan berupa prewriting, writing, dan rewriting merupakan topik pertama yang diajarkan. Kemudian dibahas tentang format tulisan ilmiah, dari penyusunan latar belakang masalah dan perumusan masalah sampai ke teknis penulisan daftar pustaka. Teknik pengutipan yang benar, baik verbatim maupun parafrase, dilatihkan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga menjadi pekerjaan rumah. Fungsi- fungsi catatan kaki dan cara penulisan juga merupakan ketrampilan teknis penulisan ilmiah yang harus dikuasai mahasiswa. Hasil akhir dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian yang akan diseminarkan dan diharapkan proposal tersebut akan dikembangkan menjadi skripsi yang merupakan tugas akhir mahasiswa sebelum menuntaskan belajarnya.</p>		

IHW304	Filsafat Hukum	2 SKS
<p>Filsafat Hukum bertujuan memberikan pemahaman tentang makna filosofis dari hukum. Untuk itu akan dibahas sejarah hukum di eropa sejak zaman klasik (Yunani dan Romawi Kuno), renaissance dan modern. Akan dibahas perdebatan antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum; hubungan antara hukum, rasionalitas, dan kebebasan; hukum dan keadilan; asas-asas hukum; hukum dan HAM; politik hukum; ilmu hukum dan tafsir hukum; berbagai aliran di pengadilan; persektif Jürgen Habermas tentang hukum dan demokrasi; hukum sebagai diskursus yang membahas perspektif modernisme dan post-modernisme tentang hukum. Dengan mengikuti mata kuliah ini para mahasiswa akan bisa secara kritis memaknai hukum dan keadilan.</p>		

IHW305	PLKH Non Litigasi	2 SKS
<p>Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. Non litigasi pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan " Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan" . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."</p> <p>Bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.</p>		

IHW306	PLKH Litigasi	2 SKS
<p>Litigasi adalah bentuk penanganan kasus / perkara melalui proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana (penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka Pengadilan). Pengertian Litigasi sesungguhnya secara eksplisit tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase dan APS") berbunyi:"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri." Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.</p>		

IHP301	Antropologi Hukum	2 SKS
<p>Melalui matakuliah Antropologi Hukum, mahasiswa diberi pemahaman mengenai luas kajiannya karena berbeda dengan hukum adat dan sosiologi hukum, selain itu juga metode pendekatan dalam mengumpulkan materi atau data. Penekanan mengenai perubahan sosial dan hukum juga diberikan karena hal tersebut merupakan bagian dari kajian antropologi hukum ketika melakukan kajian atas kasus sengketa dan non sengketa di dalam masyarakat dengan memperhatikan pluralisme hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.</p>		

IHP302	Psikologi Hukum	2 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek psikologis mengingat bahwa setiap bidang ilmu psikologi seperti psikologi perkembangan, sosial, klinis dan kognitif, memiliki relevansi dengan aspek hukum tertentu di dalam persoalan-persoalan hukum yang akan diputus oleh hakim. Materi yang dipelajari mahasiswa meliputi pengertian, hubungan psikologi dengan hukum dan mengaji berbagai persoalan hukum ditinjau dari aspek psikologis, seperti: pengasuhan anak, women battered syndrome, dan pelecehan seksual.</p>		

IHP303	Hukum dan Gender	2 SKS
<p>Hukum dan Gender bertujuan memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara hukum dan persoalan-persoalan gender seperti hukum dan diskriminasi gender, hukum dan keadilan gender, maupun hukum dan kesetaraan gender. Maka berbagai teori feminisme hukum dari feminisme modern sampai pasca modern—juga akan disampaikan di mata kuliah ini. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai peraturan yang mendiskriminasi dan yang memberdayakan perempuan. Dengan mengikuti mata kuliah ini para mahasiswa akan mampu secara kritis menganalisa berbagai persoalan gender dalam hukum.</p>		

IHP304	Hukum Perlindungan Anak	2 SKS
<p>Mata Kuliah Hukum Perlindungan Anak bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman akan hak anak dan perlindungan hukumnya, karena seringkali anak menjadi pihak yang tak berdaya dan objek berbagai kepentingan orang dewasa. Adapun materi yang diberikan meliputi: hak anak, Konvensi Hak Anak, hak anak di bidang hukum Perdata, adopsi anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak, anak yang bermasalah dengan hukum, serta penjatuhan pidana terhadap anak.</p>		

IHP305	Resolusi Konflik Sosial	2 SKS
<p>Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, terjadinya konflik sosial di Indonesia yang berulang dan berkelanjutan, serta dan banyaknya kajian-kajian konflik sosial dari aspek hukum menunjukkan pentingnya Resolusi Konflik Sosial sebagai materi pembelajaran pada program sarjana hukum.</p> <p>Materi pembelajaran dalam Mata Kuliah Resolusi Konflik Sosial ini meliputi: sumber dan potensi konflik sosial, pencegahan dan penghentian konflik sosial, kelembagaan penyelesaian konflik sosial, mekanisme penyelesaian konflik sosial secara non litigasi, upaya pemulihan pascakonflik dan tanggungjawab negara dalam penanganan dan pemulihan pascakonflik.</p> <p>Mata Kuliah ini dirancang untuk menghasilkan lulusan program sarjana hukum yang ahli dalam hukum penanganan konflik sosial.</p>		

IHP306	Anatomi Mafia Hukum	2 SKS
<p>Mata kuliah Anatomi Mafia Hukum ini mengajak para mahasiswa untuk mengenali tiga bentuk mafia hukum berdasarkan motifnya, yaitu anti terhadap ideologi politik tertentu, perlindungan pejabat atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan korupsi. Untuk itu fokus perkuliahannya adalah kajian terhadap bentuk dan pola mafia hukum di Indonesia, sejarah mafia hukum di Indonesia, penyelundupan hukum, dan penyuaipan dan ancaman terhadap penegak hukum. Dengan mengikuti kuliah Anatomi Mafia Hukum ini para mahasiswa akan mampu secara kritis menganalisa dan berpendapat tentang bentuk dan pola mafia hukum di Indonesia.</p>		

IHP307	Perbandingan Hukum Perdata	2 SKS
<p>Perbandingan hukum khususnya tentang hukum perdata mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional khususnya dalam fungsi penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami dan mempelajari perbandingan hukum kita dapat mengetahui secara lebih luas dan mendalam berbagai sistim hukum yang berlaku di berbagai negara yang berdaulat dan karenanya dapat membantu mencegah atau menyelesaikan perselisihan antara sistim hukum baik itu secara ilmiah maupun praktis.</p> <p>Adapun ruang lingkup materi pembelajaran meliputi antara lain mengenai apakah Perbandingan Hukum Perdata dan tujuan serta fungsi Perbandingan Hukum Perdata baik mengenai lembaga-lembaga hukum suatu negara dengan negara lain, juga menyangkut berbagai sistim hukum semisal antara sistim hukum eropa kontinental, romawi jerman ataupun anglo saxon.</p>		

IHP308	Hukum Perdata Internasional	2 SKS
<p>Mata kuliah Hukum Perdata Internasional merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Perdata. Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistim hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistim hukum nasional.</p> <p>Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami dan mampu memecahkan berbagai permasalahan di bidang Hukum Perdata Internasional khususnya sengketa-sengketa perdata antara dua atau lebih sistim hukum perdata dalam bidang Hukum Perjanjian, Hukum waris, Hukum Perkawinan, Hukum Benda, serta Perbuatan Melawan Hukum.</p>		

IHP309	Hukum Waris	2 SKS
<p>Mata kuliah ini akan menjejakkan tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Waris Perdata Barat yang didasarkan pada KUHPperdata, Waris Islam yang didasarkan pada Hukum Islam dan KHI, dan Waris Adat yang didasarkan pada sistem masyarakatnya. Setiap sistem memiliki syarat untuk dapat menjadi ahli waris, halangan untuk mewaris, wasiat dan tata cara di dalam pembagian dan penghitungannya yang wajib diketahui oleh mahasiswa khususnya yang mendalami hukum perdata dan berencana mengambil studi lanjut berupa pendidikan kenotariatan.</p>		

IHP310	Hukum Bangunan	2 SKS
<p>Hukum Bangunan merupakan keseluruhan peraturan yang menyangkut pembangunan suatu bangunan, baik itu yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjiannya maupun yang berhubungan dengan pelelangan. Dalam mempelajari mata kuliah Hukum Bangunan, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai hal yang terkait dengan bangunan, antara lain tentang gambaran umum perjanjian, aspek yang terkandung dalam perjanjian (aspek hukum, tehnik, keuangan, perbankan, pajak, asuransi), cara menyusun perjanjian, negosiasi kontrak, pelelangan, klaim, serta peranan konsultan hukum dalam sebuah perjanjian.</p> <p>Dengan mempelajari hal-hal tersebut diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman dan penguasaan ilmu yang benar, sehingga mampu menjawab tuntutan akan kebutuhan keahlian dalam menyusun perjanjian / perencanaan perjanjian, pelaksanaan, dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan bangunan khususnya dari aspek hukum.</p>		

IHP311	Hukum Kekayaan Intelektual	2 SKS
<p>Mata kuliah ini berusaha membekali mahasiswa untuk mengerti dan memahami tentang obyek pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Rangkaian Sirkuit Terpadu yang saat ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dapat menjadi aset ekonomi. Dengan memahami diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat baik untuk mengupayakan hak maupun dalam penegakan hukum.</p>		

IHP314	Syariah Ekonomi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami ekonomi syariah. Materi yang dipelajari mahasiswa meliputi trilogy ekonomi Islam, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, ekonomi Islam dalam aspek hukum, dan aspek hukum lembaga keuangan syariah yang semuanya merupakan dasar teoritis untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat</p>		

IHP315	Hukum Perlindungan Konsumen	2 SKS
<p>Semakin beragamnya jenis dan jumlah produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha menempatkan konsumen sebagai obyek dari pemasaran produk tersebut. Sementara itu kondisi konsumen sangat heterogen, terutama menyangkut tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi sehingga hal ini sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Berkenaan dengan hal tersebut, matakuliah ini akan mengkaji secara komprehensif hukum perlindungan konsumen terutama masalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, baik dari aspek perdata, pidana maupun administrasi negara.</p>		

IHP317	Penyelesaian Sengketa Alternatif	2 SKS
<p>Penegakan hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Dalam perkara perdata, inisiatif penegakan hukum sepenuhnya menjadi hak pihak (subyek hukum) yang bersangkutan, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan bebas untuk memilih cara-cara penegakan hukum yang dianggap efektif dan efisien. Oleh karena itu lembaga hukum alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) semakin penting untuk dipelajari tersendiri di luar materi penegakan hukum perdata melalui jalur pengadilan. Materi pembelajaran Mata Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pokoknya meliputi bentuk/forum alternatif penyelesaian sengketa dan keterkaitannya dengan kewenangan badan peradilan negara, serta badan/institusi/lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum melalui jalur non litigasi, dan prosedur (hukum acara) dalam alternatif penyelesaian sengketa. Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif dirancang untuk menghasilkan lulusan program sarjana hukum yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa alternatif.</p>		

IHP318	Perbandingan Hukum Pidana	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini adalah MK pengayaan yang berisi kajian Perbandingan Hukum Pidana yang ada dalam Keluarga Hukum Eropa Kontinental, Anglo-Saxon dan Keluarga Hukum Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Hukum Pidana Islam. Pada paruh semester pertama, kepada mahasiswa akan diberikan materi pengertian perbandingan hukum dan arti penting studi perbandingan hukum. materi akan dilanjutkan dengan perbandingan asas-asas hukum pidana dalam Keluarga Hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon terutama Inggris. Pada paruh semester berikutnya akan diisi dengan Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam yang meliputi Fiqh-Jinayah dan pemberlakuan Hukum Pidana Islam sebagaimana diatur dalam berbagai Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p>		

IHP319	Hukum Pidana Perekonomian	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini berisi tentang tindak pidana perekonomian yang timbul dalam bidang-bidang yang diatur dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP.</p> <p>Selanjutnya akan diuraikan tentang perkembangan peranan pemerintah dalam bidang perekonomian dan peraturan perundangan pidana yang mengatur hal tersebut, meliputi perumusan tindak pidana ekonomi, subjek hukum tindak pidana ekonomi, sanksi pidana serta eksistensi peraturan hukum pidana dibidang perekonomian. Mengurai masalah korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan serta menghambat pembangunan /perekonomian nasional, meliputi pengertian korupsi, korupsi dihubungkan dengan kejahatan jabatan, perkembangan perundangan-undangannya, rumusannya dan perluasan pengertian maupun penyimpangan-penyimpangannya, perkembangansanksi pidana serta hambatan-hambatan untuk mberantasannya.</p>		

Selanjutnya akan diuraikan tentang money laundry yang meliputi pengertian tindak pidana pencucian uang, sanksi dan masalah legal tindak pidana pencucian uang, penyidukan penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan perlindungan saksi dan korban.

IHP320	Hukum Media dan Tindak Pidana Pers	2 SKS
Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan media dan pers, aspek hukum media dan pers, perkembangan pengaturan delik pers dan hukum media, perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam delik pers, pembahasan terkait dewan pers, UU Pers dan larangan bagi pers dan media, ulasan tentang hak jawab-hak tolak-kewajiban koreksi, kajian tentang kode etik jurnalisme-kode etik wartawan, serta eksplorasi mengenai penyelesaian sengketa pers.		

IHP320	Hukum Media dan Tindak Pidana Pers	2 SKS
Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan media dan pers, aspek hukum media dan pers, perkembangan pengaturan delik pers dan hukum media, perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam delik pers, pembahasan terkait dewan pers, UU Pers dan larangan bagi pers dan media, ulasan tentang hak jawab-hak tolak-kewajiban koreksi, kajian tentang kode etik jurnalisme-kode etik wartawan, serta eksplorasi mengenai penyelesaian sengketa pers.		

IHP321	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	2 SKS
Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan pengaturan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia serta kebijakan pembedanaannya, tindak pidana narkotika dan kaitannya dengan tindak pidana lainnya, stelsel pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, pembentukan BNN dan kewenangannya, serta perlindungan terhadap pemakai narkotika dan korban tindak pidana narkotika.		

IHP322	Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini adalah MK pengayaan yang berisi kajian tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Paruh semester pertama akan diisi dengan kajian tentang TPPO (human trafficking) dan paruh semester berikutnya diisi tentang penyelundupan manusia (people smuggling). Kajian tentang TPPO diberikan adalah pengertian TPPO, latar belakang terjadinya TPPO, modus operandi TPPO dan penegakan hukum terhadap TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Selanjutnya kepada mahasiswa akan diberikan materi tentang penyelundupan manusia yang meliputi pengertian penyelundupan manusia dan perbedaan dengan TPPO, modus operandi penyelundupan manusia dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam MK ini juga akan diberikan materi tentang arti penting perlindungan terhadap Saksi dan Korban TPPO dan TP Penyelundupan Manusia.</p>		

IHP323	Hukum Pidana Internasional	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini membahas 2 (dua) materi penting yakni Hukum Pidana Internasional (Supranasional) dan Hukum Pidana Transnasional. Dalam materi kuliah pertamanya akan dibahas tentang pengertian dan perbedaan Hukum Pidana Internasional (Supranasional) dan Hukum Pidana Transnasional termasuk keberlakuannya, sumber hukum dan jenis-jenis tindak pidana, asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Internasional, terutama yang ada dalam Statuta Roma (International Criminal Court) dan keberlakuannya dalam suatu negara serta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam MK juga dibahas jenis-jenis tindak pidana transnasional yang sering terjadi sehingga dibutuhkan kerjasama antar negara untuk penegakan hukumnya. Selanjutnya akan dibahas penegakan hukum terhadap TP Internasional dan TP Transnasional. Dalam MK ini juga akan dibahas mengenai kerjasama internasional dalam bentuk pemberian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dan kerja Interpol yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum.</p>		

IHP324	Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini akan didahului dengan materi pencegahan korupsi yang isinya adalah materi Pendidikan Anti-Korupsi. Materi kuliah adalah pengertian korupsi dan perilaku koruptif dan pengertian integritas, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi dan integritas serta peran serta mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Setelah itu MK ini akan dilanjutkan dengan upaya penanggulangan korupsi yang meliputi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, tugas dan kewenangan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya kepada mahasiswa akan diberikan materi tentang kerjasama nasional dan internasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang meliputi pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dalam pemberantasan korupsi, termasuk pengenalan tentang tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dan pemberantasan/ penanggulangannya.</p>		

IHP325	Tindak Pidana Politik dan Terorisme	2 SKS
<p>Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan ruang lingkup tindak pidana politik yang meliputi: hakikat tindak pidana politik, sifat tindak politik politik (relative crime), parameter kejahatan politik yang meliputi perbuatan pidana tersebut ditujukan (1) untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara; (2) kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara; (3) . Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya;</p> <p>dan (4) . Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang; . Serta masalah ekstradisi terhadap kejahatan politik. Mempelajari pengertian dan ruang lingkup tindak pidana terorisme. tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimka siding. Perlindungan saksi dan korban yang berupa kompensasi restitusi dan rehabilitasi</p>		

IHP326	Sistem Peradilan Pidana	2 SKS
<p>Mata kuliah ini membahas tentang bekerjanya berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara efisien untuk mewujudkan penegakan hukum pidana, yang dibahas melalui Pendekatan Sistem, juga membahas tentang Karakteristik dan Cara Kerja Sistem Peradilan Pidana, Model-Model dalam Sistem Peradilan Pidana, Komponen komponen dalam Ssitem Peradilan Pidana, dan Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana.</p>		

IHP327	Ilmu Kedokteran Forensik	2 SKS
<p>Didalam penegakan hukum pidana melibatkan ilmu bantu yang salah satunya adalah Ilmu Kedokteran Forensik. Oleh karena itu perlu memberikan bekal kepada mahasiswa yang berkeinginan menjadi penegak hokum. Mata kuliah ini berisi tentang. Barang bukti medic, fungsi ilmu kedokteran forensic prosedur meminta bantuan ahli ilmu kedokteran forensik untuk memberikan terang suatu perkara pidana. Dalam matakuliah ini akan dibahas mengenai pengertian ilmu kedokteran forensik, sejarahnya, status dokter dalam proses peradilan pidana, bantuan dokter sebagai ahli, visum et repertum (ver) baik ver untuk orang yang sudah meninggal maupun ver untuk orang yang masih hidup,, otopsi meliputi otopsi mayat yang belum dikubur maupun mayat yang sudah di kubur, thanatologi, traumatologi, asfiksia, Kejahatan seksual, abortus dan identifikasi.</p>		

IHP328	Victimologi	2 SKS
<p>Mata kuliah Vitimololgi ini berisi tentang: Tipologi korban kejahatan, Faktor-faktor terjadinya korban, yang meliputi korban kejahatan-kejahatan konvensional, maupun kejahatan non konvensional, beberapa aspek kejahatan korporasi (white collar crime), kejahatan tanpa kekerasan, kejahatan seksual, Korban kejahatan dalam rumahTangga (KDRT), korban kejahatan dalam system system peradilan pidana.Santunan bagi korban, pertanggungjawaban pidana korporasi, Pengaturan ganti rugidalam KUHAP meliputi pasal-pasal yang mengaturnya serta hal-hal yang diatur dalam Bab tentang ganti rugi, Alasan Untuk menganjukan permintaan ganti rugi, Instansi yang memerikasa dan memutus tentang tuntutan ganti rugi, Acara pemeriksaan tentang tuntutan ganti rugi, relevansi ganti rugi dengan viktimologi, dasar-dasar pemikiran KUHAP tentang pengaturan ganti rugi, ketentuan-ketnuan pasal-pasal ganti rugi yang diatur dalam KUHAP.</p>		

IHP329	Hukum Pemerintah Daerah	2 SKS
<p>Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah ini akan melengkapi pemahaman mahasiswa terhadap sistem pemerintahan di Indonesia secara mendalam, karena mahasiswa akan diberikan materi-materi; Azas-azas Pemerintahan Daerah, Pengertian Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Demokrasi Pemerintahan Daerah, Pilkada, Eksekutif dan Legislatif Daerah di tingkat pemerintahan provinsi sampai dengan tingkat pemerintah desa. Untuk lebih mendalami materi tersebut, mahasiswa diarahkan dalam diskusi kelas dengan materi-materi tambahan yang terjadi dalam praktek pelaksanaan pemerintahan daerah</p>		

IHP330	Hukum Pemerintah Desa	2 SKS
<p>Reformasi politik dan demokrasi di Indonesia ditandai dengan runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Demokrasi itu sendiri merupakan proses tanpa akhir karena demokrasi merupakan kondisi tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, demokrasi di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan berkembang, yaitu demokrasi yang berdasar Pancasila yang masih terus berkembang dan konstitusional. Demokrasi politik di desa adalah demokrasi langsung, hubungan yang terjalin antara yang dipilih dan pemilih bisa langsung serta dapat berkomentar dan berargumentasi mengenai rencana program kerjanya melalui penyampaian visi dan misinya dan menilai pemilih bisa secara langsung calon-calon pemimpinnya. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dan rumah tangganya sendiri berdasar adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya sama dengan tujuan pemerintah, yaitu melindungi kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam skala lokal (desa). Oleh sebab itu mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pemerintahan desa melalui mata kuliah Pemerintah Desa yang meliputi Demokrasi Politik di Desa, Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Hubungan Kerja Pemerintah Desa dan Kerjasama Eksternal Pemerintah Desa, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.</p>		

IHP331	Hukum dan Demokrasi	2 SKS
<p>Hukum dan Demokrasi memberikan pemahaman tentang persoalan-persoalan teoritis dan praktis tentang hukum dan demokrasi. Karena itu pembahasan akan difokuskan pada definisi demokrasi, kekuatan dan kelemahan demokrasi, sejarah demokrasi di Yunani Kuno dan beberapa negara Eropa, Persoalan Demokrasi di Revolusi Prancis dan Perang Kemerdekaan Amerika; John Stuart Mill, J.J. Rousseau dan Demokrasi; Madison dan Alexis de Toqueville dan demokrasi, Marxisme dan Demokrasi; Demokrasi dan Delusi; Gelombang Demokrasi di Dunia Ketiga; sejarah demokrasi di Indonesia; demokrasi dan informasi di Indonesia; demokrasi dan perwakilan di Indonesia; demokrasi dan pluralisme hukum di Indonesia; demokrasi dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia; demokrasi dan minoritas di Indonesia; demokrasi dan urusan-urusan lain di Indonesia.</p>		

IHP332	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2 SKS
<p>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu sistem peradilan di dalam ketatanegaraan Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk hukum formil dari Hukum Tata Negara. Oleh sebab itu sebelum mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, mahasiswa terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami Hukum Tata Negara Materiil, sehingga mahasiswa nantinya di dalam mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang berarti. Hukum Acara ini harus diberikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa mempunyai pemahaman, pengetahuan serta pengalaman yang komperhenship terhadap sistem peradilan Tata Negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia.</p> <p>Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini meliputi materi muatan asas-asas dan karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kedudukan dan fungsi dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi, pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi umum dan khusus dalam undang-undang, Hukum Acara Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu, Pilpres dan Pemiluada, Hukum Acara Pembubaran Parpol, Hukum Acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p>		

IHP335	Hukum Sumber Daya Alam	2 SKS
<p>Mata Kuliah Hukum Sumber Daya Alam merupakan pendalaman dari hukum lingkungan yang secara khusus mendalami dari aspek kehutanan, pertambangan dan sumber daya air dalam konteks nasional maupun global (internasional).</p> <p>Mata Kuliah Hukum Sumber Daya Alam ini mempelajari hukum kehutanan, hukum pertambangan dan hukum sumber daya air, keterkaitan/ interdependensi satu sama lain, serta keterkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan hak masyarakat hukum adat, khususnya hak ulayat, serta penegakan hukumnya.</p> <p>Mata kuliah ini dirancang untuk menghasilkan lulusan program sarjana hukum yang ahli di bidang hukum kehutanan, hukum pertambangan dan hukum sumber daya air yang berwawasan lingkungan dan humanis.</p>		

IHP337	Hukum Kesehatan	2 SKS
<p>Matakuliah Hukum Kesehatan berbobot 2 SKS merupakan matakuliah pilihan, berisi tentang: Bab I. Pengertian Hukum Kesehatan, Bab II. Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum kesehatan dalam Sistem Hukum di Indonesia, Bab III. Sejarah Hukum Kesehatan, Bab IV. Perundang-undangan Bidang Kesehatan, Bab V. Profesi Bidang Kesehatan, Bab VI. Hubungan Terapeutik, Bab VII. Trilogi Dalam Pelayanan Kesehatan (Informed Consent, Rekam Medik dan Konfidensialitas Medik), Bab VIII. Malpraktek, Bab IX. Hospital Law dan Hospital Bylaws, Bab X. Aspek Hukum Kesehatan Masyarakat.</p>		

IHP339	Hukum Perdagangan Internasional	2 SKS
<p>Matakuliah ini mengajarkan peserta didik untuk lebih memahami dan mendalami aspek-aspek publik dan perdagangan internasional. Pentingnya perdagangan antar negara bagi kehidupan masyarakat dengan prinsip-prinsip seperti comparative advantage dan competitive advantage-nya, serta pergeseran peran trader, producer, dan buyer menjadi kajian awal dalam matakuliah ini. Selanjutnya, pengenalan terhadap lembaga-lembaga internasional terkait dengan dunia perdagangan seperti misalnya IMF, The World Bank Group, WIPO, UNCTAD, UNCITRAL, dsb diberikan guna memahami proses pembentukan perjanjian internasional dalam masyarakat internasional. Bagian utama dari matakuliah ini adalah memahami prinsip dan ketentuan dasar yang terkait dengan lembaga perdagangan internasional, WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa antar negara dalam bidang perdagangan menjadi kajian penutup dari matakuliah ini.</p>		

IHP341	Hukum Lingkungan Internasional	2 SKS
<p>Matakuliah ini bertujuan memberikan bekal pemahaman kepada mahasiswa mengenai hukum lingkungan internasional sebagai salah satu materi baru yang berkembang dalam hukum internasional. Dalam materi ini akan memberikan permasalahan-permasalahan terbaru yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan bagaimana masyarakat internasional merespon kebutuhan akan perlindungan lingkungannya. Mahasiswa juga diperkenalkan kepada lembaga-lembaga internasional yang menangani perkara-perkara lingkungan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan tidak saja memahami dari sisi kognitif tetapi sekaligus juga menumbuhkan rasa peduli akan kondisi</p>		

IHP342	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2 SKS
<p>Hukum udara dan Ruang Angkasa merupakan cabang dari hukum internasional yang membicarakan hubungan antar Negara mengenai penggunaan dan pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa untuk maksud- maksud damai seperti keselamatan dan keamanan jalur penerbangan, penggunaan orbit geostasionar (GSO) dan kegiatan peluncuran sateli-satelit di ruang angkasa, dan sebagainya. Materi yang didalami adalah terutama berkaitan dengan prinsip – prinsip umum yang berlaku berkaitan dengan kedaulatan Negara, perbedaan rezim hukum serta batas (delimitasi) wilayah udara dan ruang angkasa. Di samping itu dibahas juga mengenai pemanfaatan ruang angkasa. Disamping itu dibahas juga mengenai pemanfaatan ruang angkasa dan bertanggungjawaban Negara terhadap kegiatan ruang angkasa. Untuk memahami pokok-pokok materi tersebut maka perlu ditelaah perjanjian – perjanjian international mengenai pemanfaatan udara dan ruang angkasa seperti Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, Moon Treaty 1969, Regritration Convention 1975, dan Rescue Agreement 1968.</p>		

IHP344	Hukum Tata Ruang	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengertian dasar dalam penataan ruang; sejarah pengaturan tata ruang; peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang; kebijakan tata ruang dalam pembangunan, perizinan kegiatan usaha, permukiman dan perumahan, penataan permukiman kumuh, pelindungan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penataan ruang dalam penanggulangan bencana. Dalam mata kuliah ini dilengkapi dengan contoh-contoh kasus baik pengaturan dan pelaksanaannya sehingga mahasiswa mampu memberikan solusi atas permasalahan dalam kasus tersebut.</p>		

IHP345	Metode Penyelesaian Sengketa Internasioanl (MPSI)	2 SKS
<p>Mata kuliah ini merupakan pilihan bagi mahasiswa yang akan memperdalam pengetahuan mereka dalam hukum internasional terutama yang terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam masyarakat internasional. Mata kuliah ini memfokuskan diri kepada sengketa-sengketa publik yang melibatkan perseteruan antara Negara yang satu dengan Negara lainnya. Tidak termasuk dalam mata kuliah ini adalah sengketa-sengketa internasional yang terjadi diantara lembaga-lembaga private seperti perusahaan multinasional dan transnasional kecuali ketika masalah mereka menjadi bagian dari sengketa antar Negara di mana perusahaan tersebut terdaftar.</p>		

IHP348	Hukum Bioteknologi Dan Sumber Daya Alam Hayati	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengertian dasar dalam bioteknologi; perkembangan dan manfaat bioteknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati; sejarah pengaturan bioteknologi dalam pemanfaatan sumber daya lama hayati baik dalam sumber hukum internasional maupun hukum nasional; tantangan bagi Indonesia dalam pemanfaatan bioteknologi atas sumber daya alam hayati; dan permasalahan hukum dalam pemanfaatan bioteknologi pada sumber daya alam hayati. Dalam mata kuliah ini dilengkapi dengan contoh-contoh kasus baik pengaturan dan pelaksanaannya sehingga mahasiswa mampu memberikan solusi atas permasalahan dalam kasus tersebut.</p>		

IHP349	Hukum Penanggulangan Bencana	2 SKS
<p>Mata Kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengertian dasar dalam penanggulangan bencana; jenis-jenis bencana yang meliputi bencana alam dan non alam yang terdiri dari kegagalan teknologi, bencana dalam bidang kesehatan, kerusuhan sosial; sejarah pengaturan penanggulangan bencana; peraturan perundang-undangan dan standar minimal internasional dalam penanggulangan bencana; kegiatan penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan. Mata Kuliah ini juga dilengkapi contoh-contoh kasus yang terjadi sehingga mahasiswa mampu memberikan solusi atas permasalahan dalam kasus tersebut.</p>		

G. UNIT-UNIT PENDUKUNG

1. Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

BKBH merupakan unit yang menunjang pelaksanaan program penyelenggaraan bantuan hukum bagi lapisan masyarakat kurang mampu, yang merupakan salah satu realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma Pengabdian Kepada Masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKBH, telah diadakan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Katolik Soegijapranata dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di Semarang pada tanggal 14 September 2002. Sebagai unit pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian jasa konsultasi dan bantuan hukum dengan tujuan :

- a. Memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan di bidang hukum melalui penyuluhan hukum.
- b. Sebagai tempat latihan (magang) para mahasiswa untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terampil yang profesional dalam memecahkan masalah-masalah hukum secara kritis, sistematis, logis dan yuridis.

H. LABORATORIUM HUKUM

Dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa lulusan sarjana hukum yang ada saat ini belum tentu dapat menerapkan teori-teori hukum dan hukum positif pada situasi yang konkrit. Keadaan yang demikian itu antara lain disebabkan karena pendidikan ilmu hukum yang diberikan kepada mahasiswa, baru terdiri atas unsur teori dan hukum positif. Sedangkan unsur khusus tidak (belum) diberikan kepada mahasiswa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kemahiran hukum, maka sangat diperlukan laboratorium hukum. Oleh karena itu setiap fakultas hukum yang baik, mempunyai laboratorium hukum yang menyelenggarakan pendidikan kemahiran hukum (Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum / PLKH).

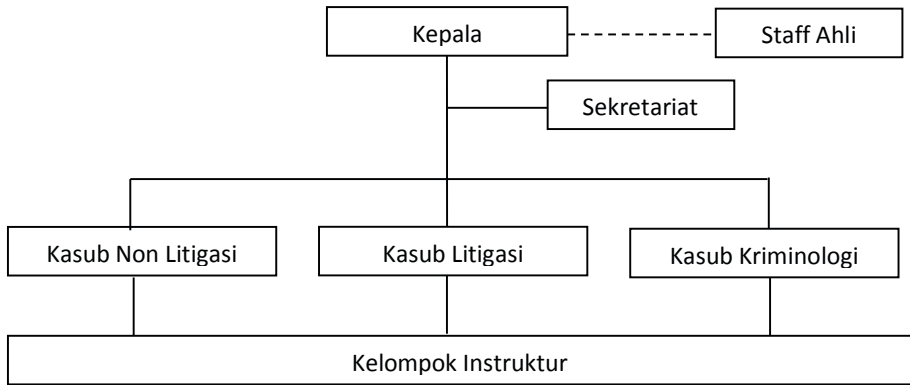
Adapun tujuan diadakannya laboratorium hukum adalah sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan kemahiran hukum dengan pendekatan terapan. Sedangkan materi yang diberikan adalah :

- 1) Metode dan teknik Pembuatan Akta Kontrak dan Akta Catatan Sipil;
- 2) Teknik Negosiasi Perusahaan;
- 3) Teknik Pembuatan Surat-Surat Keacaraan Pidana;
- 4) Teknik Pembuatan Surat-Surat Keacaraan Perdata;
- 5) Teknik Pembuatan Surat-Surat Keacaraan PTUN;
- 6) Teknik Penanganan Perkara Perselisihan Perburuhan;
- 7) Teknik Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- 8) Teknik Pendampingan Klien dan Negosiasi;
- 9) Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (*Legal Drafting*)

Selain itu, sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat, Laboratorium Hukum menyelenggarakan kursus / pelatihan dengan materi: hukum bisnis, kepaniteraan, hubungan industrial, dan materi-materi hukum praktis lainnya secara rutin setiap tahun.

Laboratorium Hukum terdiri dari :

- 1) Laboratorium Litigasi
- 2) Laboratorium Non Litigasi
- 3) Laboratorium Kriminologi



I. PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

Materi pendidikan kemahiran hukum (PLKH) yang diselenggarakan di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata adalah sebagai berikut:

a. Praktikum litigasi yang meliputi :

- 1) Praktikum pendampingan klien dan bantuan hukum
- 2) Praktikum teknik pembuatan surat surat keacaraan pidana
- 3) Praktikum teknik pembuatan surat surat keacaraan perdata
- 4) Praktikum teknik pembuatan surat surat keacaraan PTUN
- 5) Praktikum teknik penanganan perkara perburuhan
- 6) Praktikum teknik penanganan perkara perpajakan

b. Praktikum Non litigasi yang meliputi :

- 1) Praktikum metoda dan teknik pembuatan akta kontrak dan akta catatan sipil serta pengurusan surat surat resmi.
- 2) Praktikum teknik pembuatan peraturan perundang-undangan.
- 3) Praktikum teknik negosiasi perusahaan.

c. Laboratorium Kriminologi

Laboratorium kriminologi tidak menyelenggarakan praktikum tetapi hanya akan menyajikan informasi mengenai :

- 1) kriminalistik
- 2) Grapholi
- 3) Kriminal forensik
- 4) Kedokteran forensik

Bobot pendidikan kemahiran hukum yang diselenggarakan di laboratorium adalah 6 SKS. Demi tercapainya efektivitas, peserta kuliah dibagi dalam 2 kelas paralel. Jumlah mahasiswa tiap kelas maksimum 24 mahasiswa. Untuk menghindari banyaknya jumlah kelas paralel maka mata kuliah pendidikan dan latihan kemahiran hukum ditawarkan pada semester gasal dan genap. Praktikum dilaksanakan antara pukul 11.30-16.30 WIB, dengan waktu praktikum 2,5 jam setiap pertemuan.

Adapun persyaratan untuk pengambilan matakuliah PLKH adalah sebagai berikut :

a. Syarat Akademis :

Telah menempuh ujian matakuliah :

1. Hukum Tata Negara Lanjut / Hukum Pemerintah Daerah
2. Hukum Acara Pidana
3. Hukum Acara Perdata
4. Hukum Acara PTUN
5. Hukum Perburuhan
6. Hukum Perdata Lanjut / Hukum Perjanjian Bernama
7. Hukum Agraria
8. Hukum Pidana lanjut / Hukum Pidanaaan
9. Hukum Pajak
10. Hukum Dagang
11. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

b. Syarat Administrasi :

1. Mengisi KRS semester yang ditempuh dengan mencantumkan matakuliah PLKH dan direkomendasi oleh Dosen Wali;
2. Jumlah peserta maksimum 50 mahasiswa yang terbagi dalam 2 kelas.

c. Tata Tertib mengikuti PLKH

1. Hadir tepat pada waktunya sesuai jam praktikum;
2. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan praktikum yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum;
3. Wajib mengikuti praktikum minimal 75% dari program yang ditentukan;
4. Pada saat mengikuti praktikum peserta dilarang memakai sandal, kaos oblong;
5. Mahasiswa terlambat 15 menit tidak boleh mengikuti praktikum.

**d. Materi Plkh Litigasi Dan Non Litigasi :
Litigasi**

No	Materi Praktikum	Dosen/Instruktur	TM	Ket
1	Teknik Pembuatan surat-surat keacaraan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum. (K) Dr. Marcella Elwina S., SH.,CN.,H.Hum. 	11	
2	Teknik Pemuatan Surat-surat Keacaraan Perdata	<ul style="list-style-type: none"> Emanuel Boputra, SH.,MH. Alumni (Alumni Mengabdi) 	12	
3	Teknik pembuatan Surat-surat Keacaraan Pengadilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Hakim PTUN 	8	
4	Teknik pembuatan Surat-surat Keacaraan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Eko Nurmardiansyah, SH.MH. 	5	
5	Teknik Penanganan Perkara Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> Hotmauli Sidabalok, SH.,CN.,M.Hum. 	3	
6	Simulasi Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> Emanuel Boputra, SH.,MH.(K) Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum. 	4	

Non Litigasi

No	Materi Praktikum	Dosen/Instruktur	TM	Ket
1	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)	<ul style="list-style-type: none"> Yovita Indrayati, SH.,M.Hum.(K) Dr. Trihoni N. Dewi, SH.,M.Hum. 	10	
2	Teknik Pendapat Hukum (Legal Opinion)	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Trihoni N. Dewi, SH.,M.Hum.(K) PJ. Soepratignja, SH.,Sp.N. 	4	

3	Metode dan Teknik Pembuatan Akta kontrak dan catatan sipil serta pengurusan surat-surat resmi	<ul style="list-style-type: none"> • P.J. Soepratignja, SH.,Sp.N. (K) • B. Danang Setianto, SH., LL. M., M.I.L.Ph.D. • Dr. Endang Wahyati Y., SH.,MH. • Yoshua Putra D, SH.MKn. 	12	
4	Teknik Perjanjian dan Peraturan Internal Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Yovita Indrayati, SH.,M.Hum.(K) • Hotmauli Sidabalok, SH.,CN.,M.Hum. • I Gusti Nyoman Winardi, SH.MKn. 	5	
5	Teknik Negosiasi dan Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum. (K) • Dr. A. Joko Purwoko, SH.,M.Hum (K) • Drs. DP Budi Susetyo, M.Si. • Dr. Y. Budi Sarwo, SH.MH 	12	

J. PROSEDUR DAN PROSES BIMBINGAN SKRIPSI

Persyaratan dan Prosedur Permohonan

Untuk dapat mengajukan permohonan penyusunan Karya Ilmiah akhir (Skripsi), seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah mengumpulkan 110 SKS (minimal 106 SKS untuk matakuliah wajib dan 4 SKS untuk matakuliah pilihan);
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50
3. Telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan MPKH.
4. Mengisi formulir pendaftaran Penulisan Hukum dan diserahkan kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum dengan dilampiri:
 - a) KRS yang mencantumkan Penulisan Hukum,
 - b) Daftar kumpulan nilai kumulatif (print out Transkrip dan DKN Manual).

Ada dua pilihan prosedur dalam penulisan skripsi, yaitu yang merupakan kelanjutan MPKH atau yang merupakan proposal baru.

1. Penulisan skripsi sebagai kelanjutan MPKH:

- a) Mahasiswa menyerahkan Proposal yang sudah diseminarkan dan formulir pendaftaran skripsi dan persyaratan penulisan skripsi kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
 - b) Ketua Program Studi Ilmu Hukum menetapkan Dosen Pembimbing setelah berkoordinasi atau mendengar pertimbangan dari Koordinator Bagian,
 - c) Setelah mahasiswa mendapatkan Dosen Pembimbing, mahasiswa dapat melakukan proses bimbingan.
2. Penulisan skripsi yang berasal dari proposal baru:
- a) Mahasiswa mengajukan judul, permasalahan, dan tujuan penelitian kepada Koordinator Bagian,
 - b) Koordinator Bagian memeriksa Formulir Permohonan Penulisan Skripsi dan kelengkapannya. Untuk menghindari pengulangan dan tumpang tindih, maka Koordinator Bagian memeriksa hal-hal yang perlu diperhatikan, meliputi:
 - i. Judul,
 - ii. Permasalahan,
 - iii. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
 - c) Mahasiswa menyerahkan Formulir Permohonan Penulisan Skripsi dan persyaratan penulisan skripsi kepada Ketua Program Studi,
 - d) Ketua Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing dengan mempertimbangkan pendapat Koordinator Bagian,
 - e) Setelah mahasiswa mendapatkan Dosen Pembimbing, mahasiswa dapat melakukan proses bimbingan sampai dengan penulisan hukum/ skripsi selesai.

Batas Waktu Penyusunan Skripsi

1. Batas waktu maksimal penyusunan skripsi dengan judul yang sama ialah dua semester berturut-turut sejak dimasukkannya pertama kali ke dalam Kartu Rencana Studi.
2. Dalam hal-hal tertentu, Ketua Program Studi dapat memperpanjang batas waktu tersebut pada butir 1, sepanjang tidak melampaui batas maksimal program studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi (14 Semester).
3. Dalam hal mahasiswa memperoleh izin perpanjangan, Ketua Program Studi dapat menentukan apakah judul skripsi yang lama dapat diteruskan atau diganti dengan pertimbangan :
 - a) Perkembangan kemajuan pembimbing berdasarkan Buku Konsultasi Skripsi,
 - b) Alasan mahasiswa yang bersangkutan,
 - c) Pendapat dari (para) pembimbing.
4. Proses pembimbing berakhir pada saat Dosen Pembimbing memberikan persetujuan tertulis pada naskah skripsi.

5. Setelah skripsi diuji, apabila ada perbaikan dan setelah diadakan perbaikan dengan persetujuan Dosen Pembimbing, maka Skripsi baru dapat dicetak dan dijilid sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistematika dan Bentuk Skripsi

Akan diterbitkan tersendiri dalam buku petunjuk penulisan Skripsi

Majelis Penilai / Penilaian Akhir

Penilaian akhir ujian skripsi dilaksanakan oleh sebuah tim/majelis yang terdiri dari :

- 1) Pembimbing skripsi (pembimbing utama).
- 2) Dua orang penguji yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi

Pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Ujian dilaksanakan secara komprehensif dalam bentuk majelis. Komprehensif yang dimaksud adalah menyeluruh sesuai dengan materi skripsi,
2. Ujian hanya dapat dilaksanakan dalam jadwal waktu ujian skripsi yang ditetapkan oleh Program Studi,
3. Ujian dilaksanakan dalam Sidang Terbuka,
4. Lamanya waktu ujian maksimal 90 menit
5. Apabila penguji utama atau salah seorang penguji berhalangan hadir atas izin Dekan/ Ketua Program Studi , Penguji yang bersangkutan dapat mengadakan ujian tersendiri dengan disaksikan oleh salah seorang penguji lainnya atau pengawas yang ditunjuk dan memberikan penilaian terhadap penulisan skripsi yang diujikan.
6. Dalam hal salah seorang anggota penguji berhalangan, maka Ketua Program Studi dapat menunjukkan penggantinya dengan memperhatikan saran pembimbing utama.

Struktur Panitia Ujian Skripsi

Majelis Penilai terdiri dari :

- 1 orang Ketua (Pembimbing Utama merangkap Penguji)
- 2 orang Anggota (Penguji)

Penilaian Ujian Skripsi

1. Penilaian skripsi dilakukan oleh Majelis Penguji yang didasarkan pada 2 (dua) komponen :
 - a) Nilai Skripsi, meliputi substansi, alur (logika) pikir, tata tulis (kaidah) karya ilmiah;

- b) Nilai Ujian, meliputi kemampuan presentasi, menjawab pertanyaan penguji, argumentasi.
2. Dua komponen tersebut kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk setiap Majelis Penguji,
 3. Nilai Akhir Skripsi merupakan nilai rata-rata dari seluruh Majelis Penguji,
 4. Nilai angka dan konversi nilai huruf ditetapkan sebagai berikut :

NILAI ANGKA	NILAI HURUF
≥ 80	A
≥ 75	AB
≥ 70	B
≥ 65	BC
≥ 60	C
< 60	Tidak Lulus

5. Apabila mahasiswa dalam ujian skripsi dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk mengulang satu kali pada waktu yang ditetapkan oleh Majelis Penguji dengan persetujuan Ketua Program Studi.

Daftar Nama Pembimbing Skripsi

NO.	NAMA
1.	Dr. Marcella Elwina S., S. H., CN., Mhum.
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, S.H.,M.H.
3.	Dr. B. Resti Nurhayati, SH. M.Hum.
4.	Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S. H.,M.Hum.
5.	Dr. Endang Wahyati, S.H., M.H.
6.	Prof. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.
7.	Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
8.	B. Danang Setianto, SH., LL. M., M.IL.
9.	Emmanuel Boputra, SH.,MH.
10.	Dr. A. Joko Purwoko, SH.,M.Hum
11.	Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.
12.	Dr. Hotmauli Sidabalok, SH.,CN.,MH.
13.	P. Danardono, S.H., Mag.Hum.
14.	Yovita Indrayati, S.H., M.Hum.
15.	Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.

NO.	NAMA
16.	Dr. Eko Nurmardiansyah, SH.,M.Hum.
17	Yoshua Putra Dinata Naiborhu, SH.,M.Kn.
18	I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, SH.,M.Kn.

Lulusan Berprestasi

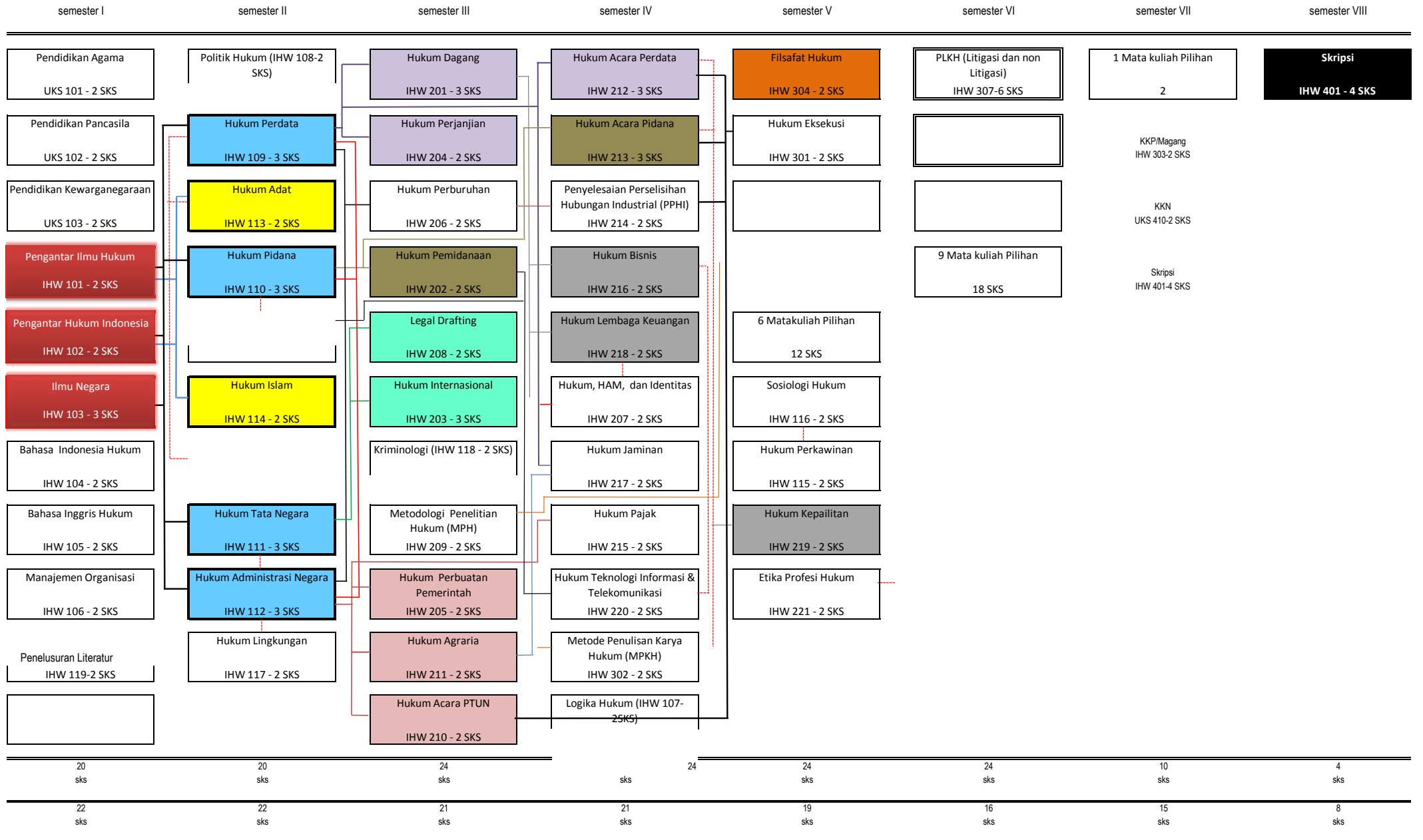
Daftar Lulusan Program Studi Hukum yang Dapat Menyelesaikan Studi dalam Waktu Kurang dari 4 Tahun dengan IPK di atas 3.5 dalam Enam Tahun Terakhir:

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
1	18.C1.0011	Nicolas Bayu Kusuma Aji	II Tahun 2022	3.60	3 tahun 8 bulan
2	18.C1.0005	Malachi	III Tahun 2022	3.55	3 tahun 11 bulan
3	18.C1.0013	Irawati Mustikaningrum	III Tahun 2022	3.65	3 tahu 11 bulan
4	18.C1.0024	Elita Evelyn Sutikja	III Tahun 2022	3.67	3 tahun 10 bulan
5	18.C1.0025	Laksamana Viggoutama T H	III Tahun 2022	3.72	3 tahun 10 bulan
6	18.C1.0029	Ezra Natasya	III Tahun 2022	3.72	3 tahun 10 bulan
7	18.C1.0049	Elisa Tiur Sinaga	III Tahun 2022	3.51	3 tahun 10 bulan
8	18.C1.0106	Maria Angelica Rukmanto	III Tahun 2022	3.60	3 tahun 10 bulan
9	18.C1.0136	Theodorus Steven Sitanggang	III Tahun 2022	3.85	3 tahun 11 bulan
10	18.C1.0138	Fathresia Gabella Purba	III Tahun 2022	3.57	3 tahun 10 bulan
11	19.C1.0004	Galuh Dini Mahardeka	I Tahun 2023	3.73	3 tahun 5 bulan
12	19.C1.0010	Melania Sylvia Fernanda	I Tahun 2023	3.81	3 tahun 4 bulan
13	19.C1.0027	Putri Sari Ageng Jaya Sampurna	I Tahun 2023	3.88	3 tahun 4 bulan
14	19.C1.0029	Rio Rivaldo	I Tahun 2023	3.56	3 tahun 4 bulan
15	19.C1.0031	Cinantya Tanaya Kusti Utami	I Tahun 2023	3.78	3 tahun 5 bulan
16	19.C1.0042	Aulia Brilianty Kesdu	I Tahun 2023	3.84	3 tahun 4 bulan
17	19.C1.0008	Kwee, Marcella Gracia Kuojaya	II Tahun 2023	3.95	3 tahun 7 bulan
18	19.C1.0019	Eugenia Natasha Tabares	II Tahun 2023	3.57	3 tahun 7 bulan
19	19.C1.0023	Novia Boedi Soebagio	II Tahun 2023	3.53	3 tahun 6 bulan
20	19.C1.0033	Nadya Graceana Putri Santoso	II Tahun 2023	3.54	3 tahun 7 bulan
21	19.C1.0064	Thomas Surya Awangga Budiono	II Tahun 2023	3.94	3 tahun 8 bulan
22	19.C1.0066	Lala Marsella	II Tahun 2023	3.61	3 tahun 7 bulan

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
23	19.C1.0135	Surya Alam Indrajaya	II Tahun 2023	3.62	3 tahun 7 bulan
24	19.C1.0141	Nur Pujiati	II Tahun 2023	3.58	3 tahun 8 bulan
25	19.C1.0155	Zein Cannonetta	II Tahun 2023	3.60	3 tahun 6 bulan
26	19.C1.0142	Mohamad Hani Anindito	III Tahun 2023	3.62	3 Tahun,9 Bulan
27	19.C1.0044	Rani Erdiana	III Tahun 2023	3.65	3 Tahun,10 Bulan
28	19.C1.0056	Ajeng Salsabila Andini Putri	III Tahun 2023	3.65	3 Tahun,10 Bulan
29	19.C1.0072	Nadya Maharani	III Tahun 2023	3.65	3 Tahun,11 Bulan
30	19.C1.0016	Sherin Gultom	III Tahun 2023	3.70	3 Tahun,11 Bulan
31	19.C1.0124	Bernica Putri Fasius	III Tahun 2023	3.94	3 Tahun,9 Bulan
31	20.C1.0004	Elizabeth Vania Angkawidjaja	I Tahun 2024	3.87	3 Tahun 4 bln
32	20.C1.0013	Timothea Sharleen Sumaatmadja	I Tahun 2024	3.87	3 Tahun 4 bln
33	20.C1.0012	Laylatulia Magdani Firmandaputri	I Tahun 2024	3.81	3 Tahun 3 bln
34	20.C1.0049	Bernadita Gea Puspita	I Tahun 2024	3.81	3 Tahun 4 bln
35	20.C1.0070	Maria Lintang Maheswari	I Tahun 2024	3.80	3 Tahun 4 bln
36	20.C1.0118	Vicko Vanessa Grazetta	I Tahun 2024	3.80	3 Tahun 4 bln
37	20.C1.0041	Franzito Risky Milliano	I Tahun 2024	3.79	3 Tahun 4 bln
38	20.C1.0130	Elga Agrippina Gatama Simatupang	I Tahun 2024	3.78	3 Tahun 4 bln
39	20.C1.0099	Ardiani Kusuma Dewi	I Tahun 2024	3.76	3 Tahun 4 bln
40	20.C1.0005	Regita Cahyani Rachman	I Tahun 2024	3.73	3 Tahun 4 bln
41	20.C1.0123	Diana Dwi Sulistyowati	I Tahun 2024	3.65	3 Tahun 4 bln
42	20.C1.0101	Ludwina Pastika Purwanto	I Tahun 2024	3.59	3 Tahun 3 bln
43	20.C1.0016	Lie, Filbert Julio	I Tahun 2024	3.57	3 Tahun 4 bln
44	20.C1.0066	Octova Vindra Maldini	I Tahun 2024	3.56	3 Tahun 4 bln
45	20.C1.0002	Ika Setiyawati	I Tahun 2024	3.53	3 Tahun 4 bln
46	20.C1.0006	Virgiawan Adi Yoga	II Tahn 2024	3,55	3 Tahun 8 Bulan
47	20.C1.0009	Florencia Amabelle Widyasthika	II Tahn 2024	3,51	3 Tahun 8 Bulan
48	20.C1.0010	Arista Windi Utami	II Tahn 2024	3,57	3 Tahun 8 Bulan
49	20.C1.0018	Yemima Emmanuella Alexandra	II Tahn 2024	3,70	3 Tahun 7 Bulan
50	20.C1.0048	Carissa Vania Edgar	II Tahn 2024	3,78	3 Tahun 8 Bulan

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
51	20.C1.0100	Reyna Prajna Paramitha	II Tahn 2024	3,55	3 Tahun 4 Bulan
52	20.C1.0103	Frenky	II Tahn 2024	3,65	3 Tahun 8 Bulan
53	20.C1.0125	Novena Margaretha Sinurat	II Tahn 2024	3,83	3 Tahun 7 Bulan

DIAGRAM ALIR MATAKULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



- - - - - co syarat	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW102, IHW101, IHW103	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW109	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW111	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW201	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW213, IHW212, IHW210, IHW208, IHW214, IHW215	Syarat KKN: lulus 100 sks dan IPK ≥ 2,00
	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW102, IHW101	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW110	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW110	 matakuliah yang memiliki prasyarat IHW109, IHW110, IHW112	PRASYARAT MK PILIHAN DAPAT DILIHAT DI DIAGRAM MK PILIHAN	Syarat Skripsi: lulus 110 sks, terdiri dari 106 SKS wajib, 4 SKS MK pilihan, IPK > 2,50

BAB III

INFORMASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Dengan mempertimbangkan sumber daya yang telah dimiliki, Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang membuka program studi Ilmu Komunikasi Strata 1 (S1) pada tahun 2013. Pembukaan program studi baru ini dimaksudkan untuk mendorong lahirnya para ahli yang trampil dan berwawasan luas dalam bidang komunikasi, yang diharapkan akan mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, baik swasta maupun pemerintah, disamping mampu membuka lapangan pekerjaan di bidang komunikasi dan industri media. Dengan menerapkan sistem perkuliahan yang berbasis *student centre learning* dalam membangun *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa didorong aktif mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan tidak hanya melalui perkuliahan, tetapi juga melalui seluruh kegiatan pembelajaran, misalnya diskusi kelompok, praktikum, kuliah kerja praktek, bakti masyarakat, dan lain lain. Wawasan keilmuan di bidang komunikasi dipadu dengan latihan ketrampilan, kepekaan sosial, dan profesionalitas akan menjadikan lulusan program studi Ilmu Komunikasi menjadi sarjana komunikasi yang mumpuni dan profesional. Sebagai dasar gerak, program studi Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang mempunyai visi, misi, dan tujuan. Terakreditasi “UNGGUL” sesuai dengan SK BAN-PT Nomor 728/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2029.

VISI, MISI, TUJUAN

Dengan mendasarkan pada visi dan misi Universitas Katolik Soegijapranata serta visi dan misi Fakultas Hukum dan Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi menetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

Visi

Menjadi program studi rujukan di tingkat nasional pada tahun 2030 dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komunikasi yang etis, humanis, kreatif dan berwawasan lokal-global dengan berlandaskan nilai-nilai Kristiani.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang komunikasi yang berlandaskan nilai etis, humanis, kreatif, dan berwawasan lokal-global.
2. Mengelola program studi berdasarkan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil, serta melaksanakan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komunikasi berlandaskan nilai-nilai etis, humanis, kreatif dan berwawasan lokal-global.
2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi yang bermanfaat social.
3. Mewujudkan tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil melalui sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan kerja sama dan kemitraan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

EVALUASI KURIKULUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi mewajibkan kurikulum Sarjana Strata 1 yang disesuaikan dengan KKNi Level 6.

Evaluasi atau peninjauan kurikulum dilaksanakan didasarkan atas Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012; Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013; Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015; dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur di tingkat nasional dan tingkat universitas.

Kurikulum Pendidikan Tinggi harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi yang dituangkan dalam Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester dll sesuai dengan amanat Kurikulum KKNi. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi. Untuk jenjang kualifikasi Program Sarjana Strata-1, harus diterapkan Kurikulum KKNi Jenjang KKNi Level-6.

Untuk itulah pada kesempatan ini, maka Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi ditinjau ulang berdasarkan evaluasi dengan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) baik internal maupun eksternal.

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Landasan perancangan dan pengembangan Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Ex-Corde Ecclesiae

B. Landasan Historis

Landasan historis perancangan dan pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi adalah Visi, Misi dan Tujuan pembentukan Program Studi Ilmu Komunikasi pada saat awal pembentukan dan perkembangan keilmuan ilmu komunikasi serta perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi perkembangan keilmuan ilmu komunikasi.

C. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis perancangan dan pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi adalah kebutuhan perkembangan keilmuan bidang komunikasi yang dikaitkan dengan isu-isu bidang komunikasi diantaranya kebutuhan pengembangan konsentrasi komunikasi strategis dan jurnalisme serta kebutuhan pasar yang mengharuskan program studi untuk terus-menerus memperbarui serta meninjau ulang kurikulum agar lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dapat bersaing di tengah-tengah perubahan serta perkembangan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi.

Dibutuhkan keahlian khusus di bidang komunikasi untuk melayani berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat mengingat berbagai perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya baik dalam bidang serta inovasi terkait dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi.

D. Landasan Psikologis

Perancangan dan pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi dibuat berlandaskan pada pemikiran bahwa proses pembelajaran adalah suatu proses dimana terjadi perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pengalaman belajar ini diperoleh dari interaksi antara mahasiswa dan lingkungannya untuk secara kritis memecahkan beragam masalah yang dapat atau telah ditemui dengan menggunakan metode ilmiah.

Proses belajar adalah proses memahami sesuatu masalah dan dapat memecahkan masalah tersebut secara kritis berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh selama proses belajar. Hal ini mengandung makna adanya penyesuaian antara penguasaan pengetahuan, penentuan sikap dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dimiliki. Dalam proses pembelajaran mahasiswa bersikap aktif mengolah bahan pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, survei, pengalaman karya wisata (studi banding), dan keaktifan belajar mandiri dengan membaca bahan pembelajaran dari Dosen maupun di perpustakaan.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata No. 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Profil Lulusan

Dalam rancangan kurikulum baru, Program Studi Ilmu Komunikasi memerinci dan menetapkan profil dan deskripsi profil lulusan sebagai berikut:

No.	Profil	Deskripsi Profil
1.	Pengembang Keilmuan Komunikasi	Asisten Peneliti yang cakap melakukan riset secara kritis dan komprehensif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi berdasarkan landasan profesional-etis.
2.	Profesional Bidang Industri Media	Jurnalis, Sineas, Announcer, Content Creator, Konsultan Media, Fotografer, Videografer, Copywriter, Desainer Grafis, Pengelola Media Sosial
3.	Profesional Bidang Komunikasi Strategis	Humas Pemerintah, Public Relations (PR), Fasilitator, Penyuluh, Konsultan Komunikasi Politik, Konsultan Komunikasi Pembangunan, Mediator, Marketer
4.	Kewirausahaan Sosial	Pekerja Sosial, Event Organizer

B. Standar Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi harus memiliki:

1. **Aspek Sikap** etis, profesional, jujur, disiplin, berintegritas dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta memiliki semangat cinta kasih kepada sesama.

2. **Aspek Pengetahuan** untuk menguasai serta mengembangkan teori ilmu komunikasi untuk menyelesaikan berbagai isu di bidang komunikasi yang timbul dalam masyarakat.
3. **Aspek Ketrampilan Umum** untuk menerapkan dan mengembangkan teori komunikasi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.
4. **Aspek Ketrampilan Khusus** menggunakan teori komunikasi dan ketrampilan yang diperoleh pada saat kuliah sebagai sarana untuk memecahkan berbagai persoalan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan bidang komunikasi yang telah diperoleh semasa kuliah.

C. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)

CPL disusun oleh Program Studi berdasarkan analisis kebutuhan (market signal) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (scientific vision) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah.

Berdasarkan Profil Lulusan, berikut CPL yang ditetapkan dalam Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai berikut:

1. Aspek Sikap

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi harus memiliki aspek sikap sebagai berikut:

Kode	Aspek Sikap
S-1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S-3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;
S-5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;

Kode	Aspek Sikap
S-6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pengembangan ilmu komunikasi;
S-9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian dalam lingkup ilmu komunikasi secara mandiri; dan
S-10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam kajian ilmu komunikasi.

2. Aspek Pengetahuan

Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi harus menguasai Aspek Pengetahuan sebagai berikut:

Kode	Aspek Pengetahuan
S-1	Konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, maupun dalam berbagai konteks komunikasi;
S-2	Konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi;
S-3	Proses penyusunan rencana, implementasi, monitoring dan pengembangan program komunikasi;
S-3	Konsep, kaidah, dan proses penelitian komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi;
S-4	Pengetahuan tentang regulasi dan etika terkait bidang komunikasi;
S-5	Pemahaman untuk mengolah, menganalisis, serta menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital;
S-6	Pemahaman tentang peri kemanusiaan (humanities) dalam berbagai konteks komunikasi;
S-7	Berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS), misalnya: komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, logika komputasi, welas asih dan tanggung jawab kewarganegaraan;
S-8	Pengetahuan tentang era industri dan perkembangannya, serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kontemporer sesuai dengan kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global;

Kode	Aspek Pengetahuan
S-9	Pengetahuan yang diperoleh di luar program studi melalui program MBKM.
S-10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam kajian ilmu komunikasi.

3. Aspek Ketrampilan Umum

Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi harus menguasai aspek Ketrampilan Umum sebagai berikut:

Kode	Aspek Pengetahuan
KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
KU-3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
KU-4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU-5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian komunikasi, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
KU-6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
KU-7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
KU-8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

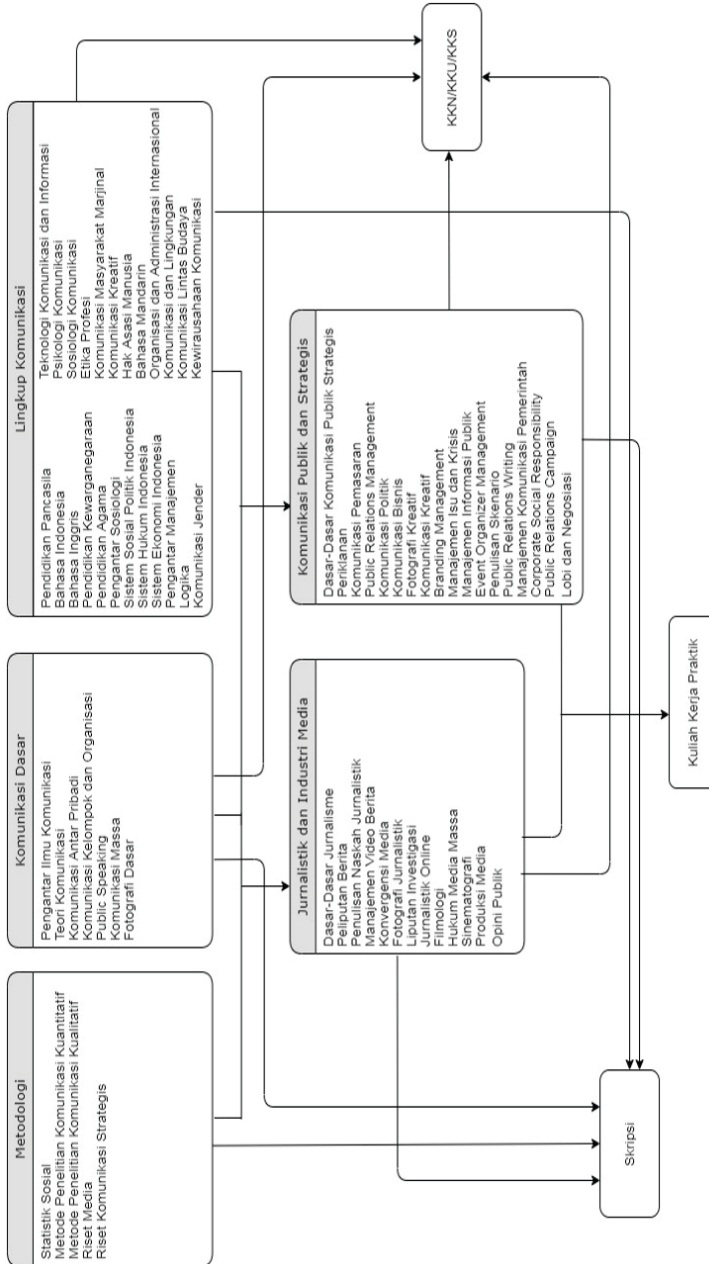
Kode	Aspek Pengetahuan
KU-9	Mampu memverifikasi, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
KU-10	Menguasai minimal satu bahasa asing untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.

4. Aspek Ketrampilan Khusus

Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi wajib harus menguasai Aspek Ketrampilan Khusus sebagai berikut:

Kode	Aspek Pengetahuan
KK-1	Mampu merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan, menggunakan beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku;
KK-2	Mampu melakukan analisis atau kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan;
KK-3	Mampu merencanakan dan melaksanakan suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan;
KK-4	Mampu merencanakan, mewujudkan dan memublikasikan karya komunikasi berbasis data, sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital;
KK-5	Mampu merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan memublikasikan hasil penelitian komunikasi dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah bidang ilmu komunikasi;
KK-6	Menguasai keterampilan komunikasi yang mendasar yaitu public speaking dan produksi multimedia.

ALUR KURIKULUM 2018



ALUR KURIKULUM 2023



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.). RPS diperbarui apabila terdapat fenomena baru terkait hasil penelitian atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Dosen atau Dosen bersama mahasiswa. Tanggungjawab perancangan dan pembuatan RPS ada pada Dosen pengampu atau Tim Dosen pengampu mata kuliah yang ditunjuk oleh Program Studi dengan dikoordinatori oleh Koordinator Mata Kuliah apabila mata kuliah diampu oleh Tim Dosen (team teaching). Dokumen RPS terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum ini.

MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Berdasarkan Statuta Universitas dan Peraturan Universitas tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kurikulum dilaksanakan oleh Program Studi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan internal universitas tentang penyelenggaraan pendidikan. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran juga dilaksanakan berdasarkan SK Dekan tentang Peraturan Akademik di tingkat Fakultas.

Dalam rangka menjamin kualitas lulusannya agar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) telah ditetapkan Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata No. 01/G/PER/I/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Soegijapranata, oleh sebab itu, seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan sesuai kebijakan tersebut antara lain tentang ketentuan Standar Pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi Program Studi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Penjaminan mutu bidang pendidikan di fakultas dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dengan dikoordinatori oleh Koordinator GPM.

PENUTUP

Demikian Dokumen Kurikulum ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pedoman dalam proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

Pedoman Konversi Mata Kuliah (Kurikulum 2018 ke Kurikulum 2023)

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata menyelenggarakan perubahan kurikulum dari Kurikulum 2018 ke Kurikulum 2023 berbasis KKNi dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Kurikulum 2023 berlaku mulai semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 untuk Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata angkatan 2023
2. Kurikulum 2018 berlaku untuk untuk mahasiswa angkatan 2022, 2020, 2021, 2020 dan angkatan yang belum tutup teori
3. Kurikulum 2023 Prodi Ilmu Komunikasi SCU dapat diunduh melalui google drive.

B. Semester Transisi

1. Semester transisi diselenggarakan paling cepat 1 tahun setelah tahun ajaran 2023/2024
2. Syarat dan ketentuan pengajuan mata kuliah pada semester transisi mengacu pada pedoman konversi.
3. Bagi mahasiswa yang mengalami penurunan IPK akibat konversi kurikulum namun tidak mengajukan penyesuaian yang divalidasi oleh dosen pembimbing konversi dan Ketua Prodi Ilmu Komunikasi pada waktu yang telah ditentukan, maka sistem akan melakukan konversi secara langsung tanpa penyesuaian.

ATURAN KONVERSI NILAI MATA KULIAH

1. ATURAN PERTAMA: Konversi Langsung

Nilai Mata Kuliah (MK) lama yang dikonversi langsung sebagai nilai Mata Kuliah baru dengan jumlah SKS disesuaikan dengan SKS Mata Kuliah baru.

Contoh:

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
1	KOMW101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	A	IKW 101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	A
2	KOMW104	Public Speaking	3	B	IKW 106	Public Speaking	2	B

Adapun mata kuliah yang termasuk kedalam aturan ini adalah sebagai berikut:

a. Mata Kuliah dengan SKS tetap

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
1	KOMW101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	1	IKW 101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	1
2	KOMW105	Fotografi Dasar	3	1	IKW 105	Fotografi Dasar	3	1
3	UKS 102	Pendidikan Pancasila	2	1	UKS 102	Pendidikan Pancasila	2	1
4	UKS 104	Bahasa Indonesia	2	1	UKS 104	Bahasa Indonesia	2	1
5	KOMW201	Teori Komunikasi	3	3	IKW 109	Teori Komunikasi	3	2
6	KOMW106	Komunikasi Antar Pribadi	3	2	IKW 110	Komunikasi Antar Pribadi	3	2
7	KOMW203	Statistik Sosial	3	3	IKW 111	Statistik Sosial	3	2
8	KOMW211	Kebijakan Komunikasi	3	4	IKW 104	Sistem Hukum Indonesia	3	1
9	KOMW108	Komunikasi Massa	3	2	IKW 112	Komunikasi Massa	3	2
10	UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1	UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
11	KOMW113	Psikologi Komunikasi	3	2	IKW 202	Psikologi Komunikasi	3	3
12	UKS 101	Pendidikan Agama	2	1	UKS 101	Pendidikan Agama	2	3
13	KOMW204	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3	3	IKW 211	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3	4
14	MK302	Naskah Media	3	5	KJW 212	Teknik Menulis Berita	3	4
15	MK306	Jurnalistik Online	3	6	KJW 302	Jurnalistik Online	3	5
16	MK308	Kebijakan Media	3	6	KJW 305	Hukum Media Massa	3	5
17	KS308	Event Organizer Management	3	6	KPW 301	Event Organizer Management	3	5
18	KS305	Riset Komunikasi Strategis	3	6	KPW 304	Riset Komunikasi Strategis	3	5

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
19	UKS410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)/ Kuliah Kerja Usaha (KKU)/ Kuliah Kerja Sinergis (KKS)	2	6	UKS 410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2	7
20	KOMW301	Proposal Tugas Akhir	2	6	IKP 325	Teknik Penulisan Efektif	2	5
21	KOMW402	Skripsi	4	8	IKW 402	Skripsi/ Tugas Akhir	4	8
22	KOMP314	Public Relations Writing	2	6	KPW 214	Public Relations Writing	2	4
23	KOMP304	Hak Asasi Manusia	2	5	KJW 303	Hak Asasi Manusia	2	5
24	KOMP302	Komunikasi Bisnis	2	5	IKP 327	Komunikasi Bisnis	2	5
25	KOMP310	Sinematografi	2	6	KJW 313	Sinematografi	2	6
26	KOMP315	Komunikasi Pemerintahan	2	6	KPW 310	Manajemen Komunikasi Pemerintahan	2	6
27	KOMP313	Lobi dan Negosiasi	2	6	KPW 312	Lobi dan Negosiasi	2	6
28	KOMP311	Penulisan Skenario	2	6	IKP 306	Penulisan Skenario	2	6
29	KOMP312	Produksi Media	2	6	IKP 308	Produksi Media	2	6
30	KOMP301	Kajian Komunikasi Internasional	2	5	IKP 317	Organisasi dan Administrasi Internasional	2	6
31	KOMP319	Capacity Building	2	6	IKP 331	Pengembangan Personalitas	2	5

b. Mata Kuliah dengan SKS bertambah

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
1	KOMW104	Public Speaking	3	1	IKW 106	Public Speaking	2	1
2	KOMW107	Komunikasi Kelompok dan Organisasi	3	2	IKW 113	Komunikasi Organisasi	2	2

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
3	KOMW112	Filsafat Komunikasi	3	2	IKW 201	Logika	2	3
4	KOMW213	Pengantar Jurnalisme	3	4	IKW 206	Dasar-dasar Jurnalisme	2	3
5	KOMW214	Dasar-Dasar Komunikasi Strategis	3	4	IKW 207	Dasar-dasar Komunikasi Publik dan Strategis	2	3
6	KOMW206	Komunikasi Lingkungan	3	3	IKW 208	Hukum Lingkungan	2	3
7	KOMW109	Komunikasi Lintas Budaya	3	2	IKW 210	Komunikasi Lintas Budaya	2	3
8	KOMW110	Teknologi Komunikasi dan Informasi	3	2	IKW 214	Teknologi Komunikasi dan Informasi	2	4
9	MK301	Reportase	3	5	KJW 211	Teknik Peliputan	2	4
10	MK303	Digital News Production	3	5	KJW 213	Produksi Berita Televisi dan Radio	2	4
11	KS303	Public Relations Management	3	5	KPW 212	Public Relations Management	2	4
12	MK304	Konvergensi Media	3	5	KJW 307	Konvergensi Media	2	5
13	KOMW202	Komunikasi Jender	3	3	IKP 328	Komunikasi dan Jender	2	5
14	KS304	Komunikasi Politik	3	5	IKP 332	Komunikasi Politik	2	5
15	KOMW401	Kuliah Kerja Praktik	4	7	IKW 301	Kuliah Kerja Praktek	3	6
16	KOMW111	Opini Publik	3	2	KJW 310	Opini Publik	2	6
17	KS306	Komunikasi Krisis	3	6	KPW 315	Manajemen Isu dan Krisis	2	6
18	KS307	Tata Kelola Informasi Publik	3	6	IKP 315	Manajemen Informasi Publik	2	6
19	KOMW212	Komunikasi Masyarakat Marjinal	3	4	IKP 302	Komunikasi Masyarakat Marjinal	2	6

c. Mata Kuliah dengan SKS berkurang

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
1	KOMP316	Corporate Social Responsibility	2	6	KPW 213	Corporate Social Responsibility	3	4
2	KOMP307	Liputan Investigasi	2	5	KJW 304	Liputan Investigasi	3	5
3	KOMP306	Fotografi Jurnalistik	2	5	KJW 306	Foto Jurnalistik	3	5
4	KOMP317	Public Relations Campaign	2	6	KPW 302	Public Relations Campaign	3	5
5	KOMP303	Fotografi Kreatif	2	5	KPW 306	Fotografi Kreatif	3	5

2. ATURAN KEDUA : Konversi Penggabungan

Beberapa nilai Mata Kuliah (MK) lama yang dikonversi sebagai satu nilai Mata kuliah baru dengan jumlah SKS yang disesuaikan dengan SKS Mata kuliah baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika sudah memiliki nilai dari dua atau lebih MK lama yang dikonversi menjadi satu MK baru maka nilai MK baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu MK lama.
2. Jika hanya memiliki salah satu nilai MK lama, maka langsung dikonversi menjadi nilai MK baru.
3. Mahasiswa yang memiliki salah satu atau dua nilai dari MK lama, jika ingin mengulang maka harus mengulang MK baru.

Contoh :

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	NILAI BARU	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	NILAI LAMA
1	KOMP305	Bahasa Inggris	2	A	UKS 109	Bahasa Inggris	2	B
					IKW 114	English for Communication	2	A
2	KOMW210	Kewirausahaan Komunikasi	3	B	IKW 401	Media Entrepreneurship	2	B
					IKW 107	Sistem Ekonomi Indonesia	2	C

Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut:

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	SE-MES-TER	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	SE-MES-TER
1	KOMW102	Sosiologi Komunikasi	3	1	IKW 102	Pengantar Sosiologi	2	4
					IKW 215	Sosiologi Komunikasi	2	1
2	KOMW103	Sistem Sosial Politik Indonesia	3	1	IKW 103	Pengantar Ilmu Politik	2	1
					IKW 203	Sistem Politik Indonesia	2	3
3	KOMP305	Bahasa Inggris	2	5	UKS 109	Bahasa Inggris	2	1
					IKW 114	English for Communication	2	2
4	KOMW210	Kewirausahaan Komunikasi	3	4	IKW 401	Media Entrepreneurship	2	7
					IKW 107	Sistem Ekonomi Indonesia	2	2
5	KOMP308	Manajemen Komunikasi	2	5	IKW 108	Pengantar Manajemen	2	2
					IKP 330	Protokoler	2	7
6	KOMP309	Bahasa Mandarin	2	5	IKW 115	Bahasa Mandarin I	2	2
					IKW 209	Bahasa Mandarin II	2	3
7	KOMW209	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	3	4	IKW 204	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	3	3
					IKW 205	Semiotika	2	3
8	KS301	Periklanan	3	5	IKW 212	Periklanan	2	3
					KPW 307	Copywriting Periklanan	2	5
					IKP 301	Periklanan Internasional	2	6

NO	KODE MK	MATA KULIAH BARU	SKS	SE-MES-TER	KODE MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	SE-MES-TER
9	KOMW205	Komunikasi Visual	3	3	IKW 213	Komunikasi Visual	2	4
					KPW 303	Desain Komunikasi Visual	3	5
					IKP 303	Desain Surat Kabar dan Majalah	2	6
10	KOMW216	Etika Profesi	3	4	IKP 331	Etika Bisnis	2	7
					IKW 216	Etika Komunikasi	3	4
					KJW 314	Etika Jurnalisme	2	6
					KPW 313	Etika Kehumasan	2	6
11	MK305	Riset Media	3	6	KJW 214	Analisis Isi dan Framing	2	4
					KJW 301	Riset Media	3	5
					KJW 308	Dokumentasi Media	2	6
12	KS302	Komunikasi Pemasaran	3	5	KPW 317	Komunikasi Pemasaran	2	4
					IKP 307	Consumer Behaviour	2	7
13	KOMP318	Branding Management	2	6	KPW 305	Branding Management	2	5
					IKP 329	Hak Atas Kekayaan Intelektual	2	7
14	KOMW207	Komunikasi Kreatif	2	3	IKP 333	Komunikasi Inovatif dan Kreatif	2	5
					IKP 326	Creative and Innovative Thinking	2	7

3. ATURAN KETIGA : Mata Kuliah dengan syarat wajib mengikuti kelas transisi

Jika MK baru bukan merupakan hasil konversi langsung maupun penggabungan dari dua atau lebih mata kuliah lama maka mahasiswa diwajibkan mengikuti kelas transisi untuk memenuhi syarat konversi menjadi nilai mata kuliah baru. Mahasiswa yang telah memiliki nilai dari MK lama, jika ingin mengulang maka harus mengambil MK baru.

Adapun Mata Kuliah yang termasuk kedalam aturan ini adalah sebagai berikut:

No.	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Semester
1	MK307	Filmologi	3	6
2	KOMW208	Komunikasi Digital	3	3
3	KOMW215	Dasar-Dasar Media Kreatif	3	4

4. ATURAN KEEMPAT : Aturan Tambahan

- a. Secara keseluruhan jumlah SKS dalam konversi dari kurikulum 2018 kedalam kurikulum 2023 berkurang, dari 146 SKS menjadi 144 SKS. Prodi menjamin bahwa IPK setelah konversi minimal akan sama dengan IPK sebelum konversi dengan teknis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa.
- b. Nilai minimal kelulusan mata kuliah pada kurikulum 2023 mengikuti peraturan penyelenggaraan pendidikan universitas.

DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER

Lampiran

FORM KONVERSI MATA KULIAH KURIKULUM LAMA (2018) KE MATA KULIAH KURIKULUM BARU (2023)

Lampiran

B. Pembagian Mata Kuliah Tiap Semester (Kurikulum 2023)



Info lebih lengkap scan qrcode
atau klik:
http://bit.ly/MaKul_IK_2023

SEMESTER 1

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	KOMW101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3
2	UKS 102	Pendidikan Pancasila	2
3	UKS 104	Bahasa Indonesia	2
4	KOMW102	Sosiologi Komunikasi	3
5	KOMW103	Sistem Sosial Politik Indonesia	3
6	UKS 101	Pendidikan Agama	2
7	KOMW104	Public Speaking	3
8	KOMW105	Fotografi Dasar	3
9	UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2
Jumlah SKS			23

SEMESTER 2

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	KOMW106	Komunikasi Antar Pribadi	3
2	KOMW107	Komunikasi Kelompok dan Organisasi	3
3	KOMW108	Komunikasi Massa	3
4	KOMW109	Komunikasi Lintas Budaya	3
5	KOMW110	Teknologi Komunikasi dan Informasi	3
6	KOMW111	Opini Publik	3

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
7	KOMW112	Filsafat Komunikasi	3
8	KOMW113	Psikologi Komunikasi	3
Jumlah SKS			24

SEMESTER 3

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	KOMW201	Teori Komunikasi	3
2	KOMW202	Komunikasi Jender	3
3	KOMW203	Statistik Sosial	3
4	KOMW204	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3
5	KOMW205	Komunikasi Visual	3
6	KOMW206	Komunikasi Lingkungan	3
7	KOMW207	Komunikasi Kreatif	2
8	KOMW208	Komunikasi Digital	3
Jumlah SKS			23

SEMESTER 4

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	KOMW209	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	3
2	KOMW210	Kewirausahaan Komunikasi	3
3	KOMW211	Kebijakan Komunikasi	3
4	KOMW212	Komunikasi Masyarakat Marjinal	3
5	KOMW213	Pengantar Jurnalisme	3
6	KOMW214	Dasar-dasar Komunikasi Strategis	3
7	KOMW215	Dasar-Dasar Media Kreatif	3
8	KOMW216	Etika Profesi	3
Jumlah SKS			24

SEMESTER 5

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
MEDIA KREATIF			
1	MK301	Reportase	3
2	MK302	Naskah Media	3
3	MK303	Digital News Production	3
4	MK304	Konvergensi Media	3
5		Mata Kuliah Pilihan	2
6		Mata Kuliah Pilihan	2
7		Mata Kuliah Pilihan	2
8		Mata Kuliah Pilihan	2
		Jumlah SKS	20
KOMUNIKASI STRATEGIS			
1	KS301	Periklanan	3
2	KS302	Komunikasi Pemasaran	3
3	KS303	Public Relations Management	3
4	KS304	Komunikasi Politik	3
5		Mata Kuliah Pilihan	2
6		Mata Kuliah Pilihan	2
7		Mata Kuliah Pilihan	2
8		Mata Kuliah Pilihan	2
		Jumlah SKS	20
MATA KULIAH PILIHAN			
1	KOMP301	Kajian Komunikasi Internasional	2
2	KOMP302	Komunikasi Bisnis	2
3	KOMP303	Fotografi Kreatif	2
4	KOMP304	Hak Asasi Manusia	2
5	KOMP305	Bahasa Inggris (TOEFL Prep)	2
6	KOMP306	Fotografi Jurnalistik	2
7	KOMP307	Liputan Investigasi	2
8	KOMP308	Manajemen Komunikasi	2
9	KOMP309	Bahasa Mandarin	2

Catatan: Mata kuliah pilihan dengan kode KOMP diambil maksimal 8 SKS dari 18 SKS yang ditawarkan di semester V

SEMESTER 6

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	UKS410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2
2	KOMW301	Proposal Tugas Akhir	2
Jumlah SKS			4
MEDIA KREATIF			
1	MK305	Riset Media	3
2	MK306	Jurnalistik Online	3
3	MK307	Filmologi	3
4	MK308	Kebijakan Media	3
5		Mata Kuliah Pilihan	2
6		Mata Kuliah Pilihan	2
7		Mata Kuliah Pilihan	2
8		Mata Kuliah Pilihan	2
Jumlah SKS			18
KOMUNIKASI STRATEGIS			
1	KS305	Riset Komunikasi Strategis	3
2	KS306	Komunikasi Krisis	3
3	KS307	Tata Kelola Informasi Publik	3
4	KS308	Event Organizer Management	3
5		Mata Kuliah Pilihan	2
6		Mata Kuliah Pilihan	2
7		Mata Kuliah Pilihan	2
Jumlah SKS			18
MATA KULIAH PILIHAN			
1	KOMP310	Sinematografi	2
2	KOMP311	Penulisan Skenario	2
3	KOMP312	Produksi Media	2
4	KOMP313	Lobi dan Negosiasi	2
5	KOMP314	Public Relations Writing	2
6	KOMP315	Komunikasi Pemerintahan	2
7	KOMP316	Corporate Social Responsibility	2
8	KOMP317	Public Relations Campaign	2
9	KOMP318	Branding Management	2

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
10	KOMP319	Capacity Building	2

Catatan: Mata kuliah pilihan dengan kode KOMP diambil maksimal 6 SKS dari 20 SKS yang ditawarkan di semester VI

SEMESTER 7

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	KOMW401	Kuliah Kerja Praktik	4
Jumlah SKS			4

SEMESTER 8

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	KOMW402	Skripsi/ Tugas Akhir	4
Jumlah SKS			4
Total SKS Smt I-VIII			144

Lulusan Berprestasi

Daftar Lulusan Program Studi Hukum yang Dapat Menyelesaikan Studi dalam Waktu Kurang dari 4 Tahun dengan IPK di atas 3.5 dalam Enam Tahun Terakhir :

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
1	18.M1.0014	Carolus Nova Putra T	III Tahun 2022	3.60	3 tahun 10 bulan
2	18.M1.0045	Marcheli Putri Susilasti	III Tahun 2022	3.66	3 tahun 10 bulan
3	18.M1.0079	Lastria Masinita Kusindrajit	III Tahun 2022	3.81	3 tahun 10 bulan
4	18.M1.0098	Dista Ayu Puji Aryani	III Tahun 2022	3.57	3 tahun 11 bulan
5	18.M1.0105	Diva Pradnya Ayu Kusuma	III Tahun 2022	37.0	3 tahun 11 bulan
6	18.M1.0112	Apritania	III Tahun 2022	3.52	3 tahun 11 bulan
7	18.M1.0120	Yusvina Yuwono	III Tahun 2022	3.82	3 tahun 10 bulan
8	18.M1.0149	Maura Geraldhine Vidhany Laras	III Tahun 2022	3.50	3 tahun 11 bulan
9	19.M1.0006	Theresia Shella Marisa	I Tahun 2023	3.60	3 tahun 5 bulan
10	19.M1.0008	Agata Amadea Yosephine Sanjaya	I Tahun 2023	3.82	3 tahun 5 bulan
11	19.M1.0011	Ivonne Teresia Febrianti	I Tahun 2023	3.79	3 tahun 5 bulan
12	19.M1.0016	Theresia Putri Ginting	I Tahun 2023	3.85	3 tahun 5 bulan
13	19.M1.0022	Felicia Renita Haryoko Tjipto Rahardjo	I Tahun 2023	3.52	3 tahun 5 bulan

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
14	19.M1.0029	Christina Margaretha	I Tahun 2023	3.79	3 tahun 5 bulan
15	19.M1.0052	Florentina Prasasti	I Tahun 2023	3.51	3 tahun 5 bulan
16	19.M1.0063	Joan Putri Callista	I Tahun 2023	3.80	3 tahun 5 bulan
17	19.M1.0064	Kho, Hanna Sindhunata	I Tahun 2023	3.56	3 tahun 5 bulan
18	19.M1.0067	Mario Mastiono	I Tahun 2023	3.81	3 tahun 5 bulan
19	19.M1.0081	Fridayanti Halawa	I Tahun 2023	3.51	3 tahun 5 bulan
20	19.M1.0090	Anna Mufthi Rastra Sahara Prihardito	I Tahun 2023	3.66	3 tahun 5 bulan
21	19.M1.0094	Silvyana	I Tahun 2023	3.50	3 tahun 5 bulan
22	19.M1.0098	Amelia Ayu Nirmalasari	I Tahun 2023	3.61	3 tahun 5 bulan
23	19.M1.0014	Vereza Milda	II Tahun 2023	3.67	3 tahun 8 bulan
24	19.M1.0019	Theresia Maria Grestia Shubma Cahyaningrum	II Tahun 2023	3.57	3 tahun 7 bulan
25	19.M1.0031	Valenia Melinda	II Tahun 2023	3.82	3 tahun 7 bulan
26	19.M1.0034	Vincent Jeremia Kurniawan	II Tahun 2023	3.74	3 tahun 8 bulan
27	19.M1.0045	Levina Lim	II Tahun 2023	3.60	3 tahun 5 bulan
28	19.M1.0046	Rio Sankazi Wijaya	II Tahun 2023	3.80	3 tahun 7 bulan
29	19.M1.0075	Erlia Alfiani	II Tahun 2023	3.57	3 tahun 8 bulan
30	19.M1.0075	Erlia Alfiani	II Tahun 2023	3.57	3 tahun 8 bulan
31	19.M1.0028	Stephanie Haryanti	III Tahun 2023	3.66	3 Tahun,9 Bulan
32	19.M1.0038	Nathasya Marietta A	III Tahun 2023	3.57	3 Tahun,9 Bulan
33	19.M1.0048	Bernadeta Arista W.	III Tahun 2023	3.60	3 Tahun,9 Bulan
34	19.M1.0041	Gerry Cristhoper Rorong	III Tahun 2023	3.77	3 Tahun,9 Bulan
35	19.M1.0033	Cheryl Sanchia Indro W.	III Tahun 2023	3.66	3 Tahun,10 Bulan
36	19.M1.0025	Gabriel Rosa Dini Caesarani	III Tahun 2023	3.56	3 Tahun,10 Bulan
37	19.M1.0085	Maria Amelia Budiarti	III Tahun 2023	3.66	3 Tahun,10 Bulan
38	19.M1.0099	Valentina Bella Fedora Anindita	III Tahun 2023	3.69	3 Tahun,11 Bulan
39	19.M1.0044	Hosiana Indah Berlianti	I Tahun 2024	3.53	3 Tahun,11 Bulan
40	19.M1.0086	Cindy Patrisya. Yt	I Tahun 2024	3.54	3 Tahun,11 Bulan
41	19.M1.0089	Ursula Nareswara Andhin Putri Prayoga	I Tahun 2024	3.67	3 Tahun,11 Bulan
42	19.M1.0039	Emily Diona Christine	I Tahun 2024	3.73	3 Tahun,11 Bulan
43	19.M1.0074	Agnelia Venus Aprodith	I Tahun 2024	3.68	3 Tahun,11 Bulan
44	19.M1.0088	Dian Paskah Siregar	I Tahun 2024	3.59	3 Tahun,11 Bulan

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
45	19.M1.0095	Adinda Putri Mananta	I Tahun 2024	3.62	3 Tahun,11 Bulan
46	20.M1.0069	Laurencia Aline Limarga	I Tahun 2024	3.80	3 Tahun,3 Bulan
47	20.M1.0062	Nathania Audie Wijaya	I Tahun 2024	3.85	3 Tahun,4 Bulan
48	20.M1.0005	Helena Mutiara Utomo	I Tahun 2024	3.90	3 Tahun,4 Bulan
49	20.M1.0023	Kwa Christabel Leonora J	I Tahun 2024	3.63	3 Tahun,4 Bulan
50	20.M1.0007	Michelle Yuliana	I Tahun 2024	3.86	3 Tahun,4 Bulan
51	20.M1.0012	Ester Dwi Mayliana Lesmono	I Tahun 2024	3.88	3 Tahun,4 Bulan
52	20.M1.0038	Maria Emanuela J C P D	I Tahun 2024	3.81	3 Tahun,4 Bulan
53	20.M1.0031	El Roy Valentino	I Tahun 2024	3.53	3 Tahun,4 Bulan
54	20.M1.0041	Lusiana Santi	I Tahun 2024	3.85	3 Tahun,4 Bulan
55	20.M1.0027	Graciella Vania Hartono	I Tahun 2024	3.64	3 Tahun,4 Bulan
56	20.M1.0003	Viorien Kristanti	I Tahun 2024	3.73	3 Tahun,4 Bulan
57	20.M1.0066	Raka Bintang Ariska	I Tahun 2024	3.78	3 Tahun,4 Bulan
58	20.M1.0001	Gladialdo Budi Setiawan	I Tahun 2024	3.66	3 Tahun,4 Bulan
59	20.M1.0029	Reynald	I Tahun 2024	3.72	3 Tahun,4 Bulan
60	20.M1.0014	Fallen Anastasia Adella	I Tahun 2024	3.63	3 Tahun,4 Bulan
61	20.M1.0110	Aldama Syadza Afratrya	I Tahun 2024	3.61	3 Tahun,4 Bulan
62	20.M1.0061	Patrice Grasia R. A.	I Tahun 2024	3.75	3 Tahun,4 Bulan
63	20.M1.0100	Nadya Ramadhannisa	I Tahun 2024	3.83	3 Tahun,4 Bulan
64	20.M1.0021	Melinda Oktia Anggoro	I Tahun 2024	3.56	3 Tahun,4 Bulan
65	20.M1.0089	Amanda Rizki HARRIZTA	I Tahun 2024	3.66	3 Tahun,4 Bulan
66	20.M1.0064	Thereva Ursula Wuwung	I Tahun 2024	3.78	3 Tahun,4 Bulan
67	20.M1.0032	Angeline, Jong	I Tahun 2024	3.56	3 Tahun,4 Bulan
68	20.M1.0057	Deanda Rezky Ramadhanny	I Tahun 2024	3.80	3 Tahun,4 Bulan
69	20.M1.0103	Raihan Rasyad Ramadhan	I Tahun 2024	3.61	3 Tahun,4 Bulan
70	20.M1.0082	David Carlo Nathanael Pangaribuan	I Tahun 2024	3.70	3 Tahun,4 Bulan
71	20.M1.0016	Joyvina Melinda C	I Tahun 2024	3.83	3 Tahun,4 Bulan
72	20.M1.0088	Arum Yasmin Mahidhara	I Tahun 2024	3.60	3 Tahun,4 Bulan
73	20.M1.0075	Mellisa Purnama Dewi	I Tahun 2024	3.57	3 Tahun,4 Bulan
74	20.M1.0058	Celikha Arti Oktaviani	I Tahun 2024	3.80	3 Tahun,4 Bulan
75	20.M1.0096	Yoanita Eka Ayu	I Tahun 2024	3.91	3 Tahun,4 Bulan
76	20.M1.0114	Berlian Diva Fresenia	I Tahun 2024	3.78	3 Tahun,4 Bulan

No	NIM	N a m a	Periode Yudisium/Wisuda	IPK	Masa Studi
77	20.M1.0108	Helmilia Gita Marshanda	li Tahun 2024	3.50	3 Tahun,4 Bulan
78	20.M1.0036	Chantikadara Maria O	li Tahun 2024	3.58	3 Tahun,4 Bulan
79	20.M1.0026	Maria Angelina Ratih Kurniawati	li Tahun 2024	3.57	3 Tahun,4 Bulan
80	20.M1.0046	Gia Cahya Buana	li Tahun 2024	3.74	3 Tahun,4 Bulan
81	20.M1.0086	Raden Roro Dhian Ayu Wulandari Hartoningrum	li Tahun 2024	3.58	3 Tahun,4 Bulan
82	20.M1.0079	Satrio Agung Widodo	li Tahun 2024	3.80	3 Tahun,4 Bulan
83	20.M1.0065	Lourensia Angeliqye	li Tahun 2024	3.72	3 Tahun,4 Bulan
84	20.M1.0094	Nanda Kurniawati	li Tahun 2024	3.77	3 Tahun,4 Bulan
85	20.M1.0092	Riko	li Tahun 2024	3.88	3 Tahun,6 Bulan
86	20.M1.0018	Eugenio Febryan Permana	li Tahun 2024	3.61	3 Tahun,6 Bulan
87	20.M1.0102	Sarah Alphary Emmanuela	li Tahun 2024	3.59	3 Tahun,7 Bulan
88	20.M1.0030	Steffany Chyntia P	li Tahun 2024	3.68	3 Tahun,7 Bulan
89	20.M1.0035	Brighita Valma Violenta	li Tahun 2024	3.68	3 Tahun,7 Bulan
90	20.M1.0072	Paul Steven	li Tahun 2024	3.52	3 Tahun,7 Bulan
91	20.M1.0113	Sheva Brilliant Milannesta	li Tahun 2024	3.57	3 Tahun,7 Bulan
92	20.M1.0056	Gabriella Ruth Maharani	li Tahun 2024	3.57	3 Tahun,7 Bulan
93	20.M1.0055	Cinta Budiyanto S	li Tahun 2024	3.77	3 Tahun,7 Bulan
94	20.M1.0111	Febriyanti Simamora	li Tahun 2024	3.50	3 Tahun,7 Bulan

d. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib Universitas

28	IKW 213	Komunikasi Visual	2 SKS
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan Komunikasi Visual. Cakupan materi yakni: Konsep Komunikasi Visual, Jenis-Jenis Elemen Komunikasi Visual.			

29	IKW 214	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan arti pentingnya Teknologi Komunikasi dan Informasi akan perkembangan ilmu komunikasi. Cakupan materi yakni: Konsep Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sejarah Telekomunikasi, Komputer dan Internet yang membantu manusia dalam memproses, mengirim dan menerima pesan.</p>			
30	IKW 215	Sosiologi Komunikasi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan agar mahasiswa mengerti dan memahami akan konsep-konsep yang terkait dengan Sosiologi Komunikasi. Materi mata kuliah ini mencakup: Konsep Sosiologi Komunikasi, Pengaruh Media Massa Terhadap Individu dan Sistem Pengelompokan Manusia, Perilaku Kolektif, Perubahan Sosial dan Kebudayaan.</p>			
31	IKW 216	Etika Komunikasi	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap mahasiswa tentang standar norma dan ideologi yang mendasari kegiatan profesional bidang komunikasi dalam perspektif mikro dan makro dengan melakukan kajian terhadap perilaku komunikasi dalam konteks struktur sosial, norma dan ideologi dalam masyarakat. Sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat memahami kedudukan kegiatan profesional bidang komunikasi. Mata kuliah mempelajari profesi yang berkaitan dengan jurnalistikan, kode etik profesi dan kode etik jurnalistik yang dibuat oleh organisasi media massa ataupun kode etik profesi di bidang komunikasi lainnya seperti etika humas, dll.</p>			
32	IKW 301	Kuliah Kerja Praktek	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa, yang telah menempuh 90 SKS, untuk mengkonfirmasi pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimilikinya dalam sebuah Kuliah Kerja Praktek (KKP). KKP dilakukan di lembaga pemerintahan, swasta dan korporasi yang relevan dengan pilihan Konsentrasi mahasiswa. Proses pemilihan tepat KKP dilakukan setelah melalui koordinasi antara Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKA Soegijapranata dengan mahasiswa peserta KKP dan calon tempat KKP. Proses dan bentuk pelaporan KKP mengikuti kaidah Panduan Penyusunan KKP yang dikeluarkan Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKA Soegijapranata.</p>			

33	IKW 401	Media Enterpreneurship	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memberikan wawasan dan ketrampilan dalam memahami dan memanfaatkan peluang guna mengembangkan diri secara mandiri sebagai tenaga ahli komunikasi yang professional yang dapat mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan yang selama ini diperoleh di tengah-tengah masyarakat.</p>			
34	IKW 402	Skripsi	4 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa, yang telah menempuh 126 SKS, untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan tema dan atau kasus tertentu. Tema dan atau kasus tertentu tentunya dikaji dari berbagai paradigma, teori, perspektif, asumsi, metodologi yang selama ini didapatkan di perkuliahan. Karya ilmiah tersebut disusun secara sistematis dengan mengikuti kaidah Panduan Penyusunan Skripsi yang dikeluarkan Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKA Soegijapranata.</p>			

Mata Kuliah Peminatan : Jurnalistik & Industri Media

1	KJW 211	Teknik Peliputan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep-konsep dan ketrampilan yang terkait dengan Teknik Peliputan. Materi mata kuliah ini mencakup: Konsep Dasar Reportase, Observasi Lapangan Untuk Mengumpulkan Data Berita, Teknik Wawancara Dan Reportase, Etika Reportase, Tips Menghadapi Kendala Reportase Di Lapangan, Serta Simulasi Wawancara dan Reportase.</p>			
2	KJW 212	Teknik Menulis Berita	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep-konsep dan ketrampilan yang terkait dengan Teknik Menulis Berita. Mata kuliah ini mencakup: Konsep Dasar Berita dan Media Massa Cetak, Prinsip Dasar Penulisan Berita, Menyunting Berita, Jurnalistik Berspektif Gender, Dan Jurnalistik Kontemporer.</p>			

3	KJW 213	Produksi Berita Televisi dan Radio	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep-konsep dan ketrampilan yang terkait Produksi Berita Televisi dan Radio. Mata kuliah ini mencakup: Konsep Dasar Berita Radio dan Televisi, Proses Peliputan dan Editing Berita, Proses Produksi dan Penyajian Berita, Serta Produksi Feature Televisi. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat membuat sebuah paket berita.</p>			
4	KJW 214	Analisis Isi & Framing	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep-konsep dan ketrampilan yang terkait dengan konsep-konsep dan ketrampilan yang berkaitan dengan Analisis Isi dan <i>Framing</i>. Mata kuliah ini mencakup: Konsep-konsep Analisis Isi dan Konsep-Konsep <i>Framing</i>. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu membuat sebuah analisis isi dan <i>framing</i> pada kasus tertentu yang dimuat pada media cetak dan media <i>online</i>.</p>			
5	KJW 301	Riset Media	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep-konsep dan ketrampilan yang terkait dengan Riset Media. Mata kuliah ini mencakup: Konsep Dasar Riset Dalam Media, Kajian Yang Berkembang Dalam Suatu Riset Media dan, Perspektif Yang Dapat Dipakai Sebagai Dasar Dalam Melakukan Suatu Riset Media. Ketrampilan yang diharapkan, mahasiswa mampu menyusun perencanaan dalam suatu riset baik waktu, tempat, biaya, personal yang dibutuhkan penyusunan hasil suatu riset media.</p>			
6	KJW 302	Jurnalistik Online	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami konsep-konsep yang terkait dengan konsep-konsep Jurnalisme <i>Online</i>. Cakupan materi yakni: Konsep Jurnalisme <i>Online</i>, lingkup kajian jurnalisme <i>Online</i> serta berbagai aspek yang melingkupinya.</p>			
7	KJW 303	Hak Asasi Manusia	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami serta mengikuti dengan cermat perkembangan historis tentang pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara internasional maupun nasional. Dalam hal ini HAM ditinjau secara filosofis, yuridis, moral, sosiologi disamping juga keagamaan. Disamping itu juga dibahas beberapa tema HAM antara lain hak anak, status dan posisi perempuan dan segala yang terkait.</p>			

8	KJW 304	Liputan Investigasi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan konsep-konsep dan ketrampilan yang berkait dengan Liputan Investigasi. Cakupan materi yakni: Teknik-Teknik Reportase Lanjutan (<i>Indepth Reporting</i>) baik <i>Investigative Reporting</i> maupun <i>Interpretive Reporting</i>, Penulisan Berita Dengan Topik-Topik Khusus. Mahasiswa dilatih untuk membuat produk jurnalistik level tinggi untuk media cetak. Mereka diminta untuk melakukan <i>investigative reporting</i> dan menulis kisahnya dengan format yang baik dan layak muat di media sebenarnya.</p>			
9	KJW 305	Hukum Media Massa	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan berbagai macam hukum yang terkait dengan bidang media massa. Juga mempelajari aturan-aturan hukum yang mengikat profesi wartawan dan profesi lain yang berkaitan dengan media massa seperti pencemaran nama baik, labeling, berita palsu dan lain lain. Serta memahami hak dan kewajiban wartawan dan media massa.</p>			
10	KJW 306	Foto Jurnalistik	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan ketrampilan yang berkait dengan Fotografi Jurnalistik. Cakupan materi yakni: Membuat Berita Melalui Format Foto, Karakteristik, Fungsi Dan Jenis Foto Jurnalistik (<i>spot news, hard news, illustrations, essay, sequence</i>) dan Membuat Teks Foto. Dalam perkuliahan ini terdapat pula latihan praktik dimana mahasiswa diminta untuk membuat karya foto jurnalistik yang sebenarnya.</p>			
11	KJW 307	Konvergensi Media	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan konsep-konsep yang berkait dengan Konvergensi Media. Cakupan materi yakni: Digitalisasi media <i>mainstream</i> sebagai bagian dari tren yang lebih luas yang juga dirujuk sebagai konvergensi media digital, Media dan industri terkait untuk mengkonstruksi secara lebih luas, lebih detail terhadap pemahaman dari dampak teknologi terhadap produksi pesan, pengelolaan konten dan distribusi pesan melalui media digital yang terkonvergen kepada khalayak pengguna. Termasuk juga perubahan yang terjadi banyak di wilayah perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh umur, pendapatan, dan budaya baik dari faktor yang reflektif maupun direktif dari tren adanya konvergensi media digital.</p>			

12	KJW 310	Opini Publik	2 SKS
<p>Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat berdampak, antara lain, kepada terbentuknya public sphere yang bisa dijadikan wahana untuk membicarakan opini publik yang berkembang. Opini publik sendiri merupakan sintesa pendapat yang diperoleh dalam satu diskusi sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya opini publik semacam ini berpotensi menjadi kekuatan sosial (social power) yang di satu sisi bisa menjadi kekuatan sinergis yang bermanfaat bagi masyarakat tetapi sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menjadi “bumerang” yang akan mengganggu kehidupan masyarakat. Hasil jajak-pendapat (polling) merupakan satu dari banyak cara untuk membangun opini publik yang paling menonjol.</p>			
13	KJW 311	Dokumentasi Media	2 SKS
<p>Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa untuk menguasai secara konseptual teoritis dan praktek dokumentasi media guna menunjang riset media.</p>			
14	KJW 313	Sinematografi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan ketrampilan yang terkait dengan Sinematografi. Mata kuliah ini mencakup: Konsep Dasar Sinematografi, Pengenalan Kategori/Jenis Jenis Film, Pengenalan Mengenai Praproduksi Film dan Prinsip Dasar Rancangan Produksi Film , Khususnya Produksi Film Dokumenter.</p>			
15	KJW 314	Etika Jurnalisme	2 SKS
<p>Matakuliah ini bertujuan memberi pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang teoritis, konseptual dan filosofis mengenai latar-belakang dan dasar pemikiran macam-macam kode etik jurnalis dan implementasinya dalam organisasi-organisasi profesi jurnalis. Tujuan praksis mata kuliah ini adalah penanaman kesadaran akan perlunya penghargaan nilai-nilai etis secara seimbang pelbagai aspek dan nilai-nilai etis dan kemanusiaan dalam praksis jurnalistik.</p>			

Mata Kuliah Peminatan : Komunikasi Publik dan Strategis

1	KPW 212	<i>Public Relations Management</i>	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar manajemen Public Relations (PR) guna memungkinkan mahasiswa melakukan analisis dalam menentukan masalah PR serta dapat menyusun rancangan perencanaan program PR. Mata kuliah ini meliputi topik-topik tentang: Ruang Lingkup dan Teori Humas, Organisasi Humas, Perencanaan Program Humas, Tindakan dan Strategi Komunikasi serta, Evaluasi Program.</p>			
2	KPW 213	<i>Corporate Social Responsibility</i>	3 SKS
<p>Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep umum <i>Corporate Social Responsibility</i>-CSR, Sejarah CSR, Varian kemanfaatan CSR bagi korporasi dan masyarakat, Regulasi yang mengatur di Indonesia dan Telaah Kritis persoalan-persoalan CSR dan pelaksanaan CSR di Indonesia yang dapat dijadikan contoh pembelajaran. Di akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat memahami secara kritis konsep dan pelaksanaan CSR di Indonesia dalam memenuhi kepentingan korporasi dan masyarakat serta pemerintah.</p>			
3	KPW 214	<i>Public Relations Writing</i>	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman kepada dasar-dasar dan ketrampilan Public Relations Writing kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Siaran Pers, Iklan Layanan Masyarakat, Permintaan Majalah, Mengamankan wawancara televisi dan radio, memo sebagai pemberitaan, media <i>alerts</i>, siaran pers perdagangan, <i>newsletter</i>, <i>backgrounders</i>, dan presentasi hubungan masyarakat.</p>			
4	KPW 301	<i>Event Organizer Management</i>	3 SKS
<p>Mata kuliah ini memberikan kompetensi tentang bagaimana mengembangkan, memasarkan, dan mengelola <i>event</i> (<i>product event</i>, <i>corporate event</i>, maupun <i>community event</i>) sebagai bagian dari komunikasi pemasaran. Kajian mencakup tujuan, teknik, merancang, implementasi dan evaluasi event.</p>			

5	KPW 302	<i>PR Campaign</i>	3 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang kampanye humas. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi: Pengertian Kampanye Dalam Kegiatan Kehumasan, Jenis dan Bentuk Kampanye Humas, Proses Kampanye Humas, serta Teknik dan Media Kampanye Dalam Kegiatan Kehumasan. Pada akhir perkuliahan mahasiswa diminta untuk merancang satu bentuk kampanye humas.</p>			
6	KPW 303	Desain Komunikasi Visual	3 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan dan ketrampilan kepada mahasiswa akan proses desain visual. Mulai tahapan analisa, identifikasi hingga eksekusi sebuah brief desain ke dalam wujud aplikasi desain visual yang digunakan dalam sebuah iklan media cetak. Cakupan materi yakni: Jenis-Jenis Elemen Visual Sebuah Desain dan Penggunaannya Dalam Sebuah Proyek Desain, Terjemahan <i>Brief</i> Klien Ke Dalam Bentuk Visual Desain, Ketrampilan Teknis Dasar Pembuatan <i>Dummy/Mock-Up</i> Desain Visual sesuai Standar Industri dan, Ketrampilan Teknis Dasar Penggunaan Perangkat Kerja Desain Grafis.</p>			
7	KPW 304	Riset Komunikasi Strategis	3 SKS
<p>Mata kuliah ini di rancang untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi mahasiswa akan arti penting riset sebagai dasar penyusunan strategi, monitoring dan evaluasi program komunikasi strategis serta memberikan kemampuan praktis untuk melakukannya. Cakupan materi kuliah meliputi: Pemahaman Riset Murni dan Terapan, Berbagai Jenis Desain Riset serta Metode Riset.</p>			
8	KPW 305	<i>Branding Management</i>	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan merek baik pada tataran produk maupun korporat. Cakupan dalam materi dalam mata kuliah ini meliputi: Strategi Membangun Merek, <i>Positioning</i> Merek dan, <i>Brand Communication</i>.</p>			
9	KPW 306	Fotografi Kreatif	3 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman serta keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan karya fotografi kreatif yang dibutuhkan di industri komunikasi strategis, seperti periklanan dan <i>Public Relations</i>. Materi dalam mata kuliah ini mencakup antara lain: Fotografi Terapan, <i>Workflow Photographic</i> dan, Riset Pengembangan Ide Kreatif.</p>			

10	KPW 307	<i>Copywriting Periklanan</i>	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman mahasiswa tentang penulisan naskah iklan. Materi kuliah ini meliputi antara lain: Ide Kreatif Dalam Pesan Iklan; Strategi Penerjemahan dan Transformasi <i>Positioning</i>, Serta Teknik Penulisan Naskah Iklan.</p>			
11	KPW 310	Manajemen Komunikasi Pemerintahan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep-konsep seputar Manajemen Komunikasi Pemerintahan dan praktek Manajemen Komunikasi Pemerintahan. Cakupan materi yakni: Konsep Pemerintahan Indonesia, Kehumasan Pemerintahan, Kehumasan Lembaga Legislatif, Kehumasan Eksekutif dan Kehumasan Lembaga Pemerintahan Lainnya. Serta regulasi yang mengatur fungsi kehumasan Pemerintahan.</p>			
12	KPW 312	Lobi dan Negosiasi	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan penerapan seputar Lobi dan Negosiasi kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Konsep Lobi dan Negosiasi, Varian Lobi dan Negosiasi serta Kajian Pengalaman Lobi dan Negosiasi di lingkungan pemerintahan, lembaga publik dan korporasi di Indonesia. Serta ketrampilan dalam bentuk simulasi Lobi dan Negosiasi.</p>			
13	KPW 313	Etika Kehumasan	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa akan konsep-konsep seputar Etika Kehumasan kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Etika Kehumasan, Perannya dalam kegiatan Humas, Sejarah Kode Etik Kehumasan, Kode Etik Kehumasan dan IPRA, Etika Komunikasi Humas, Etika <i>Customer Services</i>, Etika Humas Pemerintah, Praktik Etika PR di Perusahaan Formal dan Informal, Etika Pelayanan, Etika Tulis, Etika PR Internal, Etika Penggunaan <i>New Media</i> dan Praktiknya, Etika PR dalam <i>Advertising</i>, serta Audit Etika <i>Public Relations</i>.</p>			

14	KPW 315	Manajemen Isu dan Krisis	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan dasar-dasar manajemen isu dan krisis kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Pengertian Krisis, Dampak Krisis, Manajemen Krisis, Penanganan Krisis, Membangun Reputasi Positif, PR dan Krisis, <i>Handling</i> Krisis, Manajemen Isu dan Krisis Publik, Monitoring dan Evaluasi-monev Media, Praktek Melakukan Monev Media dan Manajemen Komunikasi Krisis. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu membuat rancangan manajemen isu dan rancangan pengelolaan krisis komunikasi yang dihadapi suatu entitas bisnis, masyarakat dan di lingkungan pemerintahan</p>			
15	KPW 317	Komunikasi Pemasaran	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman mahasiswa mengenai strategi (jangka panjang), taktik (jangka pendek), dan teknik komunikasi yang digunakan dalam kegiatan pemasaran. Materi dalam mata kuliah ini mencakup: Ruang Lingkup Komunikasi Pemasaran, Pemahaman Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC), Pemanfaatan Media Komunikasi untuk Kepentingan Pemasaran.</p>			

Mata Kuliah Pilihan

1	IKP 301	Periklanan Internasional	2 SKS
<p>Dalam era globalisasi pemasaran produk barang dan/atau jasa, tak bisa dielakkan lagi, dituntut mampu melewati batas-batas negara atau bersifat internasional. Akibatnya, akan bermunculan pasar-pasar internasional maupun global yang merupakan ajang persaingan yang semakin lama semakin rumit dan canggih (<i>sophisticated</i>). Untuk itu, diperlukan studi khusus tentang periklanan internasional yang merupakan komunikasi non-personal melalui beragam media yang diharapkan dapat menginformasikan atau membujuk kalangan tertentu yang membaca pesan tersebut. Sifat internasional dalam periklanan ini menuntut adanya pembahasan khusus mengenai <i>local regulations, language barriers, cultural diversity</i>, disamping hal-hal umum dalam periklanan seperti <i>budgeting, resource allocation issues</i>, dan pemilihan media yang tepat untuk iklan tersebut.</p>			

2	IKP 302	Komunikasi Masyarakat Marjinal	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan praktek memahami Komunikasi Masyarakat Marjinal kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Konsep Negara dan Masyarakat, Konsep Hak-Hak Dasar Ekonomi, Sosial dan Politik Masyarakat, Ketidakadilan Struktur-Akses dan Perlindungan. Serta memiliki kemampuan mengidentifikasi pola dan bentuk komunikasi kelompok-kelompok masyarakat marjinal.</p>			
3	IKP 303	Desain Surat Kabar dan Majalah	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep Desain Surat Kabar dan Majalah kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Karakteristik Perwajahan Surat Kabar dan Majalah, Kolomisasi, Paginasi, Logo dan Logotype, Pewarnaan dan Aplikasi Dalam Produksi Surat Kabar Dan Majalah.</p>			
4	IKP 304	Komunikasi Inovatif dan Kreatif	2 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan mahasiswa untuk berani berkomunikasi secara inovatif dan kreatif. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi antara lain: Penentuan Tujuan dan Sasaran Komunikasi, Mengembangkan Desain Kreatif dan Inovatif, Kekuatan Desain Grafis serta, Pemanfaatan Teknologi Dalam Efektivitas Komunikasi Kreatif dan Inovatif.</p>			
5	IKP 306	Penulisan Skenario	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep Penulisan Skenario kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Gambaran Umum Naskah Skenario, Tujuan Penulisan Naskah, Tahapan Persiapan Penulisan Naskah Skenario, Produksi Naskah Skenario.</p>			
6	IKP 307	Consumer Behaviour	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya melakukan analisis perilaku konsumen sebagai dasar dalam menentukan komunikasi strategis. Materi dalam mata kuliah ini meliputi beberapa topik antara lain: <i>Personality, Lifestyle Dan Attitude, Decision Maker, Konsumen dan Subkultur.</i></p>			

7	IKP 308	Produksi Media	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep dan proses Produksi Media. Cakupan materi yakni: Konsep Dasar Program Radio dan Televisi, Jenis-Jenis Program, Dasar Gagasan Program, Pelaksanaan Produksi, Pengembangan Gagasan Program, Serta Implementasi Dalam Pelaksanaan Produksi Program Radio Dan Televisi.</p>			
8	IKP 315	Manajemen Informasi Publik	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan penerapan Manajemen Informasi Publik. Cakupan materi yakni: Konsep Kebebasan dan Informasi Publik, Esensi dan praktek UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik hingga Praktek Sengketa Informasi Publik.</p>			
9	IKP 317	Organisasi dan Administrasi Internasional	2 SKS
<p>Dalam proses globalisasi yang tidak mungkin dibendung lagi seperti saat ini, pemahaman tentang organisasi dan administrasi internasional merupakan sebuah tuntutan yang tak bisa dielakkan. Keberadaan negara sebagai entitas harus diperhatikan tetapi keterbukaan komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar (internasional) merupakan kebutuhan mutlak. Di sini dibahas tentang pentingnya sebuah organisasi internasional, pencapaian (<i>achievement</i>) apa yang bisa diwujudkan oleh organisasi internasional tersebut, dan bagaimana cara mencapainya. Disamping itu, juga dibahas tentang struktur, mekanisme kerja dan pola kerjasama organisasi-organisasi internasional yang ada.</p>			
10	IKP 324	Pengembangan Personalitas	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat memahami dirinya sendiri, dan tuntutan dunia kerja secara profesional, sehingga dapat mempersiapkan dirinya dalam memenuhi tuntutan dunia kerja. Materi dalam mata kuliah ini mencakup: Konsep Diri dan Kepribadian, Mengembangkan Potensi, Mengatasi Kelemahan serta, Membangun Citra Personal.</p>			

11	IKP 325	Teknik Penulisan Efektif	2 SKS
<p>Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian dan pemahaman dan melatih mahasiswa untuk menulis secara efektif sebagai dasar dalam menyusun berbagai macam tulisan ilmiah. Materi yang disampaikan mencakup: Dasar Penulisan Efektif, Tata Cara Pengutipan, Menulis Artikel, Menulis Resensi Buku dan, Menulis Laporan Penelitian.</p>			
12	IKP 326	<i>Creative and Innovative Thinking</i>	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman mahasiswa tentang berpikir kreatif dan inovatif sebagai dasar keunggulan kompetitif yang digunakan para manajer dalam dunia kerja. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi: Kreatifitas Manusia, Kerangka Berpikir Kreatif, Pendekatan Memilih Ide, Bagaimana Membangkitkan Cara Berpikir <i>Out Of The Box</i> dan Kekayaan Intelektual.</p>			
13	IKP 327	Komunikasi Bisnis	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya komunikasi dalam konteks dunia bisnis. Materi dalam mata kuliah ini meliputi: Konseptualisasi Komunikasi Bisnis, Media Komunikasi Bisnis, Strategi Komunikasi Bisnis serta, Praktik <i>Business Writing</i> Dan <i>Business Speaking</i>.</p>			
14	IKP 328	Komunikasi dan Gender	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan konsep-konsep Komunikasi dan kaitannya dengan Gender. Cakupan materi yakni: Konsep dan Persoalan Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan, Aturan-aturan yang berkaitan dengan Gender serta Kaitan Komunikasi Masyarakat dengan Dinamika Gender di Indonesia.</p>			
15	IKP 329	Hak Atas Kekayaan Intelektual	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk mengerti dan memahami tentang objek pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Cakupan materi yakni: Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Praktek di Lapangan yang berkaitan dengan dunia jurnalisme dan komunikasi publik dan strategis.</p>			

16	IKP 330	Protokuler	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan penerapan seputar Manajemen Protokuler. Cakupan materi yakni: Konsep Protokuler di lembaga pemerintahan dan Korporasi, Regulasi Yang Mengatur, Persoalan dan Penanganan akan Hambatan yang timbul.</p>			
17	IKP 331	Etika Bisnis	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya etika dalam komunikasi bisnis. Pembahasan mata kuliah ini antara lain mencakup tata cara berkomunikasi dengan stakeholders, tata cara penggunaan “bahasa bisnis” untuk menunjang efektivitas praktik bisnis.. Secara praktis, mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa mampu bersikap kritis terhadap perubahan paradigma dari pendekatan stockholder ke pendekatan stakeholder, serta tanggungjawab moral & sosial bisnis, sehingga dapat mengambil sikap positif dalam komunikasi bisnis.</p>			
18	IKP 332	Komunikasi Politik	2 SKS
<p>Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan ketrampilan kepada mahasiswa akan konsep-konsep dan penerapan seputar Konsep dan realita Komunikasi Politik kepada mahasiswa. Cakupan materi yakni: Konsep Komunikasi Politik, Perspektif kajian Komunikasi Politik, Kaitan Komunikasi Politik dengan Opini Publik dan aspek lainnya serta Penerapan Komunikasi Politik di Indonesia.</p>			

**Form Konversi
Mata Kuliah Kurikulum Lama (2018)
Ke Mata Kuliah Kurikulum Baru (2023)**

Semester 1

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	KOMW101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3		IKW 101	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	
2	KOMW102	Sosiologi Komunikasi	3		IKW 102	Pengantar Sosiologi	2	
					IKW 215	Sosiologi Komunikasi	2	
3	KOMW103	Sistem Sosial Politik Indonesia	3		IKW 103	Pengantar Ilmu Politik	2	
					IKW 203	Sistem Politik Indonesia	2	
4	KOMW104	Public Speaking	3		IKW 106	Public Speaking	2	
5	KOMW105	Fotografi Dasar	3		IKW 105	Fotografi Dasar	3	
6	UKS 101	Pendidikan Agama	2		UKS 101	Pendidikan Agama	2	
7	UKS 102	Pendidikan Pancasila	2		UKS 102	Pendidikan Pancasila	2	
8	UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2		UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
9	UKS 104	Bahasa Indonesia	2		UKS 104	Bahasa Indonesia	2	

Semester 2

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	KOMW106	Komunikasi Antar Pribadi	3		IKW 110	Komunikasi Antar Pribadi dan Kelompok	3	
2	KOMW107	Komunikasi Kelompok dan Organisasi	3		IKW 113	Komunikasi Organisasi	2	
3	KOMW108	Komunikasi Massa	3		IKW 112	Komunikasi Massa	3	
4	KOMW109	Komunikasi Lintas Budaya	3		IKW 210	Komunikasi Lintas Budaya	2	
5	KOMW110	Teknologi Komunikasi dan Informasi	3		IKW 214	Teknologi Komunikasi dan Informasi	2	
6	KOMW111	Opini Publik	3		KJW 310	Opini Publik	2	
7	KOMW112	Filsafat Komunikasi	3		IKW 201	Logika	2	
8	KOMW113	Psikologi Komunikasi	3		IKW 202	Psikologi Komunikasi	3	

Semester 3

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	KOMW201	Teori Komunikasi	3		IKW 109	Teori Komunikasi	3	
2	KOMW202	Komunikasi Gender	3		IKP 328	Komunikasi dan Gender	2	
3	KOMW203	Statistik Sosial	3		IKW 111	Statistik Sosial	3	
4	KOMW204	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3		IKW 211	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3	
5	KOMW205	Komunikasi Visual	3		IKW 213	Komunikasi Visual	2	
					KPW 303	Desain Komunikasi Visual	3	
					IKP 303	Desain Surat Kabar dan Majalah	2	
6	KOMW206	Komunikasi Lingkungan	3		IKW 208	Hukum Lingkungan	2	
7	KOMW207	Komunikasi Kreatif	2		IKP 333	Komunikasi Inovatif dan Kreatif	2	
					IKP 326	Creative and Innovative Thinking	2	
8	KOMW208	Komunikasi Digital	3					

*Pedoman Konversi Mata Kuliah
Program Studi Ilmu Komunikasi SCU*

Semester 4

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	KOMW209	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	3		IKW 204	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	3	
					IKW 205	Semiotika	2	
2	KOMW210	Kewirausahaan Komunikasi	3		IKW 401	Media Enterpreneurship	2	
					IKW 107	Sistem Ekonomi Indonesia	2	
3	KOMW211	Kebijakan Komunikasi	3		IKW 104	Sistem Hukum Indonesia	3	
4	KOMW212	Komunikasi Masyarakat Marjinal	3		IKP 302	Komunikasi Masyarakat Marjinal	2	
5	KOMW213	Pengantar Jurnalisme	3		IKW 206	Dasar-dasar Jurnalisme	2	
6	KOMW214	Dasar-dasar Komunikasi Strategis	3		IKW 207	Dasar-dasar Komunikasi Publik dan Strategis	2	
7	KOMW215	Dasar-Dasar Media Kreatif	3					
8	KOMW216	Etika Profesi	3		IKP 331	Etika Bisnis	2	
					IKW 216	Etika Komunikasi	3	
					KJW 314	Etika Jurnalisme	2	
					KPW 313	Etika Kehumasan	2	

Semester 5

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	MK301	Reportase	3		KJW 211	Teknik Peliputan	2	
2	MK302	Naskah Media	3		KJW 212	Teknik Menulis Berita	3	
3	MK303	Digital News Production	3		KJW 213	Produksi Berita Televisi dan Radio	2	
4	MK304	Konvergensi Media	3		KJW 307	Konvergensi Media	2	
5	KS301	Periklanan	3		IKW 212	Periklanan	2	
					KPW 307	Copywriting Periklanan	2	
					IKP 301	Periklanan Internasional	2	
6	KS302	Komunikasi Pemasaran	3		KPW 317	Komunikasi Pemasaran	2	
					IKP 307	Consumer Behaviour	2	
7	KS303	Public Relations Management	3		KPW 212	Public Relations Management	2	
8	KS304	Komunikasi Politik	3		IKP 332	Komunikasi Politik	2	
9	KOMP301	Kajian Komunikasi Internasional	2		IKP 317	Organisasi dan Administrasi Internasional	2	
10	KOMP302	Komunikasi Bisnis	2		IKP 327	Komunikasi Bisnis	2	
11	KOMP303	Fotografi Kreatif	2		KPW 306	Fotografi Kreatif	3	
12	KOMP304	Hak Asasi Manusia	2		KJW 303	Hak Asasi Manusia	2	
13	KOMP305	Bahasa Inggris (TOEFL Prep)	2		UKS 109	Bahasa Inggris	2	
					IKW 114	English for Communication	2	
14	KOMP306	Fotografi Jurnalistik	2		KJW 306	Foto Jurnalistik	3	
15	KOMP307	Liputan Investigasi	2		KJW 304	Liputan Investigasi	3	
16	KOMP308	Manajemen Komunikasi	2		IKW 108	Pengantar Manajemen	2	
					IKP 330	Protokol	2	
17	KOMP309	Bahasa Mandarin	2		IKW 115	Bahasa Mandarin I	2	
					IKW 209	Bahasa Mandarin II	2	

Catatan: Mata kuliah pilihan dengan kode KOMP diambil maksimal 8 SKS dari 27 SKS yang ditawarkan di Semester 5

*Pedoman Konversi Mata Kuliah
Program Studi Ilmu Komunikasi SCU*

Semester 6

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	UKS410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Usaha	2		UKS 410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2	
2	KOMW301	Proposal Tugas Akhir	2		IKP 325	Teknik Penulisan Efektif	2	
3	MK305	Riset Media	3		KJW 214	Analisis Isi dan Framing	2	
					KJW 301	Riset Media	3	
					KJW 308	Dokumentasi Media	2	
4	MK306	Jurnalistik Online	3		KJW 302	Jurnalistik Online	3	
5	MK307	Filmologi	3					
6	MK308	Kebijakan Media	3		KJW 305	Hukum Media Massa	3	
7	KS305	Riset Komunikasi Strategis	3		KPW 304	Riset Komunikasi Strategis	3	
8	KS306	Komunikasi Krisis	3		KPW 315	Manajemen Isu dan Krisis	2	
9	KS307	Tata Kelola Informasi Publik	3		IKP 315	Manajemen Informasi Publik	2	
10	KS308	Event Organizer Management	3		KPW 301	Event Organizer Management	3	
11	KOMP310	Sinematografi	2		KJW 313	Sinematografi	2	
12	KOMP311	Penulisan Skenario	2		IKP 306	Penulisan Skenario	2	
13	KOMP312	Produksi Media	2		IKP 308	Produksi Media	2	
14	KOMP313	Lobi dan Negosiasi	2		KPW 312	Lobi dan Negosiasi	2	
15	KOMP314	Public Relations Writing	2		KPW 214	Public Relations Writing	2	
16	KOMP315	Komunikasi Pemerintahan	2		KPW 310	Manajemen Komunikasi Pemerintah	2	
17	KOMP316	Corporate Social Responsibility	2		KPW 213	Corporate Social Responsibility	3	
18	KOMP317	Public Relations Campaign	2		KPW 302	Public Relations Campaign	3	
19	KOMP318	Branding Management	2		KPW 305	Branding Management	2	
					IKP 329	Hak Atas Kekayaan Intelektual	2	
20	KOMP319	Capacity Building	2		IKP 331	Pengembangan Personalitas	2	

Catatan: Mata kuliah pilihan dengan kode KOMP diambil minimal 6 SKS dari 30 SKS yang ditawarkan di Semester 6

Semester 7

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	KOMW401	Kuliah Kerja Praktik	4		IKW 301	Kuliah Kerja Praktek	3	

Semester 8

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	KOMW402	Skripsi/ Tugas Akhir	4		IKW 402	Skripsi	4	

Total SKS 144

IPK Lama _____

IPK Baru _____

*Pedoman Konversi Mata Kuliah
Program Studi Ilmu Komunikasi SCU*

Tindak Lanjut :

Mengetahui,
KaProdi
Konversi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Distribusi Mata Kuliah Per Semester

Kurikulum 2023

Kurikulum 2018

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH (MK)	WAJIB/ PILIHAN	NILAI MINIMAL	SKS	KODE	MATAKULIAH	WAJIB/ PILIHAN	NILAI MINIMAL	SKS	
SEMESTER 1	KOMW101	Pengantar Ilmu Komunikasi	W	D	3	IKW 101	Pengantar Ilmu Komunikasi	W	D	3	
	UKS 101	Pendidikan Agama	W	D	2	IKW 102	Pengantar Sosiologi	W	D	2	
	UKS 102	Pendidikan Pancasila	W	D	2	IKW 103	Pengantar Ilmu Politik	W	D	2	
	KOMW102	Sosiologi Komunikasi	W	D	3	IKW 104	Sistem Hukum Indonesia	W	D	3	
	KOMW103	Sistem Sosial Politik Indonesia	W	D	3	IKW 105	Fotografi Dasar	W	D	3	
	UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	W	D	2	IKW 106	Public Speaking	W	D	2	
	KOMW104	Public Speaking	W	D	3	UKS 102	Pendidikan Pancasila	W	D	2	
	KOMW105	Fotografi Dasar	W	D	3	UKS 104	Bahasa Indonesia	W	D	2	
	UKS 104	Bahasa Indonesia	W	D	2	UKS 109	Bahasa Inggris	W	D	2	
JUMLAH SKS					23	JUMLAH SKS					21
SEMESTER 2	KOMW106	Komunikasi Antar Pribadi	W	D	3	IKW 107	Sistem Ekonomi Indonesia	W	D	2	
	KOMW107	Komunikasi Kelompok dan	W	D	3	IKW 108	Pengantar Manajemen	W	D	2	
	KOMW108	Komunikasi Massa	W	D	3	IKW 109	Teori Komunikasi	W	D	3	
	KOMW109	Komunikasi Lintas Budaya	W	D	3	IKW 110	Komunikasi Antar Pribadi dan Kelompok	W	D	3	
	KOMW110	Teknologi Komunikasi dan Informasi	W	D	3	IKW 111	Statistik Sosial	W	D	3	
	KOMW111	Opini Publik	W	D	3	IKW 112	Komunikasi Massa	W	D	3	
	KOMW112	Filsafat Komunikasi	W	D	3	IKW 113	Komunikasi Organisasi	W	D	2	
	KOMW113	Psikologi Komunikasi	W	D	3	IKW 114	English for Communication	W	D	2	
						IKW 115	Bahasa Mandarin I	W	D	2	
						UKS 103	Pendidikan Kewarganegaraan	W	D	2	
JUMLAH SKS					24	JUMLAH SKS					24
SEMESTER 3	KOMW201	Teori Komunikasi	W	D	3	IKW 201	Logika	W	D	2	
	KOMW202	Komunikasi Jender	W	D	3	IKW 202	Psikologi Komunikasi	W	D	3	
	KOMW203	Statistik Sosial	W	D	3	IKW 203	Sistem Politik Indonesia	W	D	2	
	KOMW204	Metode Penelitian Komunikasi	W	D	3	IKW 204	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	W	D	3	
	KOMW205	Komunikasi Visual	W	D	3	IKW 205	Semiotika	W	D	2	
	KOMW206	Komunikasi Lingkungan	W	D	3	IKW 206	Dasar-dasar Jurnalisme	W	D	2	
	KOMW207	Komunikasi Kreatif	W	D	2	IKW 207	Dasar-dasar Komunikasi Publik dan Strategis	W	D	2	
	KOMW208	Komunikasi Digital	W	D	3	IKW 208	Hukum Lingkungan	W	D	2	
						IKW 209	Bahasa Mandarin II	W	D	2	
						IKW 210	Komunikasi Lintas Budaya	W	D	2	
						UKS 101	Pendidikan Agama	W	D	2	
JUMLAH SKS					23	JUMLAH SKS					24

*Pedoman Konversi Mata Kuliah
Program Studi Ilmu Komunikasi - SCU*

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH (MK)	WAJIB/ PILIHAN	NILAI MINIMAL	SKS	KODE	MATAKULIAH	WAJIB/ PILIHAN	NILAI MINIMAL	SKS	
SEMESTER 4	KOMW209	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	W	D	3	IKW 211	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	W	D	3	
	KOMW210	Kewirausahaan Komunikasi	W	D	3	IKW 212	Periklanan	W	D	2	
	KOMW211	Kebijakan Komunikasi	W	D	3	IKW 213	Komunikasi Visual	W	D	2	
	KOMW212	Komunikasi Masyarakat Marjinal	W	D	3	IKW 214	Teknologi Komunikasi dan Informasi	W	D	2	
	KOMW213	Pengantar Jurnalisme	W	D	3	IKW 215	Sosiologi Komunikasi	W	D	2	
	KOMW214	Dasar-dasar Komunikasi Strategis	W	D	3	IKW 216	Etika Komunikasi	W	D	3	
	KOMW215	Dasar-Dasar Media Kreatif	W	D	3	KJW 211	Teknik Peliputan	P	D	2	
	KOMW216	Etika Profesi	W	D	3	KJW 212	Teknik Menulis Berita	P	D	3	
	KOMW209	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	W	D	3	KJW 213	Produksi Berita Televisi dan Radio	P	D	2	
						KJW 214	Analisis Isi dan Framing	P	D	2	
						KPW 317	Komunikasi Pemasaran	P	D	2	
						KPW 212	Public Relations Management	P	D	2	
						KPW 213	Corporate Social Responsibility	P	D	3	
						KPW 214	Public Relations Writing	P	D	2	
JUMLAH SKS						JUMLAH SKS					
					24						23
SEMESTER 5	MK301	Reportase	P	D	3	KJW 301	Riset Media	P	D	3	
	MK302	Naskah Media	P	D	3	KJW 302	Jurnalistik Online	P	D	3	
	MK303	Digital News Production	P	D	3	KJW 303	Hak Asasi Manusia	P	D	2	
	MK304	Konvergensi Media	P	D	3	KJW 304	Liputan Investigasi	P	D	3	
	KS301	Periklanan	P	D	3	KJW 305	Hukum Media Massa	P	D	3	
	KS302	Komunikasi Pemasaran	P	D	3	KJW 306	Foto Jurnalistik	P	D	3	
	KS303	Public Relations Management	P	D	3	KJW 307	Konvergensi Media	P	D	2	
	KS304	Komunikasi Politik	P	D	3	KPW 301	Event Organizer Management	P	D	3	
	KOMP301	Kajian Komunikasi Internasional	P	D	2	KPW 302	Public Relations Campaign	P	D	3	
	KOMP302	Komunikasi Bisnis	P	D	2	KPW 303	Desain Komunikasi Visual	P	D	3	
	KOMP303	Fotografi Kreatif	P	D	2	KPW 304	Riset Komunikasi Strategis	P	D	3	
	KOMP304	Hak Asasi Manusia	P	D	2	KPW 305	Branding Management	P	D	2	
	KOMP305	Bahasa Inggris (TOEFL Prep)	P	D	2	KPW 306	Fotografi Kreatif	P	D	3	
	KOMP306	Fotografi Jurnalistik	P	D	2	KPW 307	Copywriting Periklanan	P	D	2	
	KOMP307	Liputan Investigasi	P	D	2	IKP 327	Komunikasi Bisnis	P	D		
	KOMP308	Manajemen Komunikasi	P	D	2	IKP 325	Teknik Penulisan Efektif	P	D	2	
	KOMP309	Bahasa Mandarin	P	D	2	IKP 302	Komunikasi Inovatif dan Kreatif	P	D	2	
Catatan: Mata Kuliah Konsentrasi (Kode MK dan KS) adalah mata kuliah yang pada dasarnya bersifat pilihan namun wajib diambil oleh mahasiswa sesuai dengan bidang minat tertentu (wajib terbatas) yaitu Media Kreatif dan Komunikasi Strategis						IKP 324	Pengembangan Personalitas	P	D	2	
						IKP 328	Komunikasi dan Jender	P	D	2	
						IKP 332	Komunikasi Politik	P	D	2	
JUMLAH SKS					20	JUMLAH SKS					21

*Pedoman Konversi Mata Kuliah
Program Studi Ilmu Komunikasi - SCU*

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH (MK)	WAJIB/ PILIHAN	NILAI MINIMAL	SKS	KODE	MATAKULIAH	WAJIB/ PILIHAN	NILAI MINIMAL	SKS	
SEMESTER 6	UKS410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	W	D	2	IKW 301	Kuliah Kerja Praktek	W	D	3	
	KOMW301	Proposal Tugas Akhir	W	D	2	KJW 310	Opini Publik	P	D	2	
	MK305	Riset Media	P	D	3	KJW 313	Sinematografi	P	D	2	
	MK306	Jurnalistik Online	P	D	3	KJW 314	Etika Jurnalisme	P	D	2	
	MK307	Filmologi	P	D	3	KJW 308	Dokumentasi Media	P	D	2	
	MK308	Kebijakan Media	P	D	3	KPW 310	Manajemen Komunikasi Pemerintah	P	D	2	
	KS305	Riset Komunikasi Strategis	P	D	3	KPW 312	Lobi dan Negosiasi	P	D	2	
	KS306	Komunikasi Krisis	P	D	3	KPW 313	Etika Kehumasan	P	D	2	
	KS307	Tata Kelola Informasi Publik	P	D	3	KPW 315	Manajemen Isu dan Krisis	P	D	2	
	KS308	Event Organizer Management	P	D	3	IKP 301	Periklanan Internasional	P	D	2	
	KOMP310	Sinematografi	P	D	2	IKP 303	Desain Surat Kabar dan Majalah	P	D	2	
	KOMP311	Penulisan Skenario	P	D	2	IKP 306	Penulisan Skenario	P	D	2	
	KOMP312	Produksi Media	P	D	2	IKP 308	Produksi Media	P	D	2	
	KOMP313	Lobi dan Negosiasi	P	D	2	IKP 315	Manajemen Informasi Publik	P	D	2	
	KOMP314	Public Relations Writing	P	D	2	IKP 317	Organisasi dan Administrasi Internasional	P	D	2	
	KOMP315	Komunikasi Pemerintahan	P	D	2						
	KOMP316	Corporate Social Responsibility	P	D	2						
	KOMP317	Public Relations Campaign	P	D	2						
	KOMP318	Branding Management	P	D	2						
KOMP319	Capacity Building	P	D	2							
JUMLAH SKS					22	JUMLAH SKS					
SEMESTER 7	KOMW401	Kuliah Kerja Praktik	W	D	4	IKW 401	Media Entrepreneurship	W	D	2	
						UKS 410	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	W	D	2	
						IKP 307	Consumer Behaviour	P	D	2	
						IKP 329	Hak Atas Kekayaan Intelektual	P	D	2	
						IKP 330	Protokol	P	D	2	
						IKP 331	Etika Bisnis	P	D	2	
					IKP 326	Creative and Innovative Thinking	P	D	2		
JUMLAH SKS					4	JUMLAH SKS					
SEMESTER 8	KOMW402	Skripsi	W	C	4	IKW 402	Skripsi	W	C	4	
JUMLAH SKS						JUMLAH SKS					
TOTAL SKS WAJIB DITEMPUH					144	TOTAL SKS WAJIB DITEMPUH					146

BAB IV

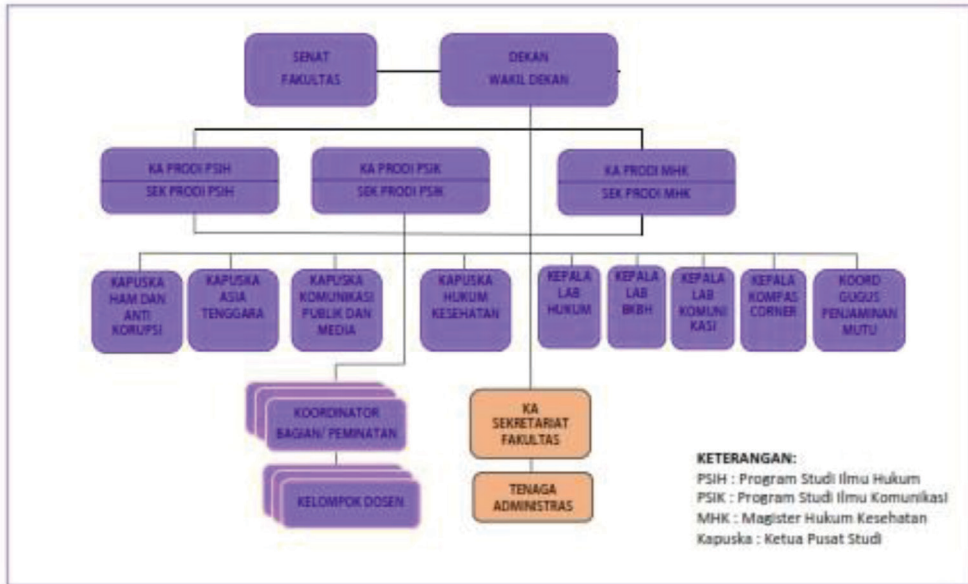
INFORMASI UMUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

SEJARAH SINGKAT

Universitas Katolik Soegijapranata sebagai perkembangan dari Institut Teknologi Katolik Semarang yang merupakan kelanjutan dari Universitas Katolik Atma Jaya Semarang membuka Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada tanggal 3 Oktober 2004 berdasarkan SK Rektor Universitas Katolik Soegijapranata no E.2/0214/KEP/X/2004 tahun 2004 tentang Pembentukan Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti no 3144/D/T/2004 tanggal 12 Agustus tahun 2004 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Hukum (S2) pada Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, dengan perpanjangan ijin dari Dirjen Dikti No.4150/D/T/2008 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum, Strata Dua (S2) pada Universitas Katolik Soegijapranata

PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

1. Struktur Organisasi



2. Pengelola Program Studi :

1.	Ketua Program Studi	Dr. Endang Wahyati Y, SH.,MH
2.	Sekretaris	Ignatius Hartyo Purwanto, SH.,M
3.	Tenaga Kependidikan	1. Dian Artika
		2. V. Tri Hermi

1. Visi dan Misi

VISI

Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam bidang hukum kesehatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kasih, keadilan, kejujuran, etis, dan humanis.

MISI

- a. Mengembangkan hukum kesehatan sebagai bidang interdisiplin.
- b. Mengembangkan hukum kesehatan sebagai sub-sistem dalam sistem hukum di Indonesia
- c. Mendorong proses pemahaman dan penerapan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika di bidang kesehatan.

- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum kesehatan sehingga tercipta perlindungan hukum bagi health care providers (HCP) dan health care reciever (HCR) yang seimbang.
- e. Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap permasalahan hukum kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat melalui komunitas akademik.
- f. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dan organisasi profesi yang berkaitan dengan hukum kesehatan.

2. Asas dan Tujuan Pendidikan

Asas Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Statuta Universitas Katolik Soegijapranata adalah:

Universitas Katolik Soegijapranata sebagai Perguruan Tinggi Swasta Katolik, diinspirasi dan dijiwai oleh cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Katolik, dan berpe-doman pada Konstitusi Apostolik *Ex Corde Ecclesiae*

1. Tentang Universitas Katolik yang menekankan nilai-nilai : cinta akan kebenaran, keadilan sosial, kebebasan, keterbukaan, persaudaraan dan semangat pelayanan.
2. Universitas meneruskan semangat Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ yaitu semangat perjuangan dan pengabdian bagi nusa dan bangsa serta memberikan perhatian khusus kepada golongan masyarakat lemah sesuai dengan ruang lingkup Universitas sebagai Perguruan Tinggi.
3. Universitas memberikan perhatian pada permasalahan aktual masyarakat Indonesia khususnya masalah pemukiman yang berwawasan lingkungan (eko-pemukiman) yang ditetapkan menjadi Pola Ilmiah Pokok Universitas, yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata yaitu menghasilkan Magister yang memiliki kompetensi:

1. Profesional di bidang hukum kesehatan.
2. mampu mengembangkan hukum kesehatan sebagai sub sistem hukum nasional dan responsif terhadap permasalahan aktual.
3. Berpikir kritis, humanis, dan etis dalam menganalisis masalah-masalah kesehatan dan masalah-masalah hukum yang dihadapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
4. Profesional dalam menangani perkara litigasi maupun non litigasi terhadap permasalahan aktual di bidang hukum kesehatan.
5. Melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi.

3. Standar Kompetensi Lulusan :

Program Magister Hukum Kesehatan menghasilkan Magister yang memiliki kompetensi utama dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Kepribadian: Lulusan Magister Hukum Kesehatan memiliki dan dapat menunjukkan kemampuan berpikir dan bersikap rasional serta dinamis; berpandangan luas sebagai manusia berintelektual serta bersikap profesional; dan dapat menunjukkan integritas pribadi dan moralitas tinggi dengan berpegang pada nilai-nilai dasar kasih, keadilan, kejujuran, etis, dan humanis.
2. Keilmuan dan Ketrampilan: Lulusan Magister Hukum Kesehatan diharapkan mampu dan menguasai secara utuh teori-teori hukum kesehatan, untuk selanjutnya mampu menerapkannya dalam praktik.
3. Keahlian Berkarya: Lulusan Magister Hukum Kesehatan mampu merancang kebijakan dan ketentuan hukum dalam pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, menyusun ketentuan hukum perumahasakitan, dan penyelesaian persoalan hukum dalam pelayanan kesehatan.
4. Perilaku Berkarya: Lulusan Magister Hukum Kesehatan mampu merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memecahkan masalah Hukum Kesehatan dalam masyarakat dengan penalaran ilmiah dan mengembangkan ilmu hukum kesehatan serta etika pelayanan kesehatan.
5. Berkehidupan Bersama: Lulusan Magister Hukum Kesehatan mampu meningkatkan pengabdian untuk memajukan Ilmu Hukum Kesehatan dengan melakukan penelitian dan pengkajian.

Kompetensi Pendukung :

1. Lulusan Magister Hukum Kesehatan mampu bekerjasama dalam satu Tim Lintas Bidang Ilmu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Memahami dan memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan hukum dalam pelayanan kesehatan di lingkungannya, baik lembaga Pemerintah, Swasta maupun pelayanan Mandiri.

Kompetensi Pendukung :

Lulusan Magister Hukum Kesehatan disiapkan agar mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (Doktor) dengan syarat kelulusan IPK minimal 3,00. Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tesis yang didasarkan pada kegiatan penelitian terhadap persoalan-persoalan hukum kesehatan yang aktual, dan mengakomodasi hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh lingkungannya. Mahasiswa disiapkan untuk selalu bersikap kritis, memahami dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di sekelilingnya.

Kompetensi lulusan Magister Hukum Kesehatan sebagaimana diuraikan tersebut baik kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

4. NILAI-NILAI DASAR (Core Value)

Core Value (nilai-nilai dasar) yang dianut oleh Program Studi Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata disingkat KASIH:

1. Komitmen dan kerjasama terhadap perbaikan proses pengelolaan;
2. Antusias dan kerendahan hati dalam melayani customers;
3. Sabar dan berani dalam keterbukaan pengelolaan;
4. Integritas dan jujur dalam mewujudkan visi dan misi; dan
5. Hati yang berlimpah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

5. Prospek, Peran, dan Profil Lulusan

1. Prospek dan Peran Lulusan

Lulusan Magister Hukum Kesehatan memiliki prospek dan peran yang baik dalam bidang pekerjaan hukum dan kesehatan, yaitu :

- a. bekerja sebagai praktisi profesional di bidang hukum seperti advokat, jaksa, dan hakim, mediator, dan legal drafter;
- b. bekerja sebagai praktisi profesional di bidang kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, apoteker;
- c. maupun yang bekerja pada institusi pemerintah dan pelayanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas,
- d. sebagai akademisi dan/atau peneliti.

2. Lulusan/Alumni

Lulusan/alumni bekerja/berprofesi pada:

- a. institusi pemerintah;
- b. institusi swasta;
- c. pelayanan di sarana kesehatan;
- d. advokat dan mediator;
- e. akademisi

Beberapa di antaranya menduduki dalam jabatan pimpinan pada institusi baik pemerintah, institusi swasta maupun pengurus organisasi profesi, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

6. Kurikulum

Kurikulum Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata disusun dengan mendasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi serta memperhatikan Visi, Misi, Standar Kompetensi, dan Centre of Excellence.

1. *Centre of Excellence*: Hukum Kesehatan yang etis dan humanis.
2. Beban Studi
 Beban studi Program Pendidikan Magister (Strata 2) pada Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata ditetapkan 41 SKS yang kesemuanya adalah mata kuliah wajib. Selain itu untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar maka diberikan terlebih dahulu mata kuliah Matrikulasi non SKS yang bersifat wajib bagi semua peserta. Mata kuliah disusun dengan sistem paket untuk setiap semester. Matakuliah pilihan (3) telah disiapkan meliputi: Hukum Keperawatan, Hukum Perlindungan Konsumen Kesehatan serta matakuliah E-Health dan Telemedicine.
3. Susunan Mata Kuliah dalam setiap semester

MATAKULIAH WAJIB

SEMESTER 1

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HK. 711	Sistem PHI dan Peradilan Profesi Kesehatan	2
2	HK. 709	Hukum Perikatan dan Pelayanan Kesehatan	2
3	HK. 704	Legal Drafting	2
4	HK. 605	Politik Kesehatan	2
5	HK. 712	Bioetik dan Medicolegal	2
6	HK. 713	<i>Hukum Epidemi dan Kesehatan Lingkungan</i>	2
7	HK. 602	Filsafat Ilmu	2
8	HK. 714	Hk. Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi	2
9	HK. 604	Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia	2
Jumlah SKS			18

SEMESTER 2

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HK. 601	Metodologi Penelitian	3
2	HK. 716	Hukum Reproduksi dan Kesehatan Mental	2
3	HK. 717	Aspek Hukum Manajemen RS dan Hospital Bylaws	2
4	HK. 718	Statistik dan Statistik Kesehatan	2
5	HK. 719	Hukum Pembuktian dalam Pelayanan Kesehatan	2

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
6	HK. 720	<i>Penyelesaian Perkara Medik</i>	2
7	HK. 721	Hukum Askes dan Perpajakan Pelayanan Kesehatan	2
8	HK. 722	Hukum Rekam Medik dan Informed Consent	2
Jumlah SKS			17

SEMESTER 3

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HK. 710	TESIS	6
Total SKS			41

Matakuliah Pilihan SEMESTER 3

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HKP.723	<i>Hukum Perlindungan Konsumen Pelayanan Kesehatan</i>	2
2	HKP.724	Hukum Keperawatan	2
3	HKP.725	E-Healt & Telemedicine	2
Total SKS			6

4. Deskripsi Mata Kuliah

- **Sistem Kesehatan Nasional (SKN)**

Mata kuliah Sistem Kesehatan Nasional adalah mata kuliah matrikulasi wajib bagi semua peserta program sebagai pembekalan untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan berikutnya. Mata kuliah ini berisi tentang sistem kesehatan yang berlaku di Indonesia meliputi Sub-sus sistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Dalam kuliah matrikulasi, mata kuliah SKN berkaitan erat dengan mata kuliah Epidemiologi, dalam aspek hukum terkait dengan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan dan menganalisis problema sistem kesehatan Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia

- **Epidemiologi**

Mata kuliah Epidemiologi adalah mata kuliah matrikulasi wajib bagi peserta program bukan sarjana kedokteran dan kesehatan masyarakat sebagai pembekalan untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan berikutnya. Mata kuliah ini berisi tentang dasar-dasar epidemiologi, faktor-faktor yang berhubungan dan atau berpengaruh terhadap penyakit atau kesehatan individu, faktor-faktor yang berhubungan dan atau berpengaruh terhadap penyakit dan kesehatan masyarakat, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran penyakit dan dasar-dasar penyelesaian konflik hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan dengan pendekatan epidemiologi. Dalam kuliah matrikulasi, mata kuliah epidemiologi berkaitan erat dengan mata kuliah SKN dan Terminologi Medis, dalam aspek hukum terkait dengan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan dan menganalisis problema Epidemii ditinjau dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

- **Terminologi Medis**

Mata kuliah Terminologi Media adalah mata kuliah matrikulasi wajib bagi bukan sarjana kedokteran sebagai pembekalan untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan berikutnya. Mata kuliah ini berisi tentang istilah dan pembentukan istilah medis sebagai pengenalan istilah serta implikasinya dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia. Dalam mata kuliah matrikulasi, mata kuliah Terminologi Medis berkaitan erat dengan mata kuliah SKN dan Epidemiologi.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan istilah – istilah medis.

- **Ilmu Hukum**

Mata kuliah ilmu Hukum adalah mata kuliah matrikulasi wajib bagi bukan sarjana hukum sebagai pembekalan untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan berikutnya. Mata kuliah ini berisi tentang konsep – konsep ilmu hukum dan proses pembentukan hukum serta konstruksi hukum. Dalam kuliah matrikulasi, mata kuliah ilmu hukum berkaitan erat dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Terminologi Hukum, Sistem Kesehatan Indonesia serta Epidemiologi. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan dan menganalisis problema hukum yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

- **Sistem Hukum Indonesia (SHI)**

Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia adalah mata kuliah matrikulasi wajib bagi bukan sarjana hukum sebagai pembekalan untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan berikutnya. Mata kuliah ini berisi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia meliputi hukum pidana, perdata dan tata usaha negara (administrasi) kaitannya dengan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam kuliah matrikulasi, mata kuliah SHI berkaitan erat dengan mata kuliah Ilmu Hukum, Terminologi Hukum, Sistem Kesehatan Indonesia serta Epidemiologi. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan dan menganalisis problema sistem hukum pidana, perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah pelayanan kesehatan.

- **Terminologi Hukum**

Mata kuliah Terminologi Hukum adalah mata kuliah matrikulasi wajib bagi bukan sarjana hukum sebagai kesehatan berikutnya. Mata kuliah ini berisi tentang istilah dan pembentukan istilah hukum sebagai pengenalan istilah serta implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam kuliah matrikulasi, mata kuliah Terminologi Hukum berkaitan erat dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Ilmu Hukum.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan istilah – istilah hukum.

- **Filsafat Ilmu (2 SKS)**

Mata kuliah Filsafat Ilmu adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan berikutnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang filsafat ilmu, perkembangan ilmu dan metode pendekatannya serta dasar–dasar filosofi dalam mempelajari ilmu pengetahuan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan pengertian filsafat ilmu, perkembangan ilmu dan metode pendekatannya serta dasar–dasar filosofi dalam mempelajari ilmu pengetahuan.

- **Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang pengertian tentang hak asasi manusia; konsep hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara yang berkaitan dengan upaya – upaya kesehatan di Indonesia serta implikasi hak asasi manusia dalam upaya kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan (a) deklarasi internasional tentang HAM, (b) sejarah deklarasi internasional tentang HAM, (c) HAM dalam pelayanan kesehatan, (d) hak dan kewajiban institusi pelayanan kesehatan, (e) hak dan kewajiban health care provider (HCP), (f) hak dan kewajiban health care receiver (HCR), (g) hak dan kewajiban dalam upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta hasil akhirnya, (h) hak dan kewajiban dalam penelitian kesehatan dan kedokteran (i) serta menganalisis implikasi hukum dan hak asasi manusia dalam upaya kesehatan.

- **Politik Kesehatan (2 SKS)**

Mata kuliah Politik Hukum Kesehatan adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang pengertian kebijakan-kebijakan, analisis dan evaluasi kebijakan kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat (a) menyebutkan dan menjelaskan sejarah perkembangan sistem kesehatan nasional dan internasional, (b) menganalisis faktor – faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi dalam penetapan kebijakan kesehatan, (c) menganalisis faktor – faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan kesehatan, (d) menganalisis nilai – nilai/norma – norma yang berdampak pada kebijakan kesehatan, (e) menganalisis kebijakan sosial dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan kebijakan kesehatan, (f) menganalisis issue – issue hukum secara kritis yang berkaitan dengan organisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan kepada wanita, waria, gay, rakyat miskin dan klas sosial tertentu serta perbedaan ras.

- **Legal Drafting (2 SKS)**

Mata kuliah Legal Drafting adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah dengan yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang pengertian Legal Drafting, jenis-jenisnya (legislatif drafting, eksekutif drafting, contract drafting, dan isntitusal drafting), pedoman pembuatannya, dan implikasinya dalam menyelesaikan masalah hukum kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat melakukan analisis sebelum menyusun draft peraturan, draft keputusan, dan perjanjian sehingga dapat membuat peraturan, keputusan, dan perjanjian yang baik.

- **Hukum Perikatan dan Pelayanan Kesehatan (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Perikatan dan Pelayanan Kesehatan adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang pengertian hukum perikatan dalam pelayanan kesehatan dan implikasi hukum dalam upaya pelayanan kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta menganalisis implikasi hukum perikatan dalam pelayanan kesehatan dan implikasi hukum dalam upaya pelayanan kesehatan.

- **Sistem PHI dan Peradilan Profesi Kesehatan (2 SKS)**

Mata kuliah Sistem PHI dan Pengadilan Profesi Kesehatan adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah dengan yang diberikan pada semester 1 ini, berisi

tentang Sistem Peradilan Hukum Indonesia dan Pengadilan Profesi Kesehatan, yang meliputi sistem hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara dengan tekanan pada penanganan kasus di bidang kesehatan dan pengadilan profesi kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta menganalisis penegakan hukum dalam kasus-kasus kesehatan dan pengadilan profesi kesehatan.

- **Bioetik dan Medicolegal (2 SKS)**

Mata kuliah Bioetik dan Medicolegal adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah dengan yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang bioetik dan medicolegal dalam perkembangan di dunia; dan aspek hukum dalam bioetik dan kesehatan. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta menganalisis kasus-kasus dalam bidang kesehatan dengan pendekatan bioetik dan medicolegal.

- **Hukum Epidemi dan Kesehatan Lingkungan (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Epidemi dan Kesehatan Lingkungan adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum serta implikasi Hukum Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta menganalisis implikasi Hukum Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi. Diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang pengertian Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi

- **Metodologi Penelitian (3 SKS)**

Mata kuliah Metodologi Penelitian adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah dengan dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang pengertian Metodologi Penelitian, penyusunan judul, permasalahan, pengumpulan data, sampai dengan analisis data dan penyusunan laporan dalam menghadapi kasus penyakit wabah, kejadian luar biasa dan kesehatan lingkungan; (c) kasus – kasus wabah, kejadian luar biasa, epidemi dan kesehatan lingkungan dari sudut pandang hukum menganalisis implikasi hukum terhadap kejadian epidemi dan masalah kesehatan lingkungan, misalnya (a) hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat dan individu dalam menghadapi kasus penyakit wabah, kejadian luar biasa dan kesehatan lingkungan (b) kebijakan – kebijakan untuk mengatur sistem pelayanan hukum terhadap kejadian epidemi dan masalah kesehatan lingkungan. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta

- **Hukum Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat menyusun proposal tesis dengan baik kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 1 ini, berisi tentang peraturan perundangan tentang epidemi internasional, nasional; tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam epidemi penyakit dan kesehatan lingkungan, hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat dan individu dalam menghadapi kasus penyakit wabah, kejadian luar biasa dan epidemi lainnya dan kesehatan lingkungan serta implikasi

- **Hukum Kependudukan, Reproduksi, dan Kesehatan Mental (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Kependudukan, Reproduksi dan Kesehatan Mental adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang hukum kependudukan, reproduksi dan kesehatan mental dan implikasinya dalam menyelesaikan masalah hukum kesehatan; perkembangan kebijakan Pemerintah dalam bidang kependudukan dan perlindungan perempuan termasuk program Keluarga Berencana; kependudukan, reproduksi dan kesehatan mental dari sudut pandang bidang psikologi dan bidang kesehatan. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta menganalisis implikasi hukum terhadap kependudukan, reproduksi, dan mental dengan mengkaitkan aspek psikologi dan aspek kesehatan.

- **Hukum Pembuktian Pelayanan Kesehatan dan Forensic (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Pembuktian Pelayanan Kesehatan dan Forensic adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang Hukum Pembuktian Pelayanan Kesehatan dan Forensic yang di dalamnya berisikan pengaturan pembuktian dan alat-alat bukti termasuk forensik dan implikasinya dalam menyelesaikan masalah hukum kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pada kasus-kasus dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan pembuktian khususnya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

- **Statistik dan Statistik Kesehatan (2 SKS)**

Mata kuliah Statistik dan Statistik Kesehatan adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah dengan dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang pengertian Statistik dan Statistik Kesehatan dan implikasinya dalam

melakukan analisis data kuantitatif. Mata kuliah ini akan menjadi pendukung dalam pembuatan tesis khususnya dalam penentuan langkah-langkah penelitian yang bersifat kuantitatif beserta analisisnya.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui dan menerapkan dalam pembuatan tesis.

- **Aspek Hukum Manajemen Rumah Sakit dan Hospital bylaws (2 SKS)**

Mata kuliah Aspek Hukum Manajemen Rumah Sakit dan Hospital bylaws adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang Manajemen Rumah Sakit yang dikupas dari sudut pandang kesehatan, manajemen organisasi, dan aspek hukum; materi tentang hospital bylaws dan medical staff baylaws; dan implikasinya dalam menyelesaikan masalah hukum kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan serta menganalisis implikasi hukum terhadap manajemen rumah sakit.

- **Penyelesaian Perkara Medik (2 SKS)**

Mata kuliah Penyelesaian Perkara Medik adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata Kuliah yang diberikan pada semester 2 ini, berisikan materi tentang penyelesaian perkara medik khususnya secara keperdataan baik litigasi maupun nonlitigasi; model-model penyelesaian sengketa medik nonlitigasi; etika dalam penyelesaian sengketa; dan dilengkapi dengan simulasi mediasi dalam penyelesaian sengketa medik. Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mengetahui, menjelaskan, menganalisis kasus-kasus beserta penyelesaian sengketa serta dapat menerapkan dalam praktik untuk menangani kasus sengketa medik khususnya nonlitigasi.

- **Hukum Askes dan Perpajakan Pelayanan Kesehatan (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Askes dan Perpajakan Pelayanan Kesehatan adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, dan bagaimana penggunaan asuransi dalam pelayanan kesehatan serta ketentuan perpajakan dalam pelayanan kesehatan dan implikasinya dalam menyelesaikan masalah hukum kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat memecahkan persoalan yang berkaitan dengan asuransi dan perpajakan di bidang pelayanan kesehatan. Matrikulasi

- **Hukum Rekam Medik dan Informed Consent (2 SKS)**

Mata kuliah Hukum Rekam Medik dan Informed Consent adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi semua peserta untuk mempelajari mata kuliah hukum kesehatan lainnya. Mata kuliah yang diberikan pada semester 2 ini, berisi tentang pengertian, sejarah, peran dan fungsi rekam medis dalam pelayanan kesehatan, aspek hukum rekam medis dan rekam medis sebagai bukti hukum serta tentang sejarah dan filosofi informed consent, hak dan kewajiban individu pasien sebagai HCR dalam pelayanan dan , hak dan kewajiban individu pasien sebagai HCR dalam penelitian kesehatan, hak dan kewajiban dokter dan petugas kesehatan sebagai HCP dalam pelayanan kesehatan dan hak dan kewajiban dokter dan petugas kesehatan sebagai HCP dalam penelitian kesehatan.

Setelah selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta program dapat mampu menyebutkan dan menjelaskan serta menganalisis implikasi hukum dalam pelaksanaan rekam medis dan *informed consent*.

6. Dosen

a. Dosen Tetap

NO.	NAMA	NIDN / NIDK	Gelar	Jabatan Akademik	Mata Kuliah yang Diampu	Bidang Keahlian
1.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH.	624105901	Doktor	Lektor Kepala	Hukum Perikatan dan Pelayanan Kesehatan Hukum Epidemi dan Kesehatan Lingkungan Metodologi Penelitian	Hukum Kesehatan
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., MH.	6624106201	Doktor	Lektor Kepala	Hukum Askes dan Perpajakan Pelayanan Kesehatan	Hukum Asuransi

3.	Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum	618026701	Doktor	Lektor Kepala	Hukum Perikatan dan Pelayanan Kesehatan Hukum Reproduksi dan Kesehatan Mental	Hukum Perdata
4.	Dr. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum	630116902	Doktor	Lektor	Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Metodologi Penelitian	Hukum HAM
5.	Dr. Eko Nurmadiansyah, SH., M.Hum.	625037001	Doktor	-	Hukum Perikatan dan Pelayanan Kesehatan Hukum Epidemi dan Kesehatan Lingkungan	Hukum Lingkungan
6.	Dr. A.Joko Purwoko, SH., M.Hum	625086904	Doktor	Lektor	Legal Drafting	Ilmu Hukum
7.	Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.	604106901	Doktor	Lektor	Sistem PHI dan Peradilan Profesi Kesehatan Hukum Pembuktian dalam Pelayanan Kesehatan	Ilmu Hukum
8.	Prof. Rika Saraswati, SH. CN. M.Hum. PhD	629036803	Profesor	Guru Besar	Hukum Reproduksi dan Kesehatan Mental	Ilmu Hukum
9.	Dr. Rudyanto Soesilo, MSA	15075714	Doktor	Lektor Kepala	Filsafat Ilmu	Filsafat

10.	Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko, MSc.	623116201	Profesor	Guru Besar	Hk. Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi	Toxicologi dan Keamanan Pangan
11.	Dr. Y. Bagus Wismanto, MSi	244985677 518000	Doktor	Lektor Kepala	Statistik dan Statistik Kesehatan	Psikologi Kesehatan
12.	Dr. Endang Widyorini, MS. Psikolog	607026001	Doktor	Lektor Kepala	Hukum Reproduksi dan Kesehatan Mental	Psikologi Kesehatan
13.	Dr. Ir. Ch. Retnaningsih, MP.	629056302	Doktor	Lektor Kepala	Hk. Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi	Kesehatan Pangan

b. Dosen Tamu

NO.	NAMA	Gelar	Jabatan Akademik	Mata Kuliah yang Diampu	Bidang Keahlian
1.	Dr. drg. Hari Pudjo Nugroho, MH.Kes	Dr. Drg. MHKes	Praktisi	Bioetik dan Medicolegal Hk. Keamanan Pangan, Pemakaian Obat dan Toksikologi	Kedokteran Hukum Kesehatan
2.	Dr. dr. Edward Kurnia Sanusi, MM, MH.Kes	Dr. Dokter MH.Kes	Lektor	Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia	Dokter Hukum Kesehatan
3.	dr. C. Tjahjono Kuntjoro, PhD	Dokter, MSc, PhD	Praktisi	Politik Kesehatan	Dokter, Public Health

